

PUGAR BELANTARA KUANSING

*Dari Ekspedisi Jalur Kereta Api
Hingga Kisah Rehabilitasi Hutan dan Lahan*

**SYAFRIZALDI JPANG
DEDE KUNAIFI**



PUGAR BELANTARA KUANSING

Dari Ekspedisi Jalur Kereta Api Hingga Kisah Rehabilitasi Hutan dan Lahan

**SYAFRIZALDI JPANG
DEDE KUNAIFI**

PUGAR BELANTARA KUANSING

Dari Ekspedisi Jalur Kereta Api Hingga Kisah Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Penulis:

**Syafrizaldi Jpang
Dede Kunaifi**

Desain Cover & Layout:

Rafii Hidayatullah Nazari

Yayasan Hutanriau

*Komplek Bromelia
Jl. Kayu Manis, Arengka
Pekanbaru, RIAU
<https://hutanriau.or.id/>*

© 2021

ISBN 978-623-98337-0-1

Cetakan Pertama: November 2021

Isi dari naskah ini adalah tanggung jawab Penulis dan tidak mencerminkan pandangan Penerbit, Yayasan Hutanriau maupun BP DASHL Indragiri Rokan.



BPDASHL Indragiri Rokan



Yayasan Hutanriau

PRAKATA DAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada tim penulis yang telah memuat pengalaman kami, pelaksana RHL, BP DASHL Indragiri Rokan, UPT KPH Singingi dan pihak-pihak lain yang terlibat menjadi sebuah suguhan yang menarik untuk dibaca.

Jauh sebelum melaksanakan pendampingan RHL kami merasa kegiatan RHL seperti kegiatan absurd yang remeh-temeh. Kami merasa tidak yakin kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selain itu kami juga merasa khawatir dan bahkan pernah mencebik ide dari kegiatan ini.

Namun kemudian hampir semua perasaan itu punah seiring terlibatnya kami sebagai pendamping pada pelaksanaan kegiatan RHL sejak tahun 2019 hingga 2021.

Kami menghadapi dan mengelola dinamika sosial yang muncul dari ± 1.620 orang yang terlibat langsung sebagai pelaksana RHL, ditambah puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang terkena pengaruh dari pelaksanaan kegiatan ini. Kami mengelola 33 orang staf di tahun 2019, 35 orang di tahun 2020, 21 orang petugas pendamping dan staf pendukung lainnya di tahun 2021, merupakan pencapaian terbesar yang diperoleh Yayasan Hutanriau sejak didirikan tahun 2015.

Pengalaman mendengarkan, merasakan, mengalami yang dilakukan oleh petugas pendamping di lapangan bersama para pelaksana, sungguh menaruh harapan dapat memulihkan sistem pengelolaan hutan yang sedang sakit. Bencana terjadi dimana-mana, setiap tahun ada saja korban, termasuk Riau yang hampir tiap tahun terbakar, banjir, longsor dan seterusnya. Meski tak dapat dinafikan, bencana juga merupakan bagian sebuah sistem dalam memulihkan diri.

Ternyata masih banyak masyarakat yang rela bertungkus lumus mengerjakan pekerjaan yang kami anggap absurd itu, menanam di kawasan hutan. Di sana mereka meletakkan harapan dan impian. Sebagian menganggap kegiatan ini sebagai penyambung hidup. Sedang esok entah apa lagi. Meski ada yang harus mengalami kecelakaan di hutan, bertemu binatang buas, berenang dan terjatuh yang tak terhitung menuju lokasi RHL,

mereka tetap berkomitmen menyelesaikan kegiatan ini.

Keseluruhan itu, kami sebagai pendamping merasa sangat bersyukur karena telah selesai mendampingi pelaksana kegiatan RHL terutama pola agroforest tipe swakelola selama 3 tahun. Tanpa menafikan masih ditemukan kekurangan di sana sini, kami kemudian belajar melihat sebuah proyek besar yang diluncurkan oleh pemerintah dari sisi yang lain.

Tabik

Widya Astuti

Direktur Eksekutif Yayasan Hutanriau

PENGANTAR

Segala puja dan puji hanyalah bagi Allah *Subhana Wa Ta'ala*, Sang Penguasa Alam Semesta, Pencipta Jagat Raya dan Rimba Belantara. Sholawat dan salam selalu tercurah bagi kekasih-Nya Rasulullah Muhammad *Salallahu Alaihi Wasallam*. Semoga kita menjadi golongan hamba-Nya yang mendapat syafaat rasul-Nya di hari akhir.

Pugar Belantara Kuansing, sebuah naskah yang memadukan nostalgia sejarah dan sepenggal kisah perjuangan melestarikan hutan di gugusan Hutan Bukit Batabuh dan Sentajo. Rangkaian kisah dan testimoni dirangkai untuk menggambarkan perjalanan peradaban masyarakat di Kuantan Singingi yang diakhiri cerita tentang rehabilitasi hutan atau “memugar belantara”.

Penulis, Syarizaldi Jpang dan Dede Kunaifi, dengan bakat menulis dan hasil penjelajahannya merangkum beragam data dan informasi, lalu menuangkannya dalam 9 bagian atau bab buku ini. Jika membacanya, seolah kita terbawa ke dalam berbagai masa yang menggambarkan perjalanan peradaban, kekayaan alam, beragam kearifan lokal di Distrik Kuantan atau yang dikenal sebagai Kuantan Singingi saat ini. Lima bab akhir banyak berkisah tentang hutan dan perjuangan untuk melestarikannya.

Buku ini setidaknya menyampaikan pesan tersurat dan tersirat bahwa perjuangan untuk melestarikan hutan bukanlah pekerjaan sederhana. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) bukanlah sekedar tanam dan rawat bibit di hutan. Tetapi lebih dari itu, RHL adalah sebuah proses yang penuh dinamika sosial, ekonomi, dan politik kehutanan yang mencoba merangkul dan mengurai semua persoalan dengan berbagai keterbatasan. Kesadaran, adalah kunci untuk membuka tabir, sebagaimana para pembalak yang tobat dan menjadi pegiat rehabilitasi hutan.

Di ujung pengantar, kami sampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua Pejuang RHL atas segala kontribusinya dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan ini dari awal hingga usai. Pemangku Kawasan, Penyedia dan Pelaksana Swakelola, Pengawas dan Penilai, Pendamping, Pengaman, Tim Pembina, Tim Pengendali, serta segenap perangkat, tokoh, dan masyarakat di desa-desa lokasi RHL, adalah bagian penting pelaksanaan

dan keberhasilan program ini. Semoga Allah *Subhana Wa Ta'ala* memberikan kebaikan atas semua ikhtiar kita untuk melestarikan rimba dan bumi-Nya. Aamiin.

Membangun Hutan, Menanam dan Memelihara Kebaikan.

Bumi Lancang Kuning, Oktober 2021

Irpana Nur

Kepala BP DASHL Indragiri Rokan

DAFTAR ISI

Abad Silam Distrik Kuantan	1
Vista Bukit Batabuh.....	13
Lanskap Sentajo.....	23
Yang Luput Dari Ijzerman	33
Gairah Rimba	47
Pembalak Tobat.....	55
Tanam Pulih.....	65
Nikmat Khatulistiwa	77
Hikmah Meruah	85

BAGIAN 1

ABAD SILAM DISTRIK KUANTAN



Willem Hendrik de Greeve adalah geolog muda Belanda yang telah berjasa menemukan kandungan batu bara Ombilin di Sawahlunto. Pada 1871, dia menyusun laporan berjudul *Het Ombilin-kolenveld in de Padangsche Bovenlanden en het transportstelsel op Sumatra Westkust*. Setahun berikutnya, de Greeve tewas dalam perjalanan ekspedisi di Sungai Batang Kuantan. Dia dimakamkan di Durian Gadang, dekat Sijunjung.

Kendati laporan de Greeve baru disusun pada 1871, kandungan batu bara Ombilin sesungguhnya sudah diketahui beberapa tahun sebelumnya. Sejak 1868, Belanda sudah mulai memikirkan jalan termurah, termudah dan tercepat pengangkutan batu bara ke pantai timur Sumatra. Selat Malaka adalah satu-satunya jalan yang terbayang oleh Belanda untuk mengangkut hasil alam itu keluar dari Sumatra.

Pada periode 1883 hingga 1894, Belanda memulai misi eksploitasi batu bara dengan membangun infrastruktur pendukung. Tanpa jalur transportasi yang tepat, tentulah batu bara tidak bisa diangkut sampai ke Johor, Malaka ataupun Singapura. Sungai menjadi pilihan yang tepat, yang diperkirakan dapat memangkas ongkos produksi. Dengan demikian, keuntungan berlipat akan diperoleh.

Penerus de Greeve, Jan Willem Ijzerman, menyebut ada beberapa pilihan jalur angkutan, yakni: pertama melalui sambungan jalur Payakumbuh dengan Pekanbaru lalu melewati Sungai Siak. Aliran sungai-sungai yang melewati pedalaman dapat dilayari oleh kapal-kapal dengan rancangan yang cukup besar. Tapi ini tentu saja menarik perhatian penduduk, terutama di sepanjang aliran sungai Kampar. Rute ini dianggap terlalu berbahaya dan tidak direkomendasikan.

Pilihan kedua adalah rute sepanjang sungai Kuantan dan Indragiri. Sungai besar Ombilin yang berasal dari Danau Singkarak akan melewati tambang batu bara Ombilin. Dari tambang batu bara, Belanda dapat menyiapkan jalur kereta api yang lantas menyambungkannya dengan rute sungai. Pantai barat dan pantai timur Sumatra tidak bisa lebih baik dihubungkan selain dengan membangun rel kereta api sampai ke Durian Gadang. Dari sana, bisa langsung menghubungkan rel kereta dengan jalur kapal uap di muara Sungai Kuantan. Jika jalur ini dirasa lebih jauh, maka rute dapat melalui Lubuk Ambacang atau Lubuk Jambi. Dengan demikian, pilihan untuk menyusuri sungai Indragiri tidak perlu dipikirkan lagi.

Pilihan ketiga, lanjut Ijzerman, adalah dengan menggunakan jalur sepanjang sungai Batanghari lalu ke Jambi. Nama Jambi sendiri pertama kali muncul dari catatan van Hasselt dalam ekspedisi Sumatra Tengah tahun 1877. Dalam catatannya, van Hasselt banyak menemukan harta karun tidak ternilai dari pedalaman Sumatra yang dapat diangkut melalui jalur sungai ke pantai timur melalui Jambi. Namun Cluijsenaer membantah setahun kemudian dengan menunjukkan bukti bahwa Jambi sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibangun semacam terminal batu bara di tepi sungai.

Ijzerman menjelaskan alasan-alasan logis dan teknis terkait pembukaan rute batu bara dari tambang Ombilin menuju pantai timur Sumatra. Berikut dengan hitung-hitungan keuntungan yang akan diterima pihak Belanda jika perdagangan batu bara terlaksana. Dan tak lupa, perhitungan politik lokal dengan kerajaan atau penduduk setempat yang dilalui rute perdagangan itu.

Distrik Kuantan, kata Ijzerman ditutupi hutan belantara yang lebat dan tidak mungkin untuk menarik batas-batas yang pasti. Di utara, ada wilayah Lubuk Ambacang dan beberapa wilayah yang terdiri dari Sumpur, Sungai Kandiek, Sarasak (Sarosah), Gunung Balai dan Rambahan. Ke arah timur terdapat Logie (Logas), Rantau Singingi, dan terakhir Tanah Darat, dan Logei Pangean (Logas Tanah Darat). Wilayah-wilayah penting ini memiliki hubungan kekerabatan dan terhubung dengan wilayah Kampar Kiri.

Sementara di selatan, Distrik Kuantan berbatasan dengan Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Lubuk Ramo dan Indragiri. Lubuk Ramo sendiri memisahkan Distrik Kuantan dengan Distrik Batanghari dan berada di bawah pengaruh Indragiri.

Selanjutnya, Belanda melakukan kajian mendalam terkait dengan rute-rute yang ditawarkan. Beberapa rute yang lebih detil menurut Ijzerman adalah, pertama melalui Poru di Sungai Betung, Tanjung Kaling dan Bukit Langan ke Lubuk Ambacang dan Cengar (sekarang Cengar). Selanjutnya, dari Tanjung Lolo melewati Air Amo ke Bukit Lagan. Dari Sungai Langsung melewati Kamang ke Cengar yang curam dan sulit di beberapa tempat. Karenanya, tawaran rute lain adalah dari Padang Tarab menuju Pangkalan Indarung, dari Lubuk Ambacang melewati Sumpur ke Pangkalan Indarung, dari Koto Tuo Sarasak menuju Logei dan Tambang Tujuh ke Muara Lembu.

Jalan setapak menuju ke Tanah Darat dari Taluk, Sintadjo dan Simandolak melewati Taratak Air Hitam ke Pangkalan Baringin di Tesso. Dilanjutkan pula dengan jalan dari Pangean melewati Logei Pangean sampai Pangkalan Baringin menuju Segati dan Nilo. Penting pula jalan mulai dari Cerenti dan Inuman ke Rantau Jambu. Sebagian jalan penghubung perlu pula dibuat di wilayah Batanghari, yang utama mulai dari Cengar melewati Lubuk Ramo ke Timpeh.

**

Kendati Ijzerman menyampaikan tentang rute yang akan dibuat Belanda untuk perdagangan batu bara di pantai timur Sumatra, sejatinya hal itu menguak kisah lama tentang Distrik Kuantan yang berbatasan dengan Padang (termasuk wilayah-wilayah yang berdekatan seperti Sijunjung, Siguntur dan lainnya), Distrik Batanghari dan Distrik Indragiri. Apa yang disampaikan Ijzerman penting untuk kembali mengenal masa lampau Kuantan sebagai sebuah daerah penting dalam perdagangan kaum penjajah.

Bahkan, Ijzerman juga menyampaikan tentang bagaimana tabiat para petinggi adat di beberapa wilayah di Distrik Kuantan yang meminta agar wilayahnya berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Ini mungkin tidak lagi mengejutkan karena sejarah Indonesia sejatinya juga menyimpan banyak sekali misteri “perselingkuhan kekuasaan” antara para pemimpin adat dengan pemerintahan kolonial.

Kepandaian Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam merangkul pemimpin adat atau pemimpin lokal mestinya jadi pembelajaran penting bagi generasi Indonesia di masa depan. Mungkin dengan tujuan berbeda, jika pemerintahan kolonial merangkul mereka untuk kepentingan kekuasaan, maka anak negeri hari ini harus mampu merangkul mereka untuk tujuan kemaslahatan bersama.

Sebelum catatan Ijzerman dipublikasikan, Ketua Lembaga Ilmu Bumi Kerajaan Belanda (*Koninklijk Nederlands Aardrijskundige Genootschap/KNAG*), P.J Veth (1884) dalam pengantar buku *Midden-Sumatra, Reizen En Onderzoekingen Der Sumatra Expeditie 1877-1879* mengungkap, dia dan timnya melakukan perjalanan ekspedisi ke berbagai wilayah di pedalaman Sumatra sampai Sumatra bagian timur di Jambi dan Sumatra Selatan.

Ekspedisi ini sendiri dipimpin oleh Johannes Schouw Santvoort.

Di dalam tim ekspedisi bergabung pula Johannes Francois Snelleman (seorang ahli zoologi) dan Arend Ludolf van Hasselt. Sebagai pemimpin kedua, van Hasselt bertanggung jawab melakukan eksplorasi di dataran tinggi. Sementara Santvoort sendiri memimpin eksplorasi di daerah perairan sungai. Anak dari Pieter Johannes Veth, Daniel David Veth, bergabung dalam tim ekspedisi sebagai ahli geografi dan geologi sekaligus fotografer.

Dalam pengantarnya di bagian jenis-jenis kayu, Van Hasselt menulis, betapa besar (hasil) panen yang didapat manusia, bahkan hasil bisa didapat tanpa menabur benih sekalipun. Hutan yang luas telah menjadi harta karun yang berharga. Ini seharusnya tidak menjadikan manusia berlaku sembrono.

Dalam perjalanannya, van Hasselt mencatat setidaknya 374 jenis tanaman kayu, berikut dengan ciri dan kegunaannya. Daftar jenis ini banyak bertambah seiring riset lanjutan di era modern. Tapi setidaknya, van Hasselt telah memberikan rujukan dasar yang cukup kuat untuk itu. Ratusan spesimen jenis kayu, bunga dan lainnya dikirim van Hasselt secara berkala ke negerinya, Belanda.

Catatan kecil yang penting dalam penjelajahan van Hasselt adalah, dia tidak menemukan banyak jenis bambu yang dimanfaatkan orang Melayu di daratan. Ada yang memakan tunasnya, ada pula yang menjadikannya sebagai bahan dasar membuat tempat tinggal. Bahkan ada jenis bambu yang digunakan untuk mengantar orang mati ke kuburnya. Di dalam daftarnya, van Hasselt hanya menulis tentang 13 jenis bambu. Di sisi lain, justru rotan-rotan banyak teridentifikasi. Setidaknya ada 44 jenis rotan-rotan.

Salah satu peninggalan van Hasselt yang cukup fenomenal adalah *Rafflesia hasseltii suringar* atau Rafflesia Merah Putih, atau banyak pula dikenal dengan nama Cendawan Muka Rimau. Ada pula yang menyebutnya Cendawan Matahari.

Bunga ini mulanya ditemukan oleh Willem Frederik Reinier Suringar. Namun spesimen awal Suringar belumlah lengkap, kata Veth. Di antara Alahan Panjang dan Muara Air (di Sumatra Barat), van Hasselt menemukan spesies ini dan mengumpulkan semua spesimen yang tersedia. Bunga ini merupakan jenis lain dari jenis bunga besar yang ada di Sumatra. Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Kerinci Seblat setidaknya masih menyimpan spesimen alam untuk jenis ini.

Dalam konteks ini, belum ada laporan mengenai keberadaan bunga ini di daerah-daerah sekitar Kuantan-Singingi.

P.J Veth menyebut pula daftar minyak yang jamak digunakan orang Sumatra. Di antara minyak-minyak tersebut dia telah mengumpulkan 4 spesimen yang secara keseluruhan dihasilkan oleh tanaman yang ada di hutan Sumatra.

Minyak Kadam, kata Veth, dihasilkan dari buah bewarna abu-abu kekuningan. Minyak ini berbentuk mentega bewarna kuning yang tidak mengering, bahkan hampir tidak berbau. Ada pula minyak *Simauoeng* (Mimaung). Ini adalah minyak kental bewarna cokelat cerah atau kehijauan dalam cahaya yang mencolok. Minyak ini tidak mengering dan hampir tidak berbau.

Minyak Singkawang, lanjut Veth, merupakan minyak lemak yang keras dengan warna yang tidak merata. Tapi secara keseluruhan warnanya tampak seperti abu-abu. Dari catatan Miquel menyebut, minyak ini kemungkinan berasal dari *Shorea nitens* dan *Hopea singkawang*. Kedua jenis ini termasuk dalam jenis dipterokarpa yang umum tumbuh di pantai barat Sumatra. Terakhir, Minyak *Paladjan*, merupakan minyak kental dengan corak cokelat tua dan keruh. Minyak ini tidak mengering dan sedikit aromatik. Minyak ini larut dalam alkohol dan eter, serta berkemungkinan berasal dari jenis pohon *Stylocoryna*.

Kini, siapa yang mengenal keempat jenis minyak ini?

Kisah perjalanan Ekspedisi Sumatra Tengah ini menarik. Bahkan dalam catatan kedua, Veth mengabarkan mengenai kematian Santvoort di Pantai Timur Sumatra. Sementara van Hasselt masih berada di dataran tinggi dekat Muara Labuh dan Kerinci, atau daerah sekitar Padang, mereka berkabar melalui surat-surat yang juga ditujukan kepada Gubernur Pantai Barat Sumatra, Netscher. Beragam alasan akhirnya memaksa tim ekspedisi ini bergerak ke sisi timur pulau.

Perjalanan ekspedisi yang berat turut melibatkan proses persetujuan dukungan pendanaan dari Amsterdam. Ini berat, tapi tim ekspedisi beruntung karena mereka terus-menerus memberikan laporan yang dimuat majalah di Belanda. Kisah ekspedisi ini membuat banyak pihak di Belanda merasa terbantu dalam menyelami apa yang terkandung di Sumatra. Karenanya, KNAG berupaya untuk selalu mendapat dukungan pembiayaan.

Pada Februari 1878, kisah Veth, terjadi perjalanan yang luar biasa dari keseluruhan misi ekspedisi. Mereka menyusir Sungai Batanghari, melanjutkan penelusuran Santvoort yang telah meninggal dunia. Tim ini didukung oleh kapal besar Keresidenan Palembang, berlayar hingga ke Jambi. Di hulu Batanghari, dekat dengan ladang batu bara Ombilin, Santvoort telah mengabarkan jika hal ini akan bermanfaat bagi masa depan Sungai Batanghari sebagai jalur perdagangan. Hal ini tentunya sekaligus akan memperkuat kekuatan Belanda di sepanjang sungai tersebut.

Namun perjalanan itu sendiri tak luput dari masalah. Kerajaan Siguntur (sekarang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat) tidak terlalu senang dengan perjalanan tersebut. Di Siguntur, tidak ada yang berani memberikan jasa pada tim ekspedisi. Akibatnya, tidak ada yang berani melewati sungai di sana, pilihannya adalah jalan darat.

Menurut Veth, setiap negeri mempunyai rajanya sendiri. Penduduk tersebar dalam suku-suku. Veth mencatat ada suku Tanjung, Piliang dan Caniago.

Suku-suku tersebut kini dikenal sebagai suku-suku utama orang Minangkabau. Selain suku-suku tersebut, ada pula sub-sub suku yang tersebar di sepanjang dataran tinggi, pantai barat hingga pantai timur Sumatra.

Raja Pulau Punjung adalah Tuanku Sati, kata Veth. Raja ini tidak segan untuk tunduk pada otoritas Belanda. Tapi bagaimana dengan Bagindo Ratu, Raja Siguntur? Atau Tuan Ahmad dari Padang? Keduanya tidak serta-merta dapat tunduk pada Belanda.

Menurut Jpang (2015) pada 1575, kerajaan Siguntur sudah menganut Islam dengan raja pertamanya Abdul Jalil Sutan Syah. Sulthan Abdul Qadir menggantikan beliau pada 1650. Selanjutnya berturut-turut Sulthan Amiruddin (1727-1864) dan Sulthan Ali Akbar (1864-1914).

Sebagai catatan, raja Kerajaan Siguntur bergelar Bagindo Ratu. Sulthan Hendri bergelar Tanku Bagindo Ratu, adalah raja keenam kerajaan Siguntur pada masa Islam sejak tahun 1575. Sulthan Hendri sendiri diangkat menjadi raja pada usianya yang kedelapan pada 1968. Seorang anak yang masih sangat belia kala itu (Jpang, Merekat Puing-Puing Kerajaan Siguntur, 2015).

Kerajaan yang dipimpin Sulthan Hendri sedianya adalah

kerajaan Hindu sejak didirikan oleh Sri Tri Buana Mauliwaradewa. Berturut-turut setelah itu, kerajaan dipimpin oleh Lembu Sora, Paramesywara pada 1300 hingga 1343, Adityawarman atau Kanakamedinindra pada 1343 hingga 1347, Adikerma kemudian bertahta hingga 1397. Lalu digantikan oleh Guci Rajo Angek Garang pada 1397 hingga 1425. Tiang Panjang merupakan raja Hindu terakhir di Siguntur, berkuasa hingga 1560. Pada periode inilah terjadi peralihan dari Hindu ke Islam (Jpang, Merekat Puing-Puing Kerajaan Siguntur, 2015).

Dengan penjelasan itu, wajar ketika Veth menyebut Kerajaan Siguntur dipimpin oleh Bagindo Ratu. Nama tersebut merupakan gelar yang diturunkan dari generasi ke generasi di Kerajaan Siguntur. Gelar yang kini juga digunakan oleh Sulthan Hendri.

Kembali ke Veth, Penduduk hidup dari pertanian dan peternakan, berburu gajah, badak, kuda dan rusa. Mereka juga mengumpulkan lilin dan getah-getahan serta membuat tikar. Kebanyakan sawah tidak berhasil dipanen kala itu karena penduduk belum mengenal sistem irigasi buatan. Mereka kekurangan beras, akibatnya, penduduk banyak yang memakan jagung dan gadung liar atau sejenis umbi yang pedas dan beracun. Gadung hanya dapat dimakan setelah proses perebusan yang cukup lama.

Penjelasan Veth menarik ditelisik. Pada masa itu, ternyata perburuan gajah masih dibenarkan. Masyarakat terbiasa dengan hasil berburu. Hal ini memungkinkan ilmu berburu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Belakangan marak perburuan babi sebagai ajang olah raga atau hiburan bagi banyak penduduk lokal di Sumatra Barat, Jambi dan Riau.

Marsden (1784) menyebut gajah sebagai spesies yang berlimpah di hutan. Dari kebiasaan gajah yang senang berkelompok, mereka kerap melintas wilayah pemukiman dalam jumlah besar. Hal ini merusak perkebunan penduduk dan melenyapkan tanaman. Mereka menyukai pisang dan tebu. Satwa ini tidak ganas, kecuali bila mereka terprovokasi.

Setiap Kamis, lanjut Veth, ada pasar besar di Sungai Langko. Penduduk memperdagangkan emas, kain linen, garam, merica, ikan sungai, damar, pisang, sirih, pinang, gambir dan getah. Ada pula pasar besar di Pulau Punjung.

Penolakan Raja Siguntur untuk melewati wilayahnya membuat Veth lebih lama bertahan di Padang. Bersama salah satu anggota

tertua KNAG, Lie Khong Teek, Veth merapikan bahan-bahan yang telah dikumpulkan sepanjang ekspedisi. Berikut pula mempelajari manuskrip dan benda-benda yang bisa mereka kumpulkan. Maskapai Lions&Co berjasa mengirimkan barang-barang koleksi ekspedisi ini ke Belanda.

Usai itu, Veth berkesempatan berangkat ke Batavia. Lantas melanjutkan perjalanan menyusir pedalaman sungai Musi di Sumatra bagian selatan. Pada delta Sungai Musi, Veth memerhatikan dataran hutan tropis sejauh mata memandang. Berikut pula deretan pohon nipah yang di antaranya tumbuh *rizophora* dan pohon rengas yang keriput. Pada saat mendayung agak ke pedalaman, Veth masih menyaksikan buaya besar yang berjemur dengan mulut terbuka di dataran berlumpur.

Dari kisah-kisah yang disampaikan Veth, van Hasselt dan Ijzerman, jelas bahwa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda benar-benar melakukan kajian mendalam tentang kandungan bumi yang ada di Sumatra bagian tengah hingga ke timur ini. Kuantan adalah salah satu wilayah yang menjadi target operasi karena menjadi bagian penting dalam rute perdagangan.

Distrik Kuantan dulunya adalah bagian dari Kerajaan Minangkabau. Klaim orang Minangkabau menyebut mereka berasal dari daerah tinggi Pariangan (terletak antara Padangpanjang dan Benteng van der Capellen). Hal ini tidak perlu diragukan lagi karena dalam kesehariannya orang Minangkabau disatukan oleh bahasa (dengan ragam dialek), tata krama, dan adat istiadat (Ijzerman, 1895).

Melanjutkan Veth, Ijzerman juga mencatat bahwa orang Melayu di Kuantan terbagi pada suku-suku. Setidaknya setiap wilayah memiliki 4 suku utama. Suku asli terdiri dari Bodi, Caniago, Koto dan Piliang.

Di setiap negeri, lanjut Ijzerman, ditemukan penduduk yang berasal dari suku berbeda. Seiring waktu, jumlahnya semakin meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk. Perkembangan zaman kala itu juga berkonsekuensi pada pertambahan sub suku dari 4 suku utama tersebut. Di Distrik Kuantan, suku-suku terdiri dari Melayu, Caniago, Patopang dan Piliang.

Pada keluarga yang memiliki banyak anggota, dikepalai oleh

Panghulu Buah Paruik atau *Panghulu Andiko*. Gelar panghulu ini diturunkan dari paman ke kemenakan dari garis keturunan perempuan. Catatan tentang Distrik Kuantan disusun oleh Controller Sijunjung bernama B. G. van Hoevell tahun 1875. Selanjutnya catatan-catatan diresume oleh inspektur Twiss dan Schwartz (Ijzerman, 1895).

Dari setiap suku, lanjutnya, salah satu panghulu adalah bagian dari administrasi negeri. Dewan Negeri biasanya lebih dari empat orang yang mewakili tiap suku. Salah satu panghulu diangkat menjadi pemimpin dewan bergelar *Datuk Pucuk*. Dalam mengurus kepentingan sukunya sendiri, setiap panghulu, yang merupakan anggota Dewan Negeri, dibantu oleh Panghulu Andiko lainnya. Dan masing-masing Penghulu dilengkapi dengan seorang *Manti*, *Malin* dan *Dubalang*.

Manti menjalankan fungsi sebagai penegak hukum. Dia menyelidiki berbagai urusan pelanggaran (yang berkaitan dengan adat), kemudian menyerahkan kasusnya untuk diputuskan oleh Panghulu. Sementara *Malin* merupakan penasihat dalam hal yang bersifat keagamaan. Sedangkan *Dubalang* bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan pengeksekusi perintah Panghulu. Para pengurus suku ini menganut ketentuan: Panghulu adalah jiwa, *Malin* adalah obor, *Manti* dan *Dubalang* adalah tulang punggung negeri.

Ijzerman melanjutkan, di setiap negeri terdapat Imam dan Khatib. Dalam hal ini disebut alim ulama. Mereka adalah penjaga tiang kokoh agama. Disamping itu, ada pula *Cadiak* (cerdik) Pandai yang bertindak sebagai penasihat dan duduk di dalam Dewan Panghulu. Kecuali itu, masyarakat kebanyakan disebut *Kamanakan* di bawah *lutuik* (lutut).

Sebagai catatan, *Kamanakan* adalah anak-anak dari saudara perempuan pada garis keturunan ibu.

Gelar diturunkan kepada *Kamanakan*. Lubuk Ambacang dipimpin Panghulu bergelar *Datuk Paduka Raja*, Lubuk Jambi dipimpin *Datuk Habib*, Taluk dipimpin *Datuk Majo Besei* (Besar), Inuman dipimpin *Datuk Sekaro* dan Cerenti dipimpin *Danau Putro*. Kelima orang ini menyandang gelar *Orang Gadang Nan Berlima*.

Setiap aliansi ini merupakan persatuan republik kecil dengan aristokrasi kepemimpinan turun temurun. Kepengurusan negeri seperti seorang raja yang sangat terbatas, karena keputusan

dibuat menurut adat dengan suara bulat yang utuh. Musyawarah atau mufakat juga melibatkan Cerdik Pandai.

Kecuali itu, Ijzerman juga mencatat proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh masyarakat Kuantan. Untuk kasus pembunuhan, misalnya, ditetapkan hukuman hingga membayar denda sebesar 480 gulden. Sementara hukum juga berlaku untuk kasus-kasus pencurian, perzinaan dan lainnya.

Tempat-tempat penting dan berpengaruh menurut Ijzerman adalah Lubuk Jambi dan Taluk, Baserah, Inuman, Cerenti, Pangean, Simandolak, Sintadjo, Kepah, Benai, Lubuk Salak, Kari, Gunung Toar dan Taluk Baringin.

Di Kuantan, lanjutnya, adat dan *kamanakan* adalah pondasi kelembagaan sosial. Juga berkaitan dengan hak tanah yang telah terbangun seperti sawah, ladang, kebun, area pemukiman dan lainnya, diatur dalam satu kesatuan kepemilikan berdasarkan kesukuan atau keluarga. Selain penggarap pertama, tanah diperoleh melalui hukum waris, gadai dan hibah. Sementara lahan yang tidak digarap atau dikelola biasanya menjadi milik negeri. Setiap penduduk boleh menebang kayu, berburu dan memungut hasil hutan.

Pertanian adalah mata pencaharian utama, terutama penanaman padi dengan cara yang sangat primitif. Namun tanah yang subur memberikan efek panen yang baik dan menyediakan bahan makanan pokok. Selanjutnya ada pula tembakau, kopi, tebu, gambir, nila (pewarna biru alami), kapuk, jagung, ubi, dan buah-buahan lainnya. Bahkan kopi digunakan sampai daunnya untuk diseduh. Terdapat pula ternak sapi dan kerbau. Di Kuantan, sapi lebih banyak dari pada kerbau, sebaliknya di Batanghari.

Berdagang, lanjut Ijzerman adalah mata pencaharian berikutnya. Ada pula penduduk yang mengumpulkan hasil hutan, memelihara ternak, pengerjaan logam dan menenun pakaian.

Hasil hutan utama yang dapat disebutkan di antaranya getah, lilin, rotan, kayu gaharu, tanah kawi (tanah merah). Khusus di Lubuk Jambi dan Batang Pranap, banyak penduduk yang mengelola sagu rotan yang diperdagangkan di Rengat dan Singapura.

Sebagian besar penduduk Kuantan adalah *Mohammedan* (penganut Islam) yang fanatik. Kendati pendapatan dari hasil zakat tidak terlalu besar, tapi setiap tahun sejumlah orang pergi

ke Mekah untuk ibadah haji.

Menurut Kontroler Twiss, kata Ijzerman, para wanita Taluk adalah pemberani. Jika ada yang mati dicabik harimau di dalam hutan, para lelakinya ketakutan dan pergi menjauh, sementara wanita melawan binatang itu dan mengambil mayat yang terbunuh.

Demikianlah, Ijzerman telah berjasa mencatat masa lalu Kuantan yang misterius. Namun setidaknya, catatan Ijzerman telah menguak keadaan Distrik Kuantan, bersisian dengan rute Ekspedisi Sumatra bagian Tengah yang sebelumnya dimotori Veth.

Proposal pembangunan jalur kereta api akhirnya harus menyerah pada usulan Veth. Veth menyarankan agar rute pengangkutan batu bara dilakukan melalui rute dari Sawahlunto menuju *Emmahaven* (Teluk Bayur). Belanda lantas menjalankan 3 proyek besar, yaitu membangun sentra operasi penambangan batu bara di Sawahlunto, pembangunan rute kereta api Sawahlunto-Teluk Bayur dan pembangunan pelabuhan Teluk Bayur.

BAGIAN 2

VISTA BUKIT BATABUH



Catatan Ijzerman sejatinya menyebut wilayah-wilayah yang kini masih dikenal luas. Rute rel kereta api yang dia sebutkan sesungguhnya berada di sisi Hutan Negara yang kini dikenal dengan Hutan Lindung Bukit Batabuh. Sebagian lagi hutan yang tersisa adalah Hutan Lindung Sentajo. Sementara sebagian besar rute yang dia sebutkan sudah menjadi pemukiman dan perladangan, lahan perkebunan sawit, hutan tanaman industri bahkan taman nasional. Kini sejarah juga mencatat keberadaan Taman Nasional Tesso Nilo.

Di utara, kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling menanti Bukit Batabuh dengan malu-malu. Kawasan Rimbang Baling kini dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Sebagian kawasan ini merupakan rute perjalanan utusan Belanda, Thomas Dias tahun 1684.

Sebagian wilayah penjelajahan Dias kini berada di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Menurut Jpang (2018), Dias melewati sungai Subayang yang bersisian dengan Batang Bio saat menempuh jalan pulang. Dias telah menempuh perjalanan dalam hutan dari pegunungan dimana kerajaan Pagaruyung berada hingga melewati wilayah Mandiangin, Pangkalanserai, Gajahbertalut, dan terus ke pesisir timur di Selat Malaka. Catatan perjalanan Dias diulas Timothy P. Barnard tahun 2013. Ulasan Timothy mengungkap bagaimana VOC, Kongsi Dagang Belanda di Hindia Timur, sudah menguasai Malaka pada 1641. Wilayah ini adalah pelabuhan kunci yang mengantarkan Belanda pada wilayah pedalaman di Sumatra, menyusul penemuan ladang-ladang timah di kawasan hulu sungai Siak dan Kampar di tahun 1670-an. Dalam laporan yang diserahkan Dias bulan Juni 1684, Dias menggambarkan kesulitan yang dialaminya sepanjang perjalanan. Selain persoalan bahasa dia juga terkendala medan yang sulit yang kadang diikuti dengan ancaman binatang buas.

“Raja Pagaruyung memberikan dengan tangan beliau sendiri, daun sirih dan 2 biji buah pinang dan beliau juga memberi saya sebuah kotak kecil yang di dalamnya terdapat gambar-gambar tak senonoh,” tulis Dias. Kotak bergambar tak senonoh, ungkap Dias, dikirimkan pada raja oleh seorang panglima yang bermaksud agar raja tidak bertemu dengan dirinya. Dias membawa kembali kotak itu untuk diserahkan pada Gubernur Jenderal VOC di Malaka. Lintasan pengembaraan Dias juga menyebutkan kondisi masyarakat setempat yang masih teguh memegang adat. Dia

juga menggambarkan keadaan rumah-rumah yang terpencil di pedalaman hutan dan pinggir sungai (Jpang, Rimbang Baling Si Perawan Yang Tersisa, 2018).

Sementara di sebelah tenggara, Taman Nasional Bukit Tigapuluh menanti Bukit Batabuh dengan senyum ceria. Kerap dikabarkan bahwa Bukit Batabuh adalah jalur koridor satwa dari Rimbang Baling menuju Bukit Tigapuluh. Kendatipun belum didapatkan data berapa banyak satwa yang melintasi Bukit Batabuh untuk menuju Bukit Tigapuluh. Namun dilihat dari udara, kawasan Bukit Batabuh memang masih menyediakan tutupan hutan yang rapat berwarna hijau yang menjadi penghubung kedua kawasan konservasi tersebut.

Taman Nasional Bukit Tigapuluh sendiri bermarkas di Pematang Reba, Indragiri Hulu. Tak berapa jauh dari kota Rengat. Rengat sendiri merupakan salah satu kota terdekat dengan Kuantan seperti yang digambarkan Ijzerman. Antara Taluk Kuantan dengan Rengat sendiri telah terhubung dengan jalan raya yang kondisinya agak sedikit buruk, melewati Pranap.

Di timur laut Bukit Batabuh, Taman Nasional Tesso Nilo menyendiri penuh keraguan. Taman Nasional Tesso Nilo sejatinya merupakan bakas-bekas lahan Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang telah ditinggalkan pemegang izin, namun masih memiliki cukup tegakan hutan sebagai habitat satwa. Harimau Sumatra kerap berkeliaran di wilayah ini. Namun sayang, antara Bukit Batabuh dengan dataran Tesso Nilo hanya dihubungkan oleh perkebunan sawit, kawasan hutan tanaman industri dan pemukiman. Kendati Ijzerman menyebut wilayah-wilayah yang saling berhubungan, tapi tak banyak interaksi ekologis antara kedua kawasan hutan ini. Keduanya bahkan hanya dihubungkan dengan jalan darat yang sebagian telah rusak.

Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Batabuh mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Sebelum reformasi, pengelolaan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Riau. Untuk selanjutnya berkembang dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan di masa Presiden Gus Dur.

Di era reformasi, juga terjadi beberapa kali perubahan seiring dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak era Presiden Joko Widodo, pengelolaannya berada dalam lingkup kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Iswahyudi (2017) menyebut kawasan Hutan Bukit Batabuh ditetapkan sebagai Hutan Lindung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 254/1984 dengan luasan 25 ribu hektare. Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh dikategorikan sebagai Kawasan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau pada tahun 1994 dengan Perda Nomor 10/1994 tentang RTRWP Provinsi Riau seluas 48 ribu hektare.

Sementara Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (2012) memasukkan Hutan Lindung Bukit Batabuh masuk di dalam rencana pengembangan Kawasan Strategis Nasional Provinsi Sumatra Barat, sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat No 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatra Barat tahun 2012-2032.

Ini tampak seperti ambigu. Satu sisi, Bukit Batabuh ada di dalam RTRW Riau, sementara di sisi lain ada pula dalam kebijakan Perdaprov Sumbar. Namun situasi ini tentulah perlu disadari karena Bukit Batabuh memang berada di antara dua provinsi itu. Dan tentunya butuh waktu untuk mengurai dan meluruskan sengkaret ini.

Sejatinya sampai tahun 2017, Hutan Lindung Bukit Batabuh berada dalam perwalian Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Kuantan Singingi Selatan.

Wilayah KPHL Kuantan Singingi Selatan diawali dari adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 173 /Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau. Kemudian pada tahun 2007 keluar Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan Surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.632/VII-WP3H/2010 tanggal 15 September 2010 tentang Arahan Pencadangan KPHL dan KPHP Provinsi Riau, bahwa terdapat 30 KPHP dan 2 KPHL di Provinsi Riau yang salah satunya adalah KPHL Kuantan Singingi Selatan (KPHL Kuansing Selatan, 2015).

Berdasarkan RPHJP KPHL Kuansing Selatan (2017), dengan dasar SK Menteri Kehutanan, PP dan Surat Dirjen Planologi Kehutanan yang telah disebutkan di atas, maka Bupati Kuantan Singingi mengusulkan penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung (KPHL) di Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas± 85.064,08 ha, melalui surat Nomor 522/um/06 tanggal 02 Januari 2014. Selanjutnya Bupati Kuantan Singingi melakukan pembentukan organisasi KPHL Kuantan Singingi Selatan melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2014.

RPHJP KPHL Kuansing Selatan (2017) juga menyebut kondisi terkait kawasan hutan KPHL Kuantan Singingi Selatan: Paduserasi TGHK dengan RTRW Propinsi Riau saat ini masih dalam proses; Maraknya okupasi dan perambahan kawasan hutan; Penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya masih terjadi; Penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup masih relatif rendah; Akses masyarakat terhadap informasi terbuka lebar; Tuntutan kebutuhan lahan oleh masyarakat yang semakin tinggi; Kebutuhan lahan untuk pembangunan di luar bidang kehutanan yang semakin meningkat seiring dengan era otonomi daerah; Tingkat pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang relatif masih rendah; Kebutuhan akan PAD (Pendapatan Asli Daerah) menuntut kepentingan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang; Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal relatif masih rendah.

Kondisi-kondisi di atas dapat berakibat pada keterlambatan pencapaian tujuan pembangunan kehutanan yang diamanatkan dalam UU maupun PP. Sebagai sebuah institusi pengelola di tingkat tapak, sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 pasal 9 mengenai fungsi dan tugas dari organisasi KPH, dimana salah satunya yaitu menyelenggarakan pengelolaan hutan berupa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, maka KPHL Kuantan Singingi Selatan harus mempunyai rencana pengelolaan yang merupakan roh penggerak seluruh kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan dari pengelolaan hutan yang telah ditetapkan. Rencana pengelolaan yang terdiri dari rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek tersebut memuat setidaknya tujuan, strategi, kegiatan serta target kelayakan pengembangan pengelolaan hutan. Sudah tentu dalam penyusunan rencana pengelolaannya, KPH harus mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), dalam hal ini RKTN 2011-2030, maupun kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014 (KPHL Kuansing Selatan, 2015).

Pada 2017, secara struktur KPHL Kuansing Selatan diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH Singingi. Hal ini didasari pada Peraturan Gubernur Riau nomor 52 tahun 2017 dan nomor 76 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Di Provinsi Riau, UPT KPH Singingi setara dengan UPT KPH lainnya, yakni: UPT KPH Model Minas Tahura,

UPT KPH Model Tasik Besar Serkap, UPT KPH Bagansiapiapi, UPT KPH Bengkalis Pulau, UPT KPH Mandau, UPT KPH Rokan, UPT KPH Suligi Batu Gajah, UPT KPH Kampar Kiri, UPT KPH Sorek, UPT KPH Tebing Tinggi, UPT KPH Mandah, dan UPT KPH Indragiri.

Lepas dari organisasi pengelola, harus diakui bahwa Hutan Lindung Bukit Batabuh sangat kaya akan keragaman hayati, berikut dengan fungsi ekosistemnya. Karena itu pada 2012, kawasan ini ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui Perpres No. 13 tahun 2012 tentang Penetapan Hutan Lindung Bukit Batabuh sebagai Salah Satu KSN dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra.

Senada dengan itu, Yayasan Hutanriau (2021) menyebut, Hutan Lindung Bukit Batabuh merupakan habitat beberapa hewan dilindungi, antara lain: harimau Sumatra (sering dijumpai jejak), rusa sambar, kijang, burung kua raja, gajah (sekali setahun masih dijumpai melintas), beruang, harimau dahan, landak dan kucing hutan. Selain satwa, ada pula potensi kayu bernilai tinggi, seperti: bulian, kulim, benio, mersawa, gaharu, semina, dan tembusu. Ada pula potensi buah-buahan, seperti: petai, buah mengkopo (kembang semangkuk), salak, cempedak dan berbagai jenis buah hutan lokal lainnya. Terdapat pula potensi rotan, seperti: jernang (*dragon blood*), manau, rotan getah, sikai, tebu-tebu dan lain-lain. Dijumpai pula berbagai jenis anggrek dan cendawan termasuk jenis cendawan susu harimau yang digunakan sebagai bahan obat-obatan.

Kecuali itu, pembalakan liar memang belum dapat sepenuhnya dikontrol. Posisi Bukit Batabuh yang berada pada perbatasan dua provinsi membuat wilayah ini sedikit jauh dari pantauan. Menurut warga, para pembalak umumnya berasal dari wilayah Sumatra Barat. Salah seorang warga menyebut nama daerah Timpeh sebagai salah satu lokasi asal para pembalak liar.

Para pembalak liar telah merambah sekitar 2 kilometer dari tapal batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadikan

kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat yang telah sejak lama menganggap wilayah tersebut harus dijaga.

Namun, lagi, warga tidak bisa berbuat banyak. Para pembalak merupakan orang-orang yang masih berada dalam batas-batas keluarga. Secara umum, masyarakat yang hidup di barat daya punggung Bukit Batabuh adalah keturunan asal dari sebagian besar penduduk yang kini menetap di timur laut punggung Bukit Batabuh. Di barat daya adalah wilayah Sumatra Barat, sementara di timur laut adalah wilayah Riau. Laporan Ijzerman sesungguhnya memberikan indikasi awal bagaimana pola migrasi dan hubungan antara keluarga-keluarga yang berada di sisi barat daya ini dengan penduduk yang berada di sisi timur laut lanskap Bukit Batabuh.

Selain pembalakan liar, ada pula faktor keterbatasan ruang yang turut mengancam lanskap Bukit Batabuh. Penduduk membutuhkan ruang untuk berbagai macam kegiatan ekonomi. Hal ini kemudian dipicu pula oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Pada akhirnya, penduduk di sekitar Bukit Batabuh tidak punya pilihan lain selain menggarap kawasan hutan terdekat.

Tekanan serta ancaman terhadap Hutan Lindung Bukit Batabuh ini terjadi dalam berbagai bentuk serta intensitas. Muaranya, kini lahan yang dikategorikan kritis semakin luas.

Iswahyudi (2017) menyebut faktor-faktor pendorong dan penyebab terjadinya lahan kritis di lanskap Bukit Batabuh di antaranya: *Pembukaan lahan hutan untuk keperluan perkebunan*. Dalam tataran lanskap, saat ini seluruh areal di sekeliling Hutan Lindung Bukit Batabuh praktis telah berkembang menjadi lahan perkebunan sawit dan karet. Selain perkebunan milik masyarakat, tercatat sejumlah perkebunan besar yang mengembangkan komoditi karet ataupun sawit. Konversi hutan terjadi baik dalam skala subsistem (kecil dan tradisional) maupun dalam skala komersial (luas dan intensif).

Petani penggarap yang membuka lahan di dalam Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh tidak hanya berasal dari masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Letak hutan lindung yang langsung berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat menyebabkan adanya pembukaan Kawasan Hutan Lindung menjadi perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dari Sumatra Barat.

Selanjutnya, *pembukaan lahan untuk pengembangan pemukiman*.

Konversi hutan untuk pembukaan lahan pertanian dan perkebunan penduduk, baik dalam skala subsisten maupun dalam skala komersial. Secara umum, masyarakat disekitar Hutan Lindung Bukit Batabuh memiliki kelaziman mengusahakan lahan untuk kebun karet atau kebun kelapa sawit.

Lantas, penebangan liar. Penebangan liar merupakan salah satu pendorong timbulnya lahan kritis. Aktivitas tersebut didorong berbagai faktor termasuk kebutuhan kayu dan kesenjangan pengelolaan di tingkat tapak. Secara umum, penebangan liar terjadi di banyak tempat dan telah menjadi permasalahan nasional yang menyebabkan kerusakan dan turunnya nilai hutan. Selain di hutan lindung, penebangan liar juga terjadi di kawasan hutan produksi, bahkan di hutan konservasi, baik Kawasan Suaka Alam (KSA) maupun Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Belum efektifnya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang seharusnya dilakukan untuk memastikan berlangsungnya aturan main pengelolaan hutan lindung. Namun demikian, kondisi lapangan menunjukkan penegakan hukum belum bisa berjalan secara efektif mengingat adanya sejumlah kendala seperti kesiapan personil, ketersediaan alternatif sumber perekonomian masyarakat, ketidaksepahaman persepsi mengenai fungsi hutan lindung, ketegasan batas, dan lain sebagainya.

Kesenjangan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak. Pengelolaan hutan lindung secara efektif dan produktif mempersyaratkan adanya institusi yang secara operasional bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak. Saat ini, Hutan Lindung Bukit Batabuh terkesan tidak terjaga dan terkelola karena belum ada lembaga di tingkat tapak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional pengelolaan kawasan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan lestari, perlindungan, dan lain sebagainya (Iswahyudi, 2017).

Sebagai catatan, tesis Iswahyudi tahun 2017 ini sesungguhnya sudah mulai dijawab melalui keberadaan KPH. Di level tapak, KPH menjadi ujung tombak pengelola kawasan, berikut dengan perencanaan, pemanfaatan lestari, perlindungan dan lain sebagainya.

Terakhir, lanjut Iswahyudi, *Kesepahaman para pihak mengenai fungsi hutan lindung.* Faktor lainnya yang turut mendorong

terbentuknya lahan kritis adalah belum terbentuknya kesepahaman yang permanen di antara para pihak, terkait dengan fungsi dan peranan hutan lindung. Ketidakepahaman ini dapat dilihat dari indikasi tidak terpeliharanya batas hutan antara Hutan Lindung dengan lahan masyarakat di sekitar Hutan Lindung Bukit Batabuh. Proses dialog dan pembentukan kesepahaman diperlukan untuk mewujudkan terlembaganya kawasan hutan secara permanen.

Tekanan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk dan intensitas, yang pada akhirnya mengancam keutuhan kawasan hutan akibat bertambahnya luas lahan yang termasuk kategori kritis. Iswahyudi (2017), menyatakan bahwa tingkat kekritisian lahan “agak kritis” mendominasi tingkat kekritisian Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh secara keseluruhan, yakni seluas $\pm 17.511,666$ ha (39,042%) dari luas total kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan faktor dominan yang mendorong laju kerusakan Hutan Lindung Bukit Batabuh adalah tekanan penduduk dalam bentuk konversi Hutan Lindung dan pemanfaatan lahan Hutan Lindung untuk menyangga sumber mata-pencaharian penduduk, pengembangan wilayah pemukiman penduduk, serta penguasaan/pemilikan lahan sebagai aset produksi keluarga (Kurnia, dkk, 2020).

BAGIAN 3

LANSKAP SENTAJO



Baiklah, ini adalah sedikit gambaran tentang Hutan Lindung Sentajo. Dokumen RPHJP KPHL Kuansing Selatan Provinsi Riau tahun 2016 – 2025 menyebut Hutan Lindung Bukit Batabuh Lubuk Jambi luasnya 43.541,49 hektare, sementara Hutan Lindung Sentajo hanyalah seluas 359,59 hektare. Di atas peta, Hutan Lindung Sentajo adalah dua titik kecil yang menghias pojok terluar Hutan Lindung Bukit Batabuh Lubuk Jambi. Dulu, ketika masih dikelola KPHP Kuansing Selatan, Hutan Lindung Sentajo masuk pada Blok Khusus.

Pemilihan Hutan Lindung Sentajo sebagai Blok Khusus dengan pertimbangan bahwa dalam kawasan hutan tersebut terdapat berbagai macam jenis flora dan fauna, dan masih terdapat tutupan hutan primer walaupun dekat dengan pemukiman masyarakat dengan potensi hutan yang cukup besar. Lokasi tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai kawasan hutan pendidikan (KPHL Kuansing Selatan, 2015).

Walaupun lembaga pengelola kini sudah berganti nama, dari KPHL Kuansing Selatan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH Singingi, agaknya Hutan Lindung Sentajo masih berada pada status yang sama. Sebagai informasi, menurut Kepala UPT KPH Singingi, Abriman (2021), Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPH Singingi hingga saat ini masih dalam proses penyusunan. Jikapun nanti ada perubahan, berkemungkinan perubahan yang tidak terlalu signifikan.

Saam (2016) mengungkapkan, Hutan Lindung Sentajo memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, termasuk di dalamnya jenis buah-buahan. Bagi masyarakat Sentajo, jenis buah-buahan ini mereka sebut sebagai buah *rimbo*. Jenis buah-buahan tersebut antara lain; cempedak hutan, rambai, tampui, *garuntang*, barangan, *kuduang tunjuak* (sejenis rambutan), durian, *jontiak-jontiak*, *ribu-ribu*, *palo puyuah*, *karanji*, buah *samak*, buah rotan dan *mempelam*. Masyarakat diperbolehkan mengambil segala jenis buah-buahan tersebut selama hanya untuk konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual dan tidak menebang pohonnya.

Jenis-jenis rotan dan akar juga tumbuh di dalam Kawasan *Rimbo* Larangan ini dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Salah satu jenis akar yang dimanfaatkan masyarakat adalah akar yang memiliki kantong dan disebut *boruak-boruak* (Kantong Semar) karena bentuknya seperti perut beruk. Akar ini dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan *lopek* (makanan yang dibuat dengan tepung beras dan pisang).

Jenis rotan ataupun akar lain dimanfaatkan masyarakat sebagai alat-alat rumah tangga, alat tangkap ikan atau sebagai bahan pengikat (Saam, 2016).

Binatang yang hidup di dalam Hutan Lindung Sentajo, seperti harimau, babi, rusa, kijang, kancil, *napua* (napu atau sejenis kancil kecil), beruang, siamang, monyet, ular, landak, musang, kukang. Sedangkan gajah sudah tidak ada lagi di dalam Kawasan hutan ini (Saam, 2016).

Pernyataan Saam mungkin keliru dengan menyebut keberadaan harimau dan gajah. Dengan luasan yang hanya 359,59 hektare, Hutan Lindung Sentajo tentunya tak mungkin menampung keberadaan harimau dan gajah. Namun hal ini bisa jadi benar karena ada kemungkinan harimau atau gajah hanya berjalan melintasi hutan tersebut. Dalam observasi dan wawancara lapangan dengan masyarakat di Sentajo, tidak satupun masyarakat yang menyebut keberadaan harimau atau gajah di dalam Hutan Lindung Sentajo. Jikapun ada, itu hanya di masa lalu.

Menurut Saam, hasil alam bukan kayu dari Hutan Lindung Sentajo juga dimanfaatkan masyarakat untuk meramu obat-obatan herbal. Bahan-bahan ramuan tersebut tersedia di dalam hutan dan hanya dimanfaatkan oleh seorang dukun yang mengerti tentang jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan. Dan sempat ada warga menjumpai bunga *rafflesia* di dalam Kawasan Hutan Lindung Sentajo.

Sebagai catatan, berkemungkinan bunga *rafflesia* yang ditemukan merupakan jenis yang sama dengan yang ditemukan van Hasselt.

Saam melanjutkan, masyarakat juga percaya hal ghaib yang ada di dalam Hutan Lindung Sentajo. Menurut cerita warga, ada salah satu warga yang menjumpai perkampungan di dalam Kawasan Hutan Lindung. Mereka mempercayai bahwa kampung tersebut adalah kampung keramat atau kampung *bunian* karena lengkap dengan rumah-rumah dan tempat bersilat.

"Nyo kalau masalah gaib ko, ndak lo sembarang urang nampak, urang tertentu lo nyo (masalah gaib, tidak semua dapat mengetahui, hanya orang tertentu saja)", ucap salah seorang warga.

Kawasan Hutan Lindung Sentajo Raya ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya – menyangkut tata air dan kesuburan tanah – tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Hal ini pula yang menjadi dasar pemikiran masyarakat menjadikan Hutan Sentajo sebagai hutan yang mereka lindungi dengan sebutan *rimbo larangan*. Berdasarkan pengakuan pemangku adat, Adjisman Datuk Penghulu Bonsu (2021), masyarakat dilarang melakukan aktivitas pengambilan kayu dan berburu di dalam kawasan hutan tersebut. Dia menambahkan, hutan larangan diperlukan untuk menyimpan air untuk mengairi persawahan dan sebagian ladang masyarakat.

Keberadaan Hutan Lindung Sentajo Raya memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan, dimana masyarakat memanfaatkan kawasan ini sebagai hutan pendidikan dan juga sebagai tempat wisata. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan kayu yang terdapat di dalam kawasan Hutan Lindung Sentajo Raya sebagai bahan baku pembuatan *jalur*. Kegiatan pacu *jalur* merupakan salah satu kegiatan adat atau tradisi yang harus dilakukan setiap tahunnya. Selain itu masyarakat juga melakukan penebangan kayu yang ada di dalam kawasan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan rumah dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Erpino, dkk, 2021).

Rimbo Larangan adalah Kawasan hutan yang tidak boleh diganggu oleh masyarakat atau siapa saja. Larangan tersebut dapat berupa; (1) larangan untuk menebang pohon kecuali jika pohon tersebut sudah mati, (2) larangan untuk menebang dan mengambil kayu kecuali untuk keperluan rumah, pondok atau pagar halaman sendiri, (3) larangan mengambil/menebang pohon untuk diperjualbelikan, (4) larangan untuk mengambil kayu besar kecuali untuk kayu *jalur*. *Jalur* adalah perahu besar yang panjangnya lebih kurang 40 meter yang didayung oleh 45 orang dan dilombakan. Lomba dayung ini merupakan seni budaya masyarakat Kuantan Singingi, (5) larangan membakar, (6) larangan untuk berkebun, (7) larangan untuk berladang, (8) larangan untuk menangkap ikan menggunakan *tubo* (racun) pada sungai dan *talago* (telaga), dan (9) larangan mengambil buah-buahan yang belum masak atau belum tua (Saam, 2016).

Adjisman mengatakan, kayu-kayu yang ada di Hutan Lindung Sentajo hanya boleh diambil untuk keperluan *Batino Marando* (wanita janda), masjid, surau (musholla), rumah adat, dan

pengganti rumah yang terbakar. Sedangkan kayu untuk *jalur* sudah tidak ada lagi seiring dengan habisnya pohon-pohon berukuran besar.

Kawasan *Rimbo Larangan* Sentajo dikuasai dan dikelola oleh pemangku adat Kenegerian Sentajo. Saam (2016) mengatakan terdapat 4 golongan suku di dalam Kenegerian Sentajo yaitu Suku Paliang, Suku Caniago, Suku Melayu dan Suku Patopang. Masing-masing suku tersebut dipimpin oleh seorang penghulu yang diberi gelar Datuk. Suku Paliang dipimpin oleh Datuk Penghulu Malin, Suku Caniago dipimpin oleh Datuk Sinaro, Suku Melayu dipimpin oleh Penghulu Bonsu, dan Suku Patopang dipimpin oleh Datuk Penghulu Kayo.

Masyarakat yang melanggar norma adat akan mendapat sanksi adat. Misalnya kawin satu suku tidak diperbolehkan. Jika melanggar maka yang bersangkutan akan diusir dari kampung tersebut. Begitu pula pelanggaran terhadap *rimbo larangan* akan mendapat sanksi, misalnya yang bersangkutan dipanggil dan dikecam, dikata-katai, selanjutnya dinasehati agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan adat. Orang yang dipanggil dan dinasehati oleh penghulu karena melanggar aturan adat, dianggap telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan.

Menurut Adjisman (2021), pelanggaran terhadap aturan adat akan menumbuhkan hutang yang bukan berbentuk hitungan uang, namun berupa sanksi. Sanksi adat yang dikenakan kepada oknum pengambil kayu harus membayar ganti rugi *Limo Gonok Ampek Ganjia* (Lima Genap 4 Ganjil). Ini adalah istilah yang dipakai orang persukuan di Sentajo untuk menerangkan bahan-bahan yang dibutuhkan sebagai pembayaran atas sanksi adat. Lima Genap diartikan sebagai bahan yang lengkap sedangkan 4 Ganjil artinya bahan yang tidak lengkap atau kurang satu, maka itu dikatakan ganjil.

Limo Gonok Ampek Ganjia ini terdiri dari sirih, pinang, tembakau, gambir dan kapur. Lima bahan ini harus disediakan oleh oknum pelanggar beserta satu ekor sapi. Sanksi denda yang sama juga dikenakan kepada orang luar daerah jika melakukan pencurian kayu. Jika perbuatan pencurian tertangkap tangan, maka kayu yang telah ditebang tidak diperbolehkan untuk dibawa (Adjisman, 2021).

Menurut Saam (2016), larangan-larangan yang berlaku berkaitan

erat dengan upaya pelestarian sumber daya alam agar tetap dipelihara, dijaga dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam berbasiskan *rimbo larangan* dapat dirinci sebagai berikut: *pertama*, pelestarian sumber daya alam yaitu pemanfaatan *talago* sebagai sumber daya alam hayati perikanan. *Kedua*, pelestarian sumber daya alam yaitu *talago* sebagai daerah tangkapan air. *Ketiga*, pelestarian sumber daya alam yaitu sungai sebagai sumber daya alam hayati perikanan. *Keempat*, pelestarian sumber daya alam *rimbo larangan* sebagai kawasan yang mengandung keanekaragaman fauna dan flora. *Kelima*, pemanfaatan *talago* sebagai sumber air minum bagi penduduk. *Keenam*, pemanfaatan buah *rimbo* sebagai salah satu sumber makanan masyarakat. *Ketujuh*, pemanfaatan rotan dan akar untuk alat-alat rumah tangga, alat-alat tangkap ikan, atau alat pengikat. *Kedelapan*, pemanfaatan kayu sebagai bahan bakar, pagar rumah, atau untuk pondok yang dipakai sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan. Dan *kesembilan*, pemanfaatan berjenis-jenis jamur untuk makanan yang kaya protein, yang secara ekonomi sudah menghemat pengeluaran rumah tangga.

Namun aturan adat ini semakin memudar setelah *Rimbo Larangan* ini ditetapkan menjadi Hutan Lindung. Hal ini terlihat pada penanganan terhadap pencurian kayu. Aturan adat tidak lagi banyak dipakai, namun pencurian akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Saam, 2016).

"Kini ndak ado kayu jalur lai, lah abih bajua-jua dek inyo", ucap Adjisman menerangkan adanya praktik pembalakan liar dan jual beli kayu di Kawasan Hutan Lindung Sentajo.

Menurut Saam (2016), luas *rimbo larangan* atau Hutan Lindung Sentajo mengalami pengurangan sekitar 110 hektare dari luas keseluruhan 550 hektare. Faktor penyebabnya adalah karena lemahnya lembaga adat untuk mengawasi kawasan hutan ini dari eksploitasi penduduk sekitar untuk berkebun dan berladang.

Keberadaan *rimbo larangan* akhir-akhir ini memang mengkhawatirkan. Berdasarkan pemantauan lapangan, sudah terdapat kebun-kebun karet dan sawit milik oknum masyarakat tertentu di dalam kawasan. Hal tersebut diakui Adjisman. Dia menyebut, *rimbo larangan* kini ini telah diserobot oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Alasannya karena tidak tahu batas kawasan *rimbo larangan*," ungkap Adjisman.

Dia menyadari kelalaian pemangku adat. Hal ini juga diungkap Saam (2016), di dalam buku Kearifan Lokal Masyarakat Mengelola Lingkungan, “kami merasa lalai dan tidak tahu cucu kemenakan kami sudah membuat kebun karet pada wilayah *rimbo larangan*, baru kami tahu setelah kebun karet tersebut sudah besar dan hampir bisa disadap” ungkap seorang pemangku adat.

Pemerintah yang telah menetapkan kawasan ini menjadi hutan lindung juga melakukan berbagai hal. Satu di antaranya adalah pembangunan parit gajah. Parit gajah merupakan istilah yang digunakan untuk parit selebar sekitar dua meter dan digali sedalam satu setengah meter sepanjang batas kawasan. Di lapangan, parit gajah dapat dilihat secara langsung. Keadaan parit gajah kini tampak tidak terlalu terurus dengan banyaknya tanaman yang kini tumbuh di dalam dan di dinding parit.

Pemerintah daerah, melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi, berpartisipasi membangun parit gajah di sepanjang batas Kawasan hutan ini. Parit ini diharapkan dapat mengurangi ancaman perambahan terhadap kawasan. Proyek pembangunan parit pengaman untuk Hutan Lindung Sentajo dilaksanakan pada awal-awal masa kepemimpinan Sukarmis selaku Bupati Kuantan Singingi pada tahun 2006. Proyek parit gajah sepanjang 9.000 meter rampung dikerjakan di sekeliling kawasan pada 2011.

Proyek pembangunan parit gajah ini dikerjakan oleh anggota masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat sebagai pengawas lapangan. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan rasa memiliki di level masyarakat dan meningkatkan peran lembaga adat dalam melestarikan *rimbo larangan* (Saam, 2016).

Pemerintah turut pula membangun kesadaran masyarakat melalui imbauan-imbauan tertulis. Beberapa plang yang dipasang dengan tiang besi tampak di beberapa tempat di Hutan Lindung Sentajo, terutama di tepi jalan raya. Imbauan tersebut ada yang berbunyi “hutan habis, jalur lenyap, budaya hilang. Hentikan penebangan liar”.

✱✱

Berdasarkan administrasi, Hutan Lindung Sentajo Raya berada di Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya. Hutan Lindung Sentajo Raya ditetapkan sebagai hutan lindung berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. 254/Kpts11/1994 tanggal 26

Desember 1984 dengan luas 416,25 ha yang terbagi menjadi 2 blok yang terpisah yaitu blok A seluas 86,88 ha dan blok B seluas 329,38 ha.

Kecamatan Sentajo Raya sendiri merupakan kecamatan pemekaran dari Kuantan Tengah dan Benai. Kecamatan Sentajo Raya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 24 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi.

Ibukota Kecamatan Sentajo Raya terletak di Koto Sentajo, Kecamatan tersebut terdiri dari 15 desa, yaitu: Desa Pulau Komang, Desa Muaro Sentajo, Desa Koto Sentajo, Desa Kampung Baru Sentajo, Desa Pulau Kopung Sentajo, Desa Teratak Air Hitam, Desa Seberang Teratak Air Hitam, Desa Parit Teratak Air Hitam, Desa Jalur Patah, Desa Geringging Baru, Desa Marsawa, Desa Langsat Hulu, Desa Muara Langsat, Desa Geringging Jaya, dan Kelurahan Beringin Jaya.

Di utara, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Pangean dan Kecamatan Logas Tanah Darat. Sementara di selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah. Di sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Singingi, dan di timur berbatasan dengan Kecamatan Benai.

Di masa lalu, Ijzerman sempat menukil keadaan Sentajo. Dia menyebut bahwa di wilayah ini, penduduknya banyak yang menjadi pedagang. Hal demikian masih dapat diperhatikan pada masa sekarang, dimana orang Sentajo banyak yang merantau ke luar daerah untuk berdagang. Tidak ditemukan angka pasti banyaknya warga Sentajo yang merantau untuk berdagang. Sebagian besar anak muda pergi ke kota untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Namun jika dilihat secara fisik, rumah-rumah di Sentajo didominasi oleh rumah beton. Bahkan sebagian ada yang berlantai lebih dari satu. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa orang Sentajo memiliki pendapatan yang cukup baik.

Dikisahkan dari berbagai sumber literasi oral, pada masa lalu, Sentajo berasal dari kata *besuo sajo*. *Besuo sajo* berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti bersua atau berjumpa saja. Namun kata bersua atau berjumpa saja ini sesungguhnya dipertegas dengan pertemuan yang tidak disengaja, atau tiba-

tiba berjumpa.

Diceritakan dari berbagai sumber lisan, Datuk Yang Berlima di Pagaruyung mengutus Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketemenggungan ke wilayah hilir. Datuk Ketemenggungan menghilir melalui jalan darat, sedangkan Datuk Perpatih Nan Sebatang menghilir melalui sungai dengan menggunakan rakit dari batang kayu kulim. Mereka melalui 3 daerah rantau, yakni rantau Kampar, rantau Kuantan dan rantau Batanghari.

Di rantau Kuantan lantas diutuslah dua orang, Datuk Bandaro Lelo Budi dan Datuk Simambang Rajo Nan Putihah. Datuk Bandaro Lelo Budi singgah di suatu negeri yang dikenal sekarang dengan Kenegerian Toar.

Sementara Datuk Simambang Rajo Nan Putihah meneruskan perjalanan hingga sampai pada suatu negeri yang telah dipersiapkan sebagai suatu negeri oleh masyarakatnya. Dalam artian, siap dalam segala persyaratannya. Di antara syarat-syarat sebuah negeri adalah: memiliki setidaknya 4 suku utama berikut dengan sistem pemerintahannya, memiliki tepian mandi, memiliki *pandam* (lokasi) pekuburan, memiliki harta kekayaan negeri. Karena itulah, negeri tersebut dinamakan Sentajo, merujuk pada pengertian *tiba-tiba berjumpa*.

Bagian 4

YANG
LUPUT
DARI
IJZERMAN



Pada Januari 1891, beberapa tokoh dari Lubuk Ambacang dan Lubuk Jambi tiba di Padang. Kedatangan mereka bertujuan untuk membicarakan persetujuan mengenai ekspedisi Ijzerman ke wilayah mereka di Kuantan.

Menurut Ijzerman, posisi bagian timur Distrik Kuantan sangat menguntungkan karena orang-orang lokalnya sangat terbuka. Kecuali itu, masyarakat di timur Kuantan ini mengakui otoritas Yang Dipertuan di Baserah. Jadi secara politik, perjalanan ini sudah tidak mengalami kendala. Peralatan segera disiapkan. Sijunjung merupakan jangkar dari ekspedisi ini. Dari sana, rombongan akan pergi ke Lubuk Ambacang. Mengingat jauhnya rute menuju Langgam, maka kemungkinan perjalanan akan memakan waktu sampai dua puluh hari.

Rombongan mereka terdiri dari para ahli, termasuk Sijfert Hendrik Koorders, seorang rimbawan yang sangat berperan dalam dunia konservasi di Indonesia. Koorders menjadi peletak dasar konservasi jenis flora dan fauna bagi Kerajaan Belanda di tanah jajahan, Hindia Belanda.

Selain para kuli, Koorders dan orang-orang Belanda lainnya, rombongan juga terdiri dari para petinggi lokal. Di antaranya Ijzerman mencatat Datuk Tumanggung dari Sungai Puar, Datuk Rangkayo Maharajo dari Batu Palano, Khatib Maharajo Lelo sebagai wakil Jaksa dari Sijunjung, Datuk Rajo Labiah dari Lubuk Tarab, Paduko Majo Bungsu dan mertuanya dari Lubuk Tarab, Datuk Bagindo Kayo dari Lubuk Tarab, Datuk Rajo Dubalang dari Kumanis, dan Datuk Bagindo Tan Kasar dari Sumpur.

Kisah perjalanan rombongan ekspedisi ini menarik disimak, diwarnai dengan meninggalnya seorang anggota ekspedisi berkebangsaan Belanda. Rombongan panik memikirkan bagaimana dan dimana jenazah akan dikuburkan. Bahkan di beberapa tempat, rombongan ini juga harus berhadapan dengan perampok. Termasuk kisah-kisah tentang perbedaan pendapat petinggi adat di berbagai wilayah kenegerian.

“Dua jalan mengarah dari Cengar ke Lubuk Jambi, satu menuju Pulau Tengah dan satu menuju Kasang. Angku Kuning memerintahkan seseorang untuk membantu kami menunjukkan jalan supaya tidak tersesat,” kata Ijzerman.

Kini, Kasang sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuantan Mudik. Desa ini berbatasan dengan desa Seberang

Cengar, Koto Cengar, Sangau, Banjar Padang, Koto Lubuk Jambi dan Desa Aur Duri. Kecuali itu, desa ini juga berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Barat. Jalan Negara yang membelah Kasang dapat mengantarkan para pelintas menuju simpang tiga di Kiliranjao.

Ungkapan Ijzerman tentang satu jalan menuju ke Kasang menarik ditelisik. Diskusi lapangan di wilayah Kasang dan Lubuk Jambi yang dilakukan penulis tahun 2021 sama sekali tidak memberikan petunjuk dimana jalan bercabang yang dimaksud Ijzerman itu. Tapi Penulis malah menemukan kisah lain dari para perempuan di Kasang. Kisah tentang *batobo*.

Kasang merupakan wilayah yang masih menjalankan tradisi ini. Di Sijunjung Provinsi Sumatra Barat, tradisi yang sama juga kerap dilakukan. Aktivitas *batobo* juga dilaksanakan oleh masyarakat di beberapa lokasi di Kampar di Riau dalam rangka turun ke sawah.

Adalah Jasripa dan Asnawati, dua sahabat kecil yang kini memasuki usia tengah baya, menjelang 35 tahunan. Keduanya mengaku ikut kegiatan *batobo* sejak Sekolah Dasar (SD). Mereka tergabung dalam kelompok *tobo* bersama teman-temannya.

“Dulu waktu SD, saya sudah sekelompok *tobo* dengan Asnawati. Kami mulai sejak kelas 4. Tapi kelompok kemudian pecah, beberapa teman tidak lagi ikut dalam kelompok yang sama, mereka pindah ke kelompok lain karena rumah mereka berdekatan. Saya dan Asnawati tetap sekelompok dengan penambahan anggota baru,” ungkap Jasripa.

Anggota kelompok yang keluar, lanjutnya, membentuk kelompok baru. Karena rumah mereka berdekatan, jadi lebih mudah mengelola kegiatan. Ada pula anggota kelompok yang kemudian tidak lagi bergabung dengan kelompok manapun, tapi mereka kerap ikut kegiatan *batobo* dengan ibu mereka. Saban ada pekerjaan kelompok ibu-ibu, mereka ikut.

“Dulu, mendiang nenek saya juga anggota *tobo*. Ibu saya juga anggota *tobo*. Di sini, di Kasang, jarang ada perempuan yang tidak terlibat sebagai anggota *tobo*,” timpal Asnawati.

Suasana malam terasa hangat di rumah Jasripa. Lokasinya tepat bersisian dengan jalan raya. Jalan yang mungkin dulu pernah dilewati Ijzerman dan Koorders. Rumah Jasripa adalah rumah permanen, halamannya cukup luas dengan empat pilar

menopang beranda depan. Suaminya, Asrizal adalah salah satu anggota Kelompok Kerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Pokja RHL) di Desa Kasang. Keluarga ini dikarunia 3 orang anak, semuanya lelaki. Selain terlibat Pokja RHL, Asrizal juga bertani sawit.

Tetangga mereka, Asnawati adalah ibu dua anak. Anak sulung Asnawati, Nila Kartika, terlibat obrolan hingga larut di malam itu. Cucu Asnawati, anak dari Nila, Revano dan Alfarabi tampak asik bermain di beranda rumah Jasripa. Seseekali Revano merengek mengajak neneknya pulang. Nila bertindak cepat, dia membujuk Revano untuk tidur dipangkuan.

“Saya juga ikut menjadi anggota *tobo*, ikut *Omak* (ibu). Tapi anggota *tobo* untuk kerja ladang atau sawah saja, tidak dalam Pokja RHL,” ungkap Nila.

Sehari-hari, Asnawati adalah petani. Dia terbiasa menakik karet. Dalam bahasa lokal, mereka menyebut kegiatan menakik dengan sebutan *memotong* karet. Saban pagi, Asnawati pergi ke ladang karet yang tak jauh dari kampungnya. Menjelang siang, dia sudah tiba di rumah dan bersiap-siap ikut dalam kegiatan *batobo*.

Sementara Jasripa lebih banyak di rumah. Dia mengurus segala keperluan suami dan ketiga anak buangnya. Kendati begitu, Jasripa juga aktif dalam kegiatan *tobo*.

Baiklah, mari mulai dari awal. *Batobo* sesungguhnya berasal dari kata *tobo* dengan tambahan awalan *ba*, merupakan bahasa Minangkabau yang masih serumpun dengan bahasa Melayu. *Ba* dalam bahasa Indonesia adalah awalan yang sama dengan *ber*. Sementara *tobo* sendiri memiliki banyak pengertian. Ada yang menyatakan *tobo* berarti gerombolan, kaum, kerabat ataupun kelompok.

Kecuali itu, istilah lain yang juga kerap digunakan adalah *tobo konsi*. *Konsi* berarti kongsi, atau perkumpulan.

Tradisi *Batobo* telah melekat kuat menjadi aktivitas bekerja di sawah dalam prinsip kelompok kerja saling membantu. Sebelum kegiatan *batobo* dilaksanakan, masyarakat sebelumnya melakukan rapat untuk menentukan hari pelaksanaan kegiatan, dan siapa anggota yang terlibat. Selain itu, juga untuk memutuskan siapa yang akan menjadi ketua *tobo* (Indrawati, 2017).

Menurut Marbun (2020), *Batobo Konsi* sesungguhnya adalah wadah berkumpulnya masyarakat untuk meringankan berbagai pekerjaan dan membahas aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, *batobo* mempunyai struktur kepemimpinan yang terdiri dari penasehat (pen: merupakan perwakilan dari) *ninik mamak*, ketua (pen: yang disebut) *tuotobo*, *jurutulis* (juru tulis), bendahara, anggota dan pembuat jadwal atau giliran. Anggota dibagi berdasarkan usia dan keterampilan.

Marbun mengambil contoh dari tradisi *tobo konsi* dari masyarakat di Sijunjung, khususnya nagari Koto Padang Ranah dan Tanah Bato.

Beberapa praktek *tobo konsi* pada masyarakat Sijunjung dilakukan dalam berbagai pekerjaan. Misalnya dalam mengerjakan lahan pertanian. Umumnya pekerjaan di ladang dilakukan secara bergilir ke ladang semua anggota. Giliran ini diatur oleh tukang *panyilih*, apa bentuk pekerjaannya, kapan harus mengerjakannya dan siapa saja yang harus mengerjakannya. Setelah disepakati, lalu secara bersama-sama kelompok akan mengerjakannya. Ada kalanya seseorang tidak bisa terlibat karena ada urusan mendesak. Jika terjadi demikian, biasanya dia akan menggantinya dengan uang. Besaran uang yang dibayarkan ditentukan sesuai kesepakatan *tobo*, namun umumnya yang berlaku adalah upah sehari tenaga kerja di ladang. Aturan yang sama juga dilakukan dengan jenis pekerjaan yang berbeda seperti *maramu pekayuan*, *manaruko*, bersawah dan lain-lain. Malah, kadang kala ketika tidak ada pekerjaan yang mendesak, anggota *tobo* sering mengambil borongan pekerjaan. Hasil dari pekerjaan ini nantinya akan dinikmati bersama (Marbun, 2020).

Tidak hanya saling membantu dalam hal tenaga, lanjut Marbun, tapi juga modal usaha dan kebutuhan lain yang mendesak tentang uang. *Batobo* mempunyai konsep koperasi untuk membantu anggota ketika menghadapi kondisi-kondisi genting dan membutuhkan uang. Misalnya ketika mengalami sakit tapi sedang tidak punya cukup uang untuk berobat. *Batobo* mempunyai kas yang dikelola seperti halnya koperasi. Anggota *tobo* berkewajiban menyerahkan iuran pokok dan iuran sukarela atau iuran *rapek*. Iuran pokok mereka hitung berdasarkan harga daging. Memang iuran ini dimaksudkan sebagai tabungan untuk memenuhi kebutuhan daging pada hari lebaran. Sehingga ini juga yang mendorong para anggota *tobo* untuk melunasi iuran dan utang (kalau ada) sebelum lebaran tiba. Iuran ini lah yang

dikelola untuk keperluan-keperluan mendesak anggota sebelum lebaran tiba.

Untuk memastikan setiap aturan ditaati oleh anggota, ungkap Marbun, maka *tobo* mempunyai sanksi untuk setiap pelanggaran yang terjadi. Sanksi ini diberlakukan sesuai dengan berat kecilnya pelanggaran. Mulai dari meminta maaf, denda, hingga mengeluarkan dari keanggotaan. Aturan ini berlaku kepada semua yang terlibat dalam *tobo*. Sanksi inilah yang kemudian bisa mengikat keanggotaan dan menciptakan disiplin dalam berbagai kewajiban yang harus dipenuhi. Seseorang yang tidak taat aturan tentu saja akan merasa malu jika tidak menaatinya. Ada budaya malu yang diciptakan ketika aturan tidak ditaati, hal ini karena rasa memiliki akan *tobo* tersebut sangat tinggi di kalangan anggota (Marbun, 2020).

Namun, menurut Indrawati (2017), seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tradisi *batobo* berangsur-angsur berubah. Orang-orang saat ini sedang mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kegiatan *batobo* dianggap memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan cara kerja baru yang didukung oleh penggunaan mesin atau pembayaran upah untuk menggarap sawah.

Kegiatan Kelompok *Batobo* di Kecamatan Kuantan Mudik telah mengalami pergeseran dari kelompok *gemeinschaft* (motif non-tersembunyi) menuju kelompok *gesseschaft* (motif tersembunyi). Penyebab dari perubahan orientasi nilai budaya *batobo* pada masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik, antara lain: karena perkembangan teknologi, kontak dengan budaya lain dan tuntutan ekonomi (Indrawati, 2017).

Di Kasang, *batobo* hampir mirip dengan gotong royong untuk pekerjaan perkebunan maupun perladangan yang dilakukan bersama-sama. Kegiatan *batobo* ini biasanya dilakukan pada musim-musim tanam dan juga musim panen. Kelompok *batobo* ini bisa terdiri dari 10 sampai dengan 15 kepala keluarga (Jasripa, Asnawati, & Asrizal, 2021).

Kelompok *batobo* Jasripa di Desa Kasang merupakan kelompok yang meneruskan tradisi dari orang-orang tua sebelum mereka. Keberadaan kelompok ini berjalan dengan kondisi naik-turun, bergantung kepada faktor pekerjaan dan juga orang-orang yang ingin bergabung ke dalam kelompok.

Jika pekerjaannya dirasa berat, maka kelompok diperkuat dengan laki-laki. Tapi kalau pekerjaan ringan seperti menebas

ataupun hanya membersihkan ladang dari gulma atau tanaman pengganggu, maka cukup dikerjakan perempuan saja.

Ada pula orang-orang di luar kelompok yang ingin menjadi anggota. Biasanya, orang-orang ini direkomendasikan oleh anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar anggota yang baru bergabung tidak mengacaukan kelompok. Jikapun kekacauan terjadi, maka orang yang merekomendasikan anggota baru itu harus terlibat untuk bertanggung jawab.

"Kami mulai tahun 2015," ungkap Jasripa.

Pada awalnya, kelompok ini hanya berjumlah 10 orang. Dalam perjalanannya, 10 orang lainnya kerap ikut bergabung. Setidaknya, 10 orang tambahan ini kerap berkumpul karena jarak rumah yang berdekatan. Lama-kelamaan, 10 orang yang belakangan ini terlibat bekerja ikut menjadi anggota. Maka terkumpul total 20 orang anggota.

"Tapi kini yang aktif hanya 16 orang, ada 14 perempuan dan 2 orang laki-laki," ucap Jasripa.

Mereka mengerjakan berbagai pekerjaan. Terutama pekerjaan yang berkaitan dengan usaha tani, baik di ladang, kebun, bahkan sampai urusan kolam. Semua pekerjaan yang dilakukan tergantung orang yang memesan kelompok untuk bekerja. Ya, semua tergantung pesanan.

Dari ragam pekerjaan tersebut, anggota kelompok menerima bayaran dari pemilik lahan, kebun, kolam atau bentuk pekerjaan lain yang dilakukan bersama-sama.

Indikasi ini memperkuat pendapat Indrawati. Telah terjadi pergeseran atas motivasi kelompok. *Batobo* kini telah berubah dari sekedar kegiatan sosial, menjadi pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan.

Pada 2019, program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilaksanakan di beberapa wilayah, termasuk Kasang. Kelompok Jasripa mendapat pekerjaan baru. Kini mereka diminta untuk ikut menanam. Ketua Pokja RHL di Kasang adalah suaminya sendiri, Asrizal.

Pokja yang dipimpin Asrizal bertanggung jawab atas lahan seluas 250 hektare. Angka ini cukup besar dan menuntut pekerja yang jumlahnya tak hanya sebatas jumlah anggota *tobo*.

Dalam hitungan Asrizal, setidaknya dibutuhkan 50 sampai 60 orang untuk mengelola lahan RHL seluas itu karena pekerjaan RHL menuntut ketepatan waktu dan target. Bagi Jasripa tidak mungkin mengandalkan hanya 20 orang anggota. Apa lagi yang aktif hanya 16 orang.

Ada banyak kelompok *tobo* di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik ini. Jasripa menjelaskan, ada lebih dari 10 kelompok *tobo*. Tiap kelompok berbeda dengan kelompok yang lain. Dalam perjalanannya, kemudian lahir aturan yang tidak tertulis, bahwa tiap orang tidak boleh masuk ke dalam 2 kelompok *tobo* yang berbeda. Bukan tidak beralasan, aturan ini dibuat untuk menghindari selisih paham antar kelompok maupun anggotanya.

Syarat lain untuk masuk menjadi anggota *tobo* ini adalah harus memiliki kendaraan roda dua. Lokasi pekerjaan yang jauh dari tempat tinggal mereka, mengharuskan paling tidak tiap anggota memiliki sepeda motor atau membonceng dengan anggota yang memiliki sepeda motor. Bagi mereka, kecocokan dan ikatan emosional lebih diutamakan untuk menjadi anggota.

Kecuali itu, anggota *tobo* juga melibatkan keluarga dan tetangga. Jadi tak terbatas pada kesamaan suku atau tempat tinggal atau kecocokan emosional saja. Asnawati mencontohkan, karena dirinya adalah anggota *tobo*, maka tidak menutup kesempatan bagi adik atau kakaknya untuk ikut bekerja dan bahkan menjadi anggota.

"Kalo inyo ko, tigo baradiak dalam kelompok ko (dia ini/Asnawati, tiga beradik ada dalam kelompok ini)", terang Jasripa sambil tersenyum.

Ada pula yang datang karena merasa tidak cocok dengan kelompok sebelumnya. Orang seperti ini dianggap tidak loyal pada kelompok. Biasanya, orang seperti ini tidak akan diterima dalam kelompok manapun. Karena *batobo* bukan hanya urusan kerja, kelompok ini juga sering berkumpul di waktu-waktu senggang untuk membicarakan banyak hal, baik yang resmi pertemuan kelompok ataupun yang hanya sekedar obrolan lepas tak bertema (Jasripa, Asnawati, & Asrizal, 2021).

Kabar tentang pekerjaan RHL ini kemudian tersebar di masyarakat. Tidak sulit untuk mendapatkan penambahan anggota, karena banyak dari masyarakat kemudian meminta kerja dan ingin ikut bergabung kedalam kelompok kerja ini. Orang baru yang

bergabung tentunya sudah melewati berbagai saringan dari sesama anggota kelompok. Setidaknya ada 20 orang anggota tambahan yang kemudian bergabung dalam Pokja RHL yang dipimpin Asrizal.

Sejak itu, kelompok *tobo* berkembang dengan adanya penambahan anggota. Namun perlu dicatat, bahwa anggota tambahan hanya berlaku untuk pekerjaan RHL saja, bukan anggota permanen yang 20 orang di awal. Jadi terdapat 2 kategori pengertian pekerja, anggota *tobo* dan bukan anggota *tobo*.

Dari pekerjaan RHL ini, tiap pekerja dibayar sebesar Rp. 85.000 saban hari, sesuai besaran HOK (Harian Orang Kerja) yang ditetapkan oleh pemerintah. Uang pembayaran HOK dibayarkan setiap minggu. Artinya, tiap minggu anggota Pokja RHL Kasang mendapat bayaran sesuai dengan hari kerja mereka. Catatan tentang jumlah hari tentunya berdasarkan absensi di tangan Ketua Pokja RHL.

Anggota Pokja RHL Kasang yang bukan termasuk ke dalam kelompok *tobo* Jasripa, mengambil uang pembayaran mereka saban minggu. Bahkan ada pula yang mengambil bayaran saban hari, tergantung kesepakatan mereka dengan ketua Pokja. Ada pula yang lebih dulu mengambil upah, dilanjutkan dengan bekerja. Dalam konteks ini, status mereka yang bekerja untuk RHL bukanlah anggota *tobo*, kurang lebih sama dengan Buruh Harian Lepas (BHL).

Sementara, anggota *tobo* menitipkan uang mereka kepada ketua kelompok. Mereka berharap, uang tersebut dapat digunakan nanti ketika lebaran Idul Fitri, atau setidaknya dapat dimanfaatkan ketika Ramadhan tiba.

Simpanan gaji atau pembayaran yang mereka kumpulkan kepada ketua kelompok *tobo*, juga digunakan untuk membantu sesama anggota dan bahkan masyarakat lain diluar kelompok. Mekanismenya, anggota dapat meminjam langsung tanpa harus ada penjamin. Sementara, orang luar kelompok juga diperkenankan meminjam uang, namun harus disertai jaminan. Apa jaminannya? Yakni anggota *tobo* itu sendiri.

Misalnya begini, salah seorang kenalan Asnawati, katakan saja namanya Sri, memerlukan uang untuk pesta pernikahan anaknya. Untuk mempermudah, Sri kemudian mendatangi Asnawati untuk meminjam uang dari kelompok *tobo*. Asnawati

kemudian menyampaikan maksud tersebut kepada ketua *tobo*. Setelah disepakati, maka Sri mendapat pinjaman dengan jaminan Asnawati. Jika angsuran Sri macet, maka Asnawati yang akan bertanggung jawab.

“Setiap peminjam dikenakan bunga peminjaman,” ungkap Jasripa.

Asnawati menggambarkan, jika pinjaman itu sebesar 1 juta rupiah, maka si peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebesar satu juta seratus ribu rupiah. Peminjaman ini terbatas waktu untuk pengembalian, misalnya satu bulan. Atau jika masih belum bisa mengembalikan dalam waktu sebulan, kelompok mewajibkan semua hutang-piutang sudah selesai saat menjelang bulan puasa. Hasil dari bunga peminjaman ini nantinya akan dibagi rata kepada seluruh anggota.

Walaupun menyadari konsep bunga merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, agama yang dianut oleh Asnawati dan Jasripa, tapi konsep tersebut telah menjadi kesepakatan antara mereka. Dan mereka semua menerima hasil usaha pinjam meminjam tadi dengan dibagi rata.

“Ya, kami tahu itu riba,” tandas Asnawati.

Sesungguhnya, peringatan tentang riba telah datang seiring diwahyukannya Al Qur'an. Setidaknya, ada 8 kata riba ditemui dalam 6 ayat di empat surah yang ada dalam Al Qur'an, yakni surah Al Baqarah, surah Ali Imran, surah An Nisa dan Ar Rum.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS Ali Imran:130).

“Kami tahu itu dilarang, tapi kami ikut saja karena sudah dilaksanakan sejak dulu,” kata Jasripa.

Tapi ada satu orang yang tidak mau menerima hasil bunga tersebut. Namanya Ibu Atta Hayuna, seorang anggota dan dianggap orang tua di antara mereka, usianya sekitar 60 tahun. Mungkin orang tua tersebut sangat paham bahwa ancaman riba adalah api neraka.

Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama

dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni api neraka, mereka kekal di dalamnya (QS Al Baqarah:257).

Lepas dari peringatan tersebut, anggota *tobo* memiliki kebiasaan membeli seekor kerbau saban Ramadhan tiba. Biaya pembelian kerbau dibebankan rata kepada setiap anggota. Misalnya harga kerbau 20 juta rupiah dan anggota kelompok ada 20 orang, maka tiap anggota wajib membayar 1 juta rupiah per orang.

Dari mana uang 1 juta rupiah? Yakni dari uang hasil kerja selama setahun. Jika uang yang terkumpul tidak mencukupi untuk membeli seekor kerbau, maka biasanya ada dua kemungkinan. Pertama, tidak ada pembelian kerbau pada masa tersebut, kedua, kerbau tetap dibeli dengan uang yang tersimpan dan ditambahkan kekurangannya oleh masing-masing anggota. Kekurangan uang akan dihitung dan bebannya dibagi rata kepada semua anggota.

Masing-masing anggota, biasanya menerima uang kerja selama setahun dalam jumlah yang berbeda-beda. Perbedaan terjadi karena setiap anggota memiliki tabungan hari kerja yang berbeda pula. Bagi anggota yang rajin, maka biasanya uang hasil kerjanya akan lebih banyak dibanding dengan anggota yang jarang ikut bekerja. Hal ini dirasa cukup adil karena siapa yang bekerja lebih banyak akan menerima hasil lebih banyak pula. Sementara yang bekerja lebih sedikit tidak perlu cemburu karena menerima hasil yang sedikit. Dari uang itulah mereka membeli kerbau.

Kerbau yang telah dibeli kemudian disembelih. Jika di dalam kelompok tidak ada orang yang memiliki keahlian menyembelih kerbau, maka penyembelihan kerbau dilakukan oleh orang khusus yang telah terbiasa dan terlatih. Untuk itu, biaya tambahan juga akan ditanggung masing-masing anggota.

Dagingnya kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh anggota. Cara pembagian daging dilakukan dengan tumpukan, bukan dengan timbangan. Satu tumpuk daging kerbau biasanya terdiri dari lemak, jeroan, daging maupun bagian tubuh kerbau lainnya. Jadi di dalam satu tumpukan akan ada berbagai macam isian.

Mereka tidak mengonsumsi semua daging, sebagian ada pula yang dibagikan kepada orang lain. Bahkan ada daging yang disumbangkan kepada anggota kelompok *tobo* lainnya.

Namun ada pula daging yang dijual. Penjualan daging biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan. Ada pula anggota yang menjual daging sendiri-sendiri, tanpa kesepakatan. Daging kerbau yang dijual berdasarkan kesepakatan biasanya adalah untuk menutupi biaya pembelian kerbau karena uang tiap-tiap anggota tidak mencukupi.

Menjelang bulan puasa Ramadhan tahun 2021, Asnawati mengatakan dia mendapatkan pembagian hasil kerja sebanyak 6 juta rupiah dari hasil kerja *batobo* selama satu tahun.

“Rata-rata dalam setahun saya dapat 5 juta rupiah”, jelas Asnawati.

Persaingan juga terjadi antar Kelompok *tobo*. Ada kalanya pelanggan tidak lagi memakai jasa kelompok, lalu beralih kepada kelompok yang lain. Dengan kejadian itu, setiap kelompok *tobo* dituntut berbesar hati dan melakukan introspeksi diri.

Tidak perlu menanyakan kenapa peralihan itu terjadi, kenapa pelanggan tidak lagi menyewa kelompok, kenapa pelanggan lebih memilih kelompok lain dan pertanyaan lainnya. Jika pertanyaan itu muncul, yang terjadi adalah saling sakit hati. Tiap kelompok memang diharapkan bekerja dengan lapang dada, saling hormat-menghormati dan saling segan-menyegani. Dengan demikian, setiap kelompok *tobo* dituntut bekerja lebih keras dan melayani pelanggannya dengan lebih baik.

Sistem kerja yang tidak terikat akan kontrak, menunjukkan bahwa orang-orang dalam kelompok *tobo* memiliki integritas. Pekerjaan hanya diberikan berdasarkan omongan atau perkataan.

Misalnya, pelanggan meminta kelompok untuk bekerja di ladangnya pada waktu yang ditentukan. Ketika kelompok menyanggupi, maka pekerjaan itu dilaksanakan dengan sendirinya. Kelompok yang telah menyepakati di awal, tidak mengambil pekerjaan lain pada waktu bersamaan. Dengan demikian, semua tugas dapat ditunaikan. Jikapun ada tawaran lain pada waktu bersamaan, maka kelompok dengan senang hati merekomendasikan kelompok lain. Dengan demikian, tidak ada yang namanya pelanggan tetap (Jasripa, Asnawati, & Asrizal, 2021).

Ijzerman berkemungkinan besar tidak bertemu dengan kegiatan *batobo* di masa penjelajahannya. Tidak ditemukan satupun keterangan menyangkut *batobo* dalam catatannya. Hal ini mungkin dikarenakan kunjungan yang terlalu singkat, atau memang karena tujuan kunjungannya hanyalah untuk memastikan rute kereta api yang akan melewati di sebagian wilayah Kuantan. Entahlah.

Bagian 5

GAIRAH RIMBA



Ketua Kelompok Tani Hutan Mandiri Lubuk Ramo, Duski Samad sedang duduk di kedai kopi pada Juni 2021. Berabad sebelum itu, Ijzerman melintas. Jika kini Duski bicara tentang penyelamatan dan rehabilitasi lahan, maka Ijzerman kala itu bicara tentang rute kereta api. Dua hal yang berbeda, tapi mereka dipertemukan oleh suatu lokasi yang bersisian.

Pada 28 Februari hingga 3 Maret 1891, Ijzerman menelusur perjalanan dari Koto Tuo menuju Logei di utara. Sementara kampung Duski berada lebih ke selatan, namanya Lubuk Ramo.

“Loeboek Ramo memisahkan Kwantan dari distrik Batanghari dan berada di bawah pengaruh Indragiri,” kata Ijzerman.

Dalam perjalanan Ijzerman di sekitar Kasang, dia bertemu dengan seorang lelaki tua. Lelaki itu bertanya, dari mana tuan-tuan? Ijzerman menjawab, Kita sudah membeli getah di Lubuk Ramo.

Informasi ini menjelaskan bahwa getah adalah tanaman yang telah lama dibudidayakan dan dimanfaatkan orang Lubuk Ramo. Tidak diketahui getah dari jenis apa. Tapi berkemungkinan berbeda jauh dengan jenis karet yang kini banyak dibudidayakan.

Namun belakangan, tanaman karet sudah banyak bercampur sawit. Duski tak menampik keadaan tersebut. Menurutnya, karet dan sawit kini jamak ditanam warga sebagai penunjang kehidupan. Bahkan di beberapa tempat di Lubuk Ramo, tanaman sawit telah menjelma menjadi tanaman utama.

Duski tentunya tak mungkin merujuk Ijzerman. Mereka terpisah waktu yang cukup jauh. Sementara sawit hadir belakangan sebagai sebuah industri besar dan melibatkan modal yang juga besar. Sebagian penduduk juga bertanam sawit secara mandiri.

“Tak sedikit areal tanaman sawit juga masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh,” akunya.

Karena itu, perlu upaya sekuat-kuatnya untuk menyesuaikan keadaan lahan, berikut upaya agar lahan tidak menjadi rusak. Duski sedang tidak mengatakan bahwa sawit membuat lahan menjadi rusak. Dia hanya ingin mengantarkan satu pemahaman, bahwa bertanam sawit tentunya juga harus mempertimbangkan kelayakan lahan dan daya dukung lingkungan.

Kendati pernah menjadi pembalak liar, Duski mengakui bahwa kegiatan tersebut merupakan dosa yang harus dia pertanggung

jawabkan. Saat ini, katanya, masih banyak pembalak yang beroperasi di sekitar kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh. Dengan alasan itu, Duski terlibat melakukan RHL di Lubuk Ramo dan menjadi Ketua Kelompok Kerja Harapan Desa.

Namun kejadian demi kejadian memaksa Duski harus selalu dalam kondisi sabar dan tabah. Dia kerap diuji dengan keadaan yang di luar kontrolnya sebagai manusia. Misalnya kejadian kecelakaan kerja yang dialami anggota kelompoknya.

Panyongek, katanya, merupakan satwa yang membuat kelompok kerja RHL kocar kacir. Kerap kali, anggota Duski harus berhadapan dengan serangan berpenyengat ini.

Sebagai catatan, *panyongek* adalah bahasa lokal untuk penyengat. Di beberapa tempat, serangan ini dikenal dengan tabuan, tawon atau semacamnya.

"*Panyongek* menyerang ketika membuat jalur tanam," kata Duski.

Hal ini wajar, mengingat tim pendahulu dalam kegiatan RHL adalah orang-orang yang bertugas membuat jalur tanam. Artinya, mereka merintis jalur untuk kemudian dilewati oleh tim lain; penggali lubang, penanam dan seterusnya (Samad, 2021).

Duski mengatakan, tidak ada cara untuk mengusir tawon yang menyerang, selain hanya mengibaskan kain yang ada (baju atau sarung) atau lari sekuat tenaga.

"Saya sudah lupa berapa kali anggota di lapangan diserang tawon," kenang Duski sambil tersenyum.

Kecuali itu, ada pula anggotanya yang tertimpa pohon. Sueb, kata Duski, adalah salah satu anggota Pokja RHL di Lubuk Ramo yang pernah mengalami hal tersebut.

Sekitar bulan Agustus 2019, Pokja RHL Harapan Desa yang dia pimpin melakukan pekerjaan penanaman di lapangan. Kala itu, angin bertiup agak kencang. Suaranya terdengar menyapa pucuk daun-daun yang ada di dalam hutan. Pukul 9 pagi, suara lain ikut menimpali suara angin. Bunyinya seperti kayu tumbang, berdencit lalu terdengar suara patahan kayu yang diikuti dengan suara yang membahana. Seseorang menjerit usai bahana itu. Itulah suara Sueb, kata Duski.

Duski menjelaskan, Sueb ditemukan terlentang terhimpit pohon

yang tumbang. Diketahui kayu itu merupakan pohon kayu tua yang telah lapuk. Tubuh Sueb berada di balik pohon yang menurut Duski lebarnya selebar meja yang kini ada di hadapannya. Duski merentangkan kedua tangannya.

"Di siko badara di talingo, dari muluik, lamo kami mengurusnyo di rumah sakit, tanpa BPJS", terang Duski menjelaskan telinga Sueb yang berdarah, juga mulutnya. Korban menderita luka parah. Beruntung bagian tengkorak kepala Sueb aman.

Beberapa anggota kelompok berkerumun di sekitar Sueb. Sueb merintih kesakitan. Sebagian anggota mencari akal, mereka membuat tandu dari kayu yang dililit dengan kain sarung. Sementara Duski ke luar hutan mencari pertolongan dari unit kesehatan terdekat.

Puskesmas berjarak sekitar 6 kilometer dari tepi hutan terdekat. Beruntung, Duski dapat mengandalkan sinyal telepon genggamnya tak jauh dari pinggir hutan. Dia menelepon seseorang di Puskesmas untuk meminta bantuan ambulance.

Di dalam hutan, anggota RHL sudah mulai menggotong tubuh Sueb yang kesakitan. Jaraknya sekitar satu kilometer menuju tepi hutan dari lokasi korban. Ambulance telah tiba pukul 11 siang, tapi masih menunggu korban yang ditandu dari dalam hutan.

Pinggir hutan merupakan jalan akses perkebunan sawit. Kondisi jalannya rusak, hampir tanpa aspal sepanjang 4,7 kilometer menuju Puskesmas terdekat. Ambulance melewati jalan itu hampir 25 menit. Sueb yang berada di dalam ambulance terus merintih kesakitan.

Di Puskesmas, para juru rawat menyarankan agar Sueb dilarikan ke rumah sakit terdekat. Korban akhirnya dilarikan ke Taluk Kuantan, ibukota Kabupaten Kuantan Singingi. Selama 3 hari, Sueb dirawat intensif di rumah sakit.

Bagaimana dengan biaya? Tak seorangpun mampu menjawab siapa yang akan menanggung biaya pengobatan Sueb. Duski mengambil sikap, kelompok harus bertanggung jawab karena Sueb mengalami kecelakaan ketika sedang bekerja.

"Saya sudah coba tanya ke pihak yang memberi pekerjaan, dalam hal ini Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP DASHL) Indragiri Rokan, KPH juga ke (Yayasan) Hutanriau. Tapi

tidak ada anggaran untuk ini. Jadi, mau tidak mau uang kelompok yang digunakan,” jelas Duski.

Untuk perawatan korban kecelakaan, kelompok dan pengurus menanggung biaya pengobatan, baik yang berasal dari uang kelompok maupun uang pribadi.

“Yo pokoknyo pandai-pandailah kami *mengisi*, kami saling bantu,” lanjutnya.

Lama Duski dan anggota kelompok mengurus korban di rumah sakit. Apa lagi korban bukan merupakan anggota BPJS Kesehatan. Alamat biaya besar yang akan ditanggung. Setidaknya biaya pengobatan mencapai 15 juta rupiah.

Bahkan, setelah Sueb keluar dari Rumah Sakit, pengurus dan anggota kelompok masih memperhatikan keadaannya. Hampir 3 minggu lamanya proses penyembuhan Sueb. Selama itu, Sueb tidak bekerja, sehingga kelompok menanggung biaya kebutuhan rumah tangganya.

Hutan Lindung Bukit Batabuh memang menyimpan misteri alam yang besar. Tak hanya kisah-kisah mistik yang kerap diceritakan warga, tapi juga pertemuan warga dengan binatang buas.

Kontroler Twiss, kata Ijzerman, pernah menceritakan kejadian seseorang yang dicabik-cabik harimau di Rantau Kuantan. Para lelaki lari ketakutan. Justru para wanitalah yang menghadapi hewan buas tersebut, mengusirnya, lalu membawa mayat orang yang mati itu ke luar hutan.

Kisah tentang harimau juga dialami Duski. Sekitar bulan Agustus 2019, jelasnya, dirinya sedang mengendarai mobil menuju lokasi penanaman. Sebagai ketua, Duski punya urusan lain untuk diselesaikan, sehingga dia tidak ikut *mandah* di dalam hutan bersama anggotanya. *Mandah* adalah istilah menginap beberapa waktu di tempat jauh.

Pagi sekali, Duski sudah siap dengan kendaraannya. Dari rumahnya, Duski menyetir ditemani salah seorang mandor. Ketika mulai masuk ke jalan tanah dekat tepian hutan, mereka tiba-tiba melihat seekor harimau melintas menyeberangi jalan. Jaraknya tak jauh, hanya sekitar 15 meter dari depan mobil yang mereka kendarai. Duski dan mandornya tertegun.

Mereka membiarkan harimau itu lewat. Suasana pagi sekitar

jam 10 belumah begitu terik, tapi Duski dan mandor di dalam mobil sudah mulai berkeringat ketakutan. Mereka membiarkan diri mereka terhenyak di jok mobil untuk waktu yang cukup lama usai harimau itu berlalu. Dan malam itu, tak seorangpun berani meninggalkan tempat *mandah* di dalam hutan. Duski tak pulang karena takut bertemu kembali dengan Si Raja Hutan.

Pada Mei 2019, pukul 11 menjelang siang, anggota Pokja Harapan Desa, Desa Lubuk Ramo juga melihat seekor harimau persis sedang memakan ikan. Pagi itu, kisah Duski, anggotanya memasang jaring untuk menangkap ikan di dalam hutan. Kegiatan itu wajar karena ketika *mandah*, anggota kelompok mengandalkan lauk hasil tangkapan sendiri.

Seorang anggota telah memasang jala melintang di sungai pagi tadi. Ujung jala masing-masing tertambat pada sebilah kayu yang ditancapkan di tanah. Sementara bagian atas jala diberi gabus supaya bisa mengapung di dalam air. Ikan yang lewat, akan terperangkap di jaring itu.

Ketika bersiap untuk makan siang, seseorang turun ke sungai bermaksud melihat hasil tangkapan. Tapi yang terjadi adalah; si anggota hanya mampu diam tak bergerak. Dia menyaksikan seekor harimau tengah memakan ikan di jala. Mereka hanya terpisah jarak sekitar 20 meter. Tapi karena posisi harimau ada di bawah sungai, maka anggota Pokja RHL yang diutus itu segera balik kanan, dan kabur.

Dia menceritakan kejadian itu kepada rekan kerjanya yang ada di pondok *mandah*. Mereka semua khawatir jika Si Harimau menyerang. Tapi beruntung, beberapa hari setelah kejadian itu, tak seorangpun yang diganggu harimau. Mereka banyak melihat jejak kaki harimau berkeliaran di sekitar sungai. Diperkirakan, Sang Harimau sedang mencari makanan lalu bertemu ikan-ikan di dalam jala. Itu makanan yang mudah, ketimbang Si Kucing Besar itu harus berkejaran dengan babi hutan.

Di lokasi kerja blok 7, lanjut Duski, kelompoknya juga pernah berjumpa dengan beruang madu.

“Kejadiannya sekitar bulan Ramadhan tahun 2021 ini. kami sedang bekerja di atas tebing. Ketika melihat ke bawah, ternyata ada beruang yang sedang menggali tanah. Mungkin dia sedang mencari makanan. Kami yang di atas tebing berteriak menakuti. Si Beruang akhirnya pergi menjauh,” papar Duski.

Hal serupa juga dikisahkan Direktur CV Barokah Jaya Makmur, Ismail. Menurut Ismail, anggotanya pernah melihat sesosok hewan menyerupai kucing. Ukuran tubuhnya lebih besar dari kucing, bahkan lebih besar atau sama dengan anjing dewasa. Bedanya, badan satwa ini lebih panjang dibanding anjing. Warnanya kuning kecokelatan.

Sekitar tahun 2019, para pekerja sedang beristirahat di areal kerja dekat Desa Seberang Cengar. Ketika sedang bersantai, sesosok satwa melintas dari kejauhan. Para pekerja menyangka itu adalah anjing. Tapi ketika berusaha melihat lebih saksama, satwa itu tidak mirip dengan anjing tapi justru lebih mirip kucing. Dari kejauhan, pekerja lapangan sempat memotret dengan telepon genggam. Hasil fotonya memang tak begitu jelas. Satwa yang berada di bagian tengah foto tampak kabur ketika hasil jepretan itu coba diperbesar. Dari ciri fisik yang disebutkan, disimpulkan bahwa temuan itu adalah kucing mas (Ismail, 2021).

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang mengelola kegiatan rehabilitasi lahan di lapangan. CV Barokah Jaya Makmur telah lama menjadi rekanan BP DASHL Indragiri Rokan.

Menurut Ismail, banyak satwa yang mereka jumpai di lapangan. Ragam fauna seperti babi, rusa, kancil, harimau, dan kucing emas masih banyak dan kerap terlihat di areal kerja RHL.

“Rusa bahkan pernah masuk ke *basecamp* persemaian. Jadi rusa itu tampak tak jauh dari areal penanaman. Anggota kami mengejanya. Karena tak tahu jalan, rusa itu akhirnya masuk ke *basecamp* persemaian sebelum lari kabur ke dalam hutan,” papar Ismail.

Bagian 6

PEMBALAK TOBAT



Ketika Ijzerman tiba di Sijunjung pada 17 Februari 1891, jalur kereta api dari Sawahlunto (tambang batu bara Ombilin) sebagian besar sudah mulai dibangun. Jalur kereta api itu direncanakan membawa material batu bara melewati Silungkang, Solok, Singkarak, terus ke Padangpanjang. Di Padangpanjang, jalur kereta bercabang, satu jalur menuju Padang (*Emmahaven* atau Telumk Bayur) dan satu jalur lainnya menuju Benteng Fort de Kock di Bukittinggi.

Dari Sijunjung, Ijzerman memulai misi pencarian rute termudah menuju pantai timur Sumatra. Rute yang dipikirkannya adalah Padang Sibusuk menuju Muaro Sijunjung melewati Muaro Bodi, terus ke Durian Gadang, terus ke Koto Tuo melalui Padang Tarap, lalu menuju Langgam melalui rute yang lebih melandai dan melewati wilayah-wilayah kecil, terus lurus ke Buatan. Rute yang dibayangkan Ijzerman berujung di Siak. Dari sini, material batu bara akan diangkut dengan kapal ke pantai timur Sumatra.

Kecuali karena perempuan-perempuannya yang dianggap tangguh, Kuantan juga merupakan daerah penting yang langsung berbatasan dengan distrik Batanghari. Kuantan juga menyediakan sungai-sungai yang cukup besar untuk dilayari kapal.

Kuantan merupakan wilayah yang telah mulai terbangun ketika Ijzerman datang. Di sana, area terbangun seperti sawah, ladang, kebun, area pemukiman dan lainnya tunduk pada kekuasaan keluarga atau klan atau suku. Keluarga-keluarga dalam satu suku dapat memperoleh lahan melalui warisan, gadai dan hibah, disamping perolehan lahan lewat upaya pembukaan lahan yang pertama sekali. Dalam istilah Minangkabau, kegiatan pembukaan lahan yang pertama sekali ini disebut *manaruko*, dalam padanan bahasa Indonesia berarti meneroka atau merintis.

Selain itu, Ijzerman juga mencatat bahwa lahan-lahan kosong dan tidak diliputi kepemilikan merupakan lahan yang dikuasai pemerintah negeri. Ini termasuk tanah-tanah kosong dan hutan belantara. Sejauh ini, lahan seperti itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang khusus. Setiap penduduk boleh menebang kayu di dalamnya, berburu, dan memungut hasil hutan tanpa harus ada kewajiban membayar kepada pemerintah negeri.

Pada titik ini, belakangan ada pembenaran untuk melakukan pembalakan di dalam hutan. Anggapan bahwa hutan merupakan milik bersama dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan

bersama telah memicu banyak pihak melakukan kegiatan pembalakan.

Di zaman HPH marak tahun 1970-an, kegiatan pembalakan mungkin adalah kegiatan yang lumrah. Hal ini terus berkembang seiring bentuk pengelolaan hutan yang terus mengalami perubahan. Di akhir periode HPH, sekitar tahun 1990an, kegiatan pembalakan terus berlanjut dengan berbagai modus. Modus yang berkembang di antaranya: oknum berseragam yang memanfaatkan jasa masyarakat lokal untuk mendapatkan kayu, atau masyarakat di sekitar kawasan hutan yang terlibat mengambil kayu secara perorangan maupun berkelompok.

Pada era otonomi daerah, kegiatan pembalakan liar semakin menjadi-jadi. Modus lain yang berkembang adalah; masyarakat lokal ikut membalak karena merasa selama ini hanya menjadi penonton atas pembalakan yang dilakukan HPH, oknum berseragam maupun orang-orang dari wilayah lain.

Pada era ini, generasi Duski mulai remaja dan merasakan kecemburuan serupa. Ditambah lagi dengan gemerlap kehidupan di luar sana yang menjanjikan kenyamanan dan kesenangan. Ketimpangan pendapatan memicu Duski remaja dan rekan-rekannya untuk ikut terlibat mengambil kayu dari dalam kawasan hutan.

Jauh sebelum itu, 6 Maret 1891. Menjelang siang, Ijzerman mendapati vegetasi mulai tumbuh aneh. Beberapa pohon tampak telah dikupas. Di antara bukit-bukit, terlihat genangan air. Di beberapa tempat terlihat pula bekas genangan yang telah surut dan mengering. Ijzerman benar-benar kagum dengan lanskap yang disaksikannya kala itu. Mereka telah melalui Jake sehari sebelumnya.

"Mataku kebetulan mengembara ke sisi kanan dan tiba-tiba aku menjerit karena terkejut. Di sana, di dekat kita, hanya melalui sedikit celah di antara pepohonan, sebuah sungai mengalir secara diam-diam," tulis Ijzerman.

Sungai lebar itu tampak penuh air, lanjut dia. Sungai itu diterangi sinar matahari yang tersenyum. Di sisi lain, dibatasi oleh tepian yang berlapis dan bervegetasi rapat.

"Itu Tesso!" teriak Ijzerman.

Kini mereka berada di tepian air yang tenang dan deras. Langit biru tampak di angkasa. Ijzerman berjalan sekitar 300 meter, lantas menancapkan kapak. Rombongannya harus menebang pohon untuk membuat jembatan. Sebagian lagi, diperintahkan untuk membangun kemah dan memasak. Rombongan Ijzerman harus mencapai sisi sungai di seberang sana sebelum malam hari.

Kendati kisah Ijzerman merupakan kisah penemuan sungai besar Tesso. Tapi menarik, kisah ini disela dengan upaya rombongan ini membuat jembatan. Dan itu harus dengan menebang kayu.

Berbeda dengan Duski. Rombongan pembalak menebang kayu untuk dijual. Alasannya, kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, kesehatan dan biaya perbaikan rumah.

“Masa itu, kami mengambil kayu untuk menyambung hidup,” ujar Duski.

Menurutnya, perbedaan mencolok antara masyarakat lokal dengan para pembalak liar adalah modal atau uang. Masyarakat lokal seperti dirinya tidak dibekali dengan uang yang cukup untuk mengambil kayu di dalam hutan. Uang ditukarkan dengan bekal selama mengambil kayu, membeli peralatan gergaji mesin, transportasi dan uang belanja untuk kepentingan di rumah.

Sementara para pembalak liar, dibekali dengan uang yang cukup, ditambah dengan jaminan keamanan bila diperlukan. Selain itu, para pembalak liar juga sudah dijamin kemana akan menjual kayu hasil membalak.

Karena itu, Duski membedakan dirinya dan orang lokal lainnya dengan para pembalak liar. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari hasil pengambilan kayu. Masyarakat lokal, kata Duski, paling hebat hanya bisa mengambil kayu sekubik atau dua kubik saja dalam seminggu. Sementara para pembalak liar dapat mengambil berkubik-kubik kayu pada periode yang sama.

“Dulu biasanya, satu rombongan kami terdiri dari tiga sampai empat orang,” jelas Duski.

Untuk mendapatkan 1-2 kubik kayu, kelompok ini harus berjalan kaki ke dalam hutan dengan membawa minyak dan bahan makanan. Bekal yang mereka bawa telah mereka perkirakan untuk selama perjalanan, dan akan keluar sebelum bekal membusuk atau bekal telah habis.

Menurut Duski, kelompoknya harus melewati jalan setapak jauh ke dalam hutan. Bahkan terkadang sudah tidak ada jalan setapak lagi. Mereka harus merintis jalan dan memakan waktu sebulan. Merintis jalan bukan pekerjaan gampang. Mereka harus mempertimbangkan jalur terpendek dan termudah untuk dilalui. Itupun kadang harus dengan risiko tidak mendapatkan kayu untuk ditebang.

Jalan yang mereka lalui sebagian sudah dibuka melalui kegiatan penebangan oleh PT. IPA pada tahun 1992. Perusahaan yang berbasis di Sumatra Barat ini, kata Duski, merupakan perusahaan pembalok kayu pemegang izin HPH. Jalan yang dibangun perusahaan mereka sebut dengan jalan balok. Jalan ini menghubungkan Lubuk Ramo dengan provinsi tetangga, Sumatra Barat.

"Kami *ndak* tahu banyak informasi tentang perusahaan ini. Tiba-tiba mereka sudah beroperasi saja di dalam hutan. Saya pernah bertemu dengan karyawannya, dan sempat beradu mulut. Soalnya, kami tidak percaya legalitas perusahaan. Lagian, perusahaan itu merambah sampai ke Lubuk Ramo, padahal menurut karyawannya, izin mereka ada di Sumbar. Ini yang menjadi tanda tanya bagi kami. Kenapa perusahaan dari Sumbar bisa beroperasi sampai ke Riau," sengak Duski.

Kendati begitu, Duski tak mampu memastikan bahwa pembalakan memang dilakukan oleh perusahaan. Dia hanya meyakini bahwa para pembalok adalah orang-orang perusahaan.

"Ya, karena mereka memakai alat berat. Ada *doser* (*bulldozer*) dan ekskavator," katanya.

Kegiatan pembalakan kayu oleh perusahaan sudah dimulai sejak tahun 1992-1993. Karena perusahaan beroperasi di hutan yang berdekatan dengan Desa Lubuk Ramo, banyak jenis kayu yang kini sudah hilang. Misalnya kayu kulim. Kini, masyarakat Lubuk Ramo sangat kesulitan mencari jenis kayu kulim untuk dijadikan kayu pertukangan atau untuk kepentingan umum lainnya (Samad, 2021).

Lepas dari kegiatan yang dia lakukan, menurutnya, masyarakat menolak kegiatan perusahaan karena memasuki kawasan hutan mereka.

Duski mengaku, masyarakat kala itu takut memperlakukan

keberadaan perusahaan. Selain dilengkapi alat berat, kadangkala perusahaan juga dilengkapi dengan personil berseragam. Duski tidak mau menjelaskan seragam apa yang digunakan personil tersebut, yang pasti dia mengabarkan informasi bahwa *beking* perusahaan bekerja mentakut-takuti masyarakat.

“Kami memilih menghindar. Dari pada muncul masalah baru,” ungkap Duski.

Tahun 2005, lanjut dia, beberapa tokoh masyarakat mulai memprovokasi warga agar berani mengambil kayu di dalam hutan. Alasan utamanya, perusahaan selama ini telah mengambil kayu di dalam hutan sementara masyarakat sekitar tidak mendapat apa-apa. Kebetulan pada tahun itu, pihak perusahaan sudah mulai menghentikan kegiatan mereka di dalam hutan. Provokasi itu juga didorong oleh dibukanya keran reformasi, banyak pihak berlomba-lomba *menggaruk* kayu di dalam hutan.

“Kadang *mandah* sampai 5 hari,” katanya.

Ijzerman melanjutkan kisahnya tentang para penebang kayu. Pada 6 Maret 1891, ketika para kuli sibuk bekerja, menurutnya banyak pribumi yang telah keluar masuk hutan. Saat itu, istilah *mandah* mungkin belum sama sekali dia dengar. Tapi Ijzerman menjelaskan, biasanya pribumi pergi ke dalam hutan secara berkelompok, lima atau enam orang. Mereka mencari getah, rotan, gaharu, damar dan mengumpulkan daun tanaman untuk atap. Mereka membawa perbekalan makanan untuk beberapa hari. Di dalam hutan, mereka mencari tempat bermalam yang dekat dengan bahan-bahan yang mereka cari. Tempat menginap juga dapat menjadi titik awal pencarian mereka di dalam hutan.

“Secara alami, paling sulit mengandalkan arah di belantara. Hanya dengan langit cerah, seseorang dapat menentukan titik mata angin di pagi dan sore hari. Tetapi jika langit mendung, maka seseorang berdiri tak berdaya dan berada dalam bahaya besar karena tidak menemukan jalan keluar. Tersesat artinya mati kelaparan, karena pasokan hutan hampir tidak ada apa-apa,” jelas Ijzerman.

Dia mengindikasikan bahwa kelompok *mandah* mestilah orang-orang yang sangat paham dengan lingkungan hutannya. Bila tidak, maka berkemungkinan mereka akan tersesat. Dan jika persediaan makanan habis, maka tamatlah kelompok itu.

Duski mengaku, untuk mendapatkan sekubik atau dua kubik kayu, kelompoknya harus menebang sampai 10 batang pohon. Itu artinya, pohon yang mereka tebang berukuran kecil. Bagi mereka, menebang pohon yang besar adalah risiko dan menuntut pekerjaan dalam waktu lama. Jadi, untuk memudahkan, mereka hanya memilih kayu-kayu ukuran sedang yang bisa ditebang dengan alat sederhana seperti kapak dan gergaji.

Untuk mendapatkan jenis kayu dan kualitas yang bagus, kelompok pembalak di Desa Lubuk Ramo termasuk kelompok Duski memiliki cara unik. Mereka akan memukul pohon kayu tersebut dengan sebatang kayu dan mendengarkan bunyi yang dihasilkan. Bunyi tersebut akan memberikan mereka informasi tentang pohon kayu yang bagus dan padat atau kayu yang tidak baik, keropos pada bagian tengah pohon.

Tiap kelompok pembalak dari desa ini juga memiliki aturan dan tanda sendiri untuk pohon kayu yang mereka temui di dalam hutan. Jika tak langsung ditebang, mereka akan menandai kayu yang mereka temui. Tiap kelompok punya tanda berbeda. Tanda ini dibuat dengan menaruh huruf tertentu di batang pohon yang ditandai (Samad, 2021).

"Kelompok saya dulu memakai tanda S. Kayu yang kami tebang dari jenis meranti dan tambalong," imbuh lelaki tamatan Tsanawiyah ini.

Tiap kelompok selalu menjaga agar tidak terjadi perselisihan. Namun kadang pertengkaran tak dapat dihindari. Ada juga kelompok pembalak yang tidak berkomitmen menjaga aturan, mereka menebang pohon yang telah ditandai kelompok lain. Beruntung karena tidak ada korban jiwa dalam banyak perseteruan. Biasanya, kelompok yang melanggar ketentuan mencari pohon pengganti.

Kayu yang telah ditebang, lanjut Duski, tidak langsung dibawa ke luar hutan. Kelompok memproses kayu bulat menjadi berbagai ukuran. Dengan demikian, kayu bisa langsung dijual ke penampung. Kayu yang sudah siap jual dibawa melalui jalur termudah, biasanya menggunakan jalur sungai.

Sejak 2010, banyak masyarakat yang tobat dari pekerjaan membalak kayu. Kendati sebagian masyarakat masih ada yang membalak kayu hingga saat ini. Tapi Duski benar-benar tobat. Jika ditilik lebih dalam, setidaknya tiga faktor yang membuat

masarakat menjadi tobat.

Pertama; kebijakan pemerintah, penegakan hukum dan dorongan luar negeri. Pada 2009, pemerintah mengeluarkan Undang Undang nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini tentu sudah mengalami proses panjang dan sinkronisasi dengan kebijakan lain semisal Undang Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Di level ini, Pemerintah juga sangat kencang melakukan razia anti pembalakan liar di seluruh wilayah Indonesia. Banyak pihak yang lantas dijebloskan ke dalam penjara dan seterusnya. Pada saat bersamaan, dorongan dari luar negeri, terutama Uni Eropa, telah memaksa Indonesia untuk menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.

Kedua; demam sawit. Pada saat bersamaan, masyarakat juga sudah mulai terjangkit dengan demam sawit. Sawit dianggap sebagai masa depan yang menjanjikan. Bertahun sebelumnya, masyarakat sudah mulai bertanam sawit, baik di lahan sendiri, maupun secara illegal menanamnya di kawasan hutan negara. Di sisi lain, demam sawit juga disebabkan karena banyaknya perusahaan sawit yang menjangkiti masyarakat untuk bertanam sawit.

Ketiga; ketersediaan kayu alam yang menipis. Tak mungkin dipungkiri, pembabatan hutan yang sudah terjadi sejak tahun 1970-an telah membuat ketersediaan kayu alam semakin menipis. Para pembalak mulai kesulitan mencari kayu yang akan mereka tebang. Sementara usaha yang mereka lakukan memerlukan biaya tinggi. Akibatnya, tak sepadan lagi pendapatan dengan pengeluaran.

Tiga kondisi itu memaksa mereka mau tidak mau harus tobat. Walaupun begitu, Duski beralasan, tobatnya para pembalak lebih disebabkan karena dua hal terakhir; demam sawit dan ketersediaan kayu alam yang menipis. Dia sama sekali tidak membahas regulasi.

Mereka yang tobat tentu harus mencari sumber pendapatan baru. Ada bekas pembalak yang kini giat mengelola kebun sawit, ada pula yang mengembangkan sumber pendapatan lainnya semisal berdagang.

Orang-orang Lubuk Ramo sejak dulu memang sudah terkenal tangguh. Sebagai bagian dari kisah Rantau Kuantan, Lubuk Ramo

memang bukan perlintasan kereta api seperti yang diidekan Ijzerman. Tapi pengaruh Lubuk Ramo cukup luas sehingga Ijzerman merasa penting berurusan dengan para pendahulu Duski Samad.

Di zaman modern, Lubuk Ramo dalam skema pemerintahan Republik Indonesia adalah satu desa di Kecamatan Kuantan Mudik. Wilayah ini berbatasan dengan Desa Air Buluh, Pantai, dan Seberang Cengar. Lubuk Ramo juga berbatasan langsung dengan kecamatan tetangga, yakni Kecamatan Benai, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah dan Provinsi Sumatra Barat.

Kisah kebesaran pengaruh Lubuk Ramo mungkin kini sudah mulai larut dalam upaya masyarakat mencari sumber-sumber pendapatan baru. Tapi aturan adat yang berlaku di sana, justru menjadikan wilayah ini menjadi wilayah penting sebagai rujukan program RHL yang ditaja BP DASHL Indragiri Rokan, Yayasan Hutanriau dan KPH Singingi.

Setidaknya ada seribu hektare, RHL pola *agroforest* dengan tipe swakelola yang dikelola orang Lubuk Ramo. Duski mengepalai salah satu Pokja RHL yang ada di wilayah tersebut.

Menurut Yayasan Hutanriau (2021), sebagian besar masyarakat Lubuk Ramo berdarah Minangkabau dan Melayu Kuantan. Mereka telah mendiami wilayah ini sejak lama. Sebagian masyarakat pendatang masuk seiring dengan masuknya PT. TBS (pekerja di perusahaan sawit) dan sebagian kecil berasimilasi dengan masyarakat setempat.

Bagian 7

TANAM
PULIH



Perahu yang bersaing panjangnya 25 meter dan membawa 30 sampai 40 orang yang dilengkapi dengan dayung pendek. Semua perahu mengatur diri mereka sendiri di bagian sungai yang lurus. Pada saat yang bersamaan, mereka harus mencapai titik akhir secepat mungkin. Perahu yang tercepat adalah pemenangnya (Ijzerman, 1895).

Balapan perahu, kata Ijzerman, biasanya dilakukan usai lebaran. Dimana penduduk Kuantan berkumpul dengan pakaian terbagus yang mereka punya. Di mana-mana terdengar suara musik disertai tembakan satu senjata. Seusai balapan, perahu disimpan di bawah rumah atau naungan.

Balapan perahu itu dikenal dengan sebutan *pacu jalur*. *Pacu jalur* merupakan agenda rutin tahunan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut sumber-sumber oral, *pacu jalur* memang sudah eksis sebelum kedatangan Belanda ke Rantau Kuantan. Saban tahun, masyarakat berkumpul untuk menyaksikan lomba kecepatan perahu panjang ini. Belakangan, *pacu jalur* diadakan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Biasanya perahu terbuat dari kayu kulim. Kayu ini dipilih dengan baik dan ditumbangkan dengan ritual tertentu,” jelas Ijzerman.

Kulim merupakan kayu besar dari keluarga *olacaceae*. Di beberapa tempat di Sumatra, kayu ini memang telah menjadi primadona. Pohon kulim dapat mencapai tinggi sampai 50 meter dengan lingkaran batang bisa mencapai 2 meter. Jenis kayu ini pula yang kerap diincar para pembalak seperiode Duski.

Namun entah mengapa, kulim tidak termasuk bibit kayu yang dipilih Duski dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Menurutnya, pilihan jenis tumbuhan berkayu lainnya lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang Kulim. Kendatipun harga kayu kulim di pasaran masih tergolong tinggi.

“Tapi *kan* tetap tidak bisa ditebang, *kan* RHL di lahan hutan lindung. Selain itu, masyarakat banyak yang memilih jenis-jenis yang dapat menghasilkan seperti tanaman buah ataupun kopi. Jadi, pohon yang ditanam nantinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Di kampung Duski, Lubuk Ramo telah menjadi salah satu sasaran program RHL yang ditaja BP DASHL Indragiri Rokan. Di desa ini, RHL dikelola oleh 5 kelompok secara swakelola. Pokja Sungai

Kunyit Lestari, mengelola lahan seluas 200 hektare dengan anggota sebanyak 30 orang. Dengan jumlah luasan dan jumlah orang yang sama, Pokja Harapan Desa, Saiyo Sakato dan Pokja Melayu Sejahtera turut berjibaku pada tiga blok pengelolaan lainnya. Sementara Pokja Indah Tani Piliang Sakato mengelola Lahan seluas 200 hektare dengan jumlah anggota sebanyak 29 orang.

Untuk jenis bibit yang ditanam, itu sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Pihak BP DASHL Indragiri Rokan melalui UPT KPH Singingi hanya menyampaikan pilihlah jenis bibit kayu yang mudah tumbuh, bibit gampang diperoleh dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara untuk jumlah bibit per hektarenya tanaman pokok 400 batang dan tanaman sela 100 batang.

Karet sebanyak 200.000 batang, kembang semangkok/kapecong sebanyak 30.000 batang, kabau sebanyak 20.000 batang serta petai, jengkol dan gaharu masing-masing sebanyak 50.000 batang, merupakan jenis tanaman pokok yang dipilih dan disepakati oleh 5 Pokja yang ada di Desa Lubuk Ramo. Sementara untuk tanaman sela, dipilih tanaman kopi dengan jumlah 100.000 batang.

Manurut Duski, inisiatif perlindungan kawasan hutan lewat kegiatan RHL telah dimulai sejak 2019. Masyarakat menyambut positif kegiatan ini.

Demikian pula di Desa Air Buluh. Pada Juni 2019, Desa Air Buluh sudah mulai didampingi oleh Yayasan Hutanriau. Proses kedatangan para pendamping tentu berbeda dengan apa yang dilakukan Ijzerman lebih dari seabad yang lalu.

Ketika Ijzerman datang dengan ide jalur kereta api, maka para pendamping datang dengan semangat untuk menghijaukan Bukit Batabuh. Namun pekerjaan rehabilitasi hutan dan lahan tentulah tak mudah, tak cukup dengan hanya menyediakan bibit, menanam dan memelihara tanaman saja. RHL menuntut konsistensi, kerjasama, ketaatan pada aturan bersama dan sejenisnya.

Karena itu, para pendamping punya tugas yang cukup berat. Mereka harus menyiapkan masyarakat, membangun kesepahaman bersama akan pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan, mengatur mekanisme pembagian tugas di dalam kelompok, berikut dengan kerja-kerja lainnya yang menasar ketepatan waktu dan target penanaman. Kedatangan mereka

disambut oleh Pokja, ninik mamak dan masyarakat setempat.

“Kami diminta pendamping untuk melakukan rapat bulanan guna memudahkan koordinasi. Padahal, rapat bisa saja dilakukan setiap saat. *Toh* anggota Pokja berasal dari desa setempat,” ungkap Duski.

Duski menyampaikan, secara umum, tugas pendamping adalah untuk memastikan agar Pokja dapat bekerja tepat waktu, mendampingi pembuatan laporan, mengevaluasi proses penyediaan bibit hingga perawatan tanaman, sampai mendampingi kelompok dalam melakukan rapat-rapat. Pendamping juga memfasilitasi musyawarah kelompok untuk meningkatkan pemahaman mengenai esensi, mekanisme, fungsi dan manfaat kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

“Mereka juga melakukan pemetaan sosial budaya. Mungkin dalam keseharian dan sosial budaya masyarakat, ada yang dapat bersinergi dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Contohnya kelompok *batobo* di Kasang,” ungkap Duski.

Pendamping juga membantu kelompok melakukan inventarisasi ulang bibit yang tersedia, sekaligus melengkapi dokumentasi kelompok. Untuk bimbingan administrasi, petugas pendamping dan anggota kelompok berkumpul di Kantor Resor KPH, sebagian di rumah ketua-ketua kelompok, sebagian lagi di posko pendamping.

Kelompok sangat antusias dengan kehadiran pendamping. Pendamping membantu pelaksanaan kegiatan RHL, terutama dari segi administrasi. Karena pencatatan yang dilakukan kelompok belum tersusun dengan rapi.

Pokj RHL memahami pentingnya pengurusan administrasi kelompok secara mandiri, namun ada rasa tidak percaya diri yang membuat mereka belum melengkapi laporan bulanan. Peran Pendamping juga menjadi penting dalam meningkatkan rasa percaya diri kelompok.

Di Desa Air Buluh, selain kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktual, kegiatan RHL juga dikelola secara swadaya oleh enam kelompok kerja, yaitu: Pokja Bukik Sialang Loma, Kembang Serumpun Hijau, Sahabat Wisata, Tunas Baru dan Pokja Jernang Serumpun. Sama halnya dengan di Lubuk Ramo. Masyarakat memilih tanaman kapecong/kembang semangkok sebanyak

120.000 batang, kabau sebanyak 120.000 batang, jengkol sebanyak 60.000 batang, karet sebanyak 120.000 batang, jernang jantung sebanyak 24.000 batang, jernang burung sebanyak 36.000 batang dan bibit tanaman sela (kopi) sebanyak 120.000 batang. Secara keseluruhan, bibit yang ditanam di Air Buluh oleh Pokja RHL swakelola mencapai 600.000 batang pada Lahan seluas 1.200 hektare. Dimana tiap kelompok bertanggung jawab atas area masing-masing seluas 200 hektare (Yayasan Hutanriau, 2021).

Sementara di Desa Sungai Manau, kegiatan swakelola RHL pola *agroforest* dilaksanakan oleh Pokja Sungai Manau Berkarya yang beranggotakan 30 orang. Pokja ini bertanggung jawab melakukan kegiatan RHL di lahan seluas 100 hektare. Sementara jenis tanaman yang dipilih terdiri dari karet, jengkol, gaharu, petai, jernang jantung, jernang burung dan kopi.

Desa Sungai Manau berbatasan dengan Desa Bukit Kauman, Pebaun Hulu, Muaro Tombang dan Provinsi Sumatra Barat. Masyarakat Desa Sungai Manau adalah masyarakat agraris yang dinamis dan telah lama mendiami wilayah tersebut, sehingga telah cukup familier dengan kegiatan bercocok tanam. Tutupan lahan lokasi penanaman Desa Sungai Manau merupakan kawasan yang didominasi oleh tanaman jenis karet. Masyarakatnya mayoritas berasal dari suku Melayu Kuantan, sebagian kecil adalah masyarakat suku Jawa dan suku lainnya (Yayasan Hutanriau, 2021).

Laporan Yayasan Hutanriau (2021) menyebut, Pokja Gurun Alai melakukan kegiatan RHL di Desa Aur Duri seluas 50 hektare. Anggota kelompok berjumlah 20 orang dan telah memilih tanaman yang sama dengan pilihan masyarakat Desa Sungai Manau, kecuali karet.

Di Desa Seberang Cengar, kegiatan RHL bersama masyarakat dilakukan melalui 3 Pokja; Pokja Pati Soni, Pokja Pati Godang dan Pokja Pati Tonga. Masing-masing beranggotakan 30 orang. Tiap Pokja mengurus lahan seluas 200 hektare dengan pilihan bibit matoa, jengkol, petai dan karet, sementara untuk tanaman sela dipilih jenis tanaman kopi.

Ijzerman tiba di Lubuk Ambacang pada 25 Februari 1891, selama 2 hari lawatannya di Lubuk Ambacang, Ijzerman bertemu dengan pemangku adat di sana.

Kedatangan Ijzerman tentulah bukan kedatangan biasa. Demikian

pula para pendamping Pokja RHL. Kedatangan mereka seturut dengan tuntutan agar lanskap Bukit Batabuh menyediakan jasa alamnya secara terus menerus. Tugas pendampingan mestinya tak sekedar menjalankan rutinitas. Pendamping juga dituntut lebih kreatif memainkan perannya sebagai dinamisator.

Baiklah, di sini, di Desa Lubuk Ambacang, kegiatan RHL swakelola dikelola 2 Pokja. Pokja Banjar Sako beranggotakan 61 orang, dan Pokja Maju Bersama beranggota 53 orang. Tiap Pokja mengelola lahan masing-masing 250 hektare. Tanaman yang dipilih masyarakat di Lubuk Ambacang untuk kegiatan RHL terdiri dari: karet 100.000 batang, petai 50.000 batang, gaharu 25.000 batang, jernang jantung 12.500 batang, jernang burung 12.500 batang dan kopi sebagai tanaman sela sebanyak 50.000 batang. Secara keseluruhan bibit yang ditanam adalah sebanyak sebanyak 250.000 batang pada bentang alam seluas 500 hektare (Yayasan Hutanriau, 2021).

Sementara itu, Jasripa dan Asnawati terlibat di Desa Kasang sebagai bagian dari Pokja Sungai Salo. Mereka mengelola lahan seluas 250 hektare. Ada pula Pokja Sungai Gorakan yang beranggotakan 30 orang dan mengelola lahan seluas 250 hektare. Kelompok-kelompok *tobo* ini mengandalkan banyak perempuan dalam pelaksanaan RHL.

Secara keseluruhan, bibit yang ditanam di kasang adalah sebanyak 250.000 batang. Tak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya, di Kasang, masyarakat memilih karet sebanyak 100.000 batang, tampui sebanyak 25.000 batang, cempedak hutan sebanyak 50.000 batang, jernang burung sebanyak 25.000 batang dan kopi sebagai tanaman sela sebanyak 50.000 batang.

Menurut Asnawati, pemilihan ini pada mulanya memang didasarkan pilihan-pilihan yang disodorkan BP DASHL Indragiri Rokan dan KPH. Kendati begitu, pemilihan jenis tanaman sendiri dilakukan secara terbuka.

Hal senada juga disampaikan Kepala KPH Singingi, Abriman. Menurutnya, BP DASHL Indragiri Rokan dan KPH telah memberikan pilihan-pilihan terbuka kepada masyarakat. Masyarakatlah yang kemudian menentukan pilihan jenis tanaman.

“Pilihan terbuka, tentu disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan RHL. Tidak mungkin memberikan pilihan tanaman yang bukan untuk tujuan RHL,” ungkap Abriman.

Di Desa Bukit Kauman, kegiatan RHL dilaksanakan pada lahan seluas 100 hektare. Pekerjaan swakelola dilakukan oleh Pokja Titian Akar yang beranggotakan 30 orang. Sementara jenis tanaman yang dipilih adalah durian, jengkol, gaharu, petai, jernang jantung dan jernang burung. Desa ini berbatasan dengan desa Aur Duri, Kinali, Pebaun Hilir, Pebaun Hulu, Sungai Manau dan Provinsi Sumatera Barat.

Yayasan Hutanriau juga menyebut, kegiatan RHL 2019 di Desa Sungai Besar telah terlaksana pada lahan seluas 300 hektare. Masing-masing dikerjakan oleh Pokja Kerja Lestari Mulya melalui 43 orang anggota di lahan seluas 100 hektare. Sisanya seluas 200 hektare dilaksanakan oleh Pokja Mitra Lestari yang beranggotakan 41 orang.

Di sini, di Sungai Besar, sebagian besar masyarakat mengakui kehilangan sumber-sumber pendapatan dari komoditas pertanian. Hal ini terjadi lantaran saat ini mereka sudah beralih mengandalkan kelapa sawit. Masyarakat kini mulai khawatir, mereka akan dilanda banjir ketika hujan lebat. Angin kencang juga kerap merubuhkan pohon-pohon yang masih tersisa di ladang mereka.

Kendati demikian, awalnya masyarakat Desa Sungai Besar masih ragu-ragu melaksanakan kegiatan RHL. RHL sendiri mesti dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara, dalam hal ini Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh. Sementara, tanaman kelapa sawit yang mereka usahakan berada di dalam kawasan tersebut.

Ini dilema. Satu sisi mereka mau mempertahankan kelapa sawit. Di sisi lain, tawaran pekerjaan melalui swakelola RHL juga menjanjikan. Tapi RHL harus ditanam di hutan lindung yang kini sudah ditumbuhi dengan kelapa sawit yang telah mereka tanam sebelumnya.

Tak ada pilihan, mereka memilih kedua-duanya. Kadang, tanaman RHL yang telah ditanam harus rela disisip karena hancur akibat panen sawit. Kerap pula tanaman RHL hancur akibat terlindas kendaraan berat di sela tanaman sawit, atau meranggas lantaran tersapu pestisida.

Tak jauh berbeda dengan Desa Sungai Besar. Kegiatan RHL di Desa Pantai juga terimbas kendala perkebunan kelapa sawit yang ditanam warganya.

Berbagai upaya dilakukan oleh KPHL Kuantan Singingi Selatan, yang kini berubah menjadi UPT KPH Singingi. Sosialisasi dan pendekatan humanis terus dilakukan sehingga akhirnya masyarakat luluh dan mau terlibat kegiatan RHL.

“Sosialisasi program dilakukan cukup lama. Kegiatan ini betul-betul ditujukan agar masyarakat paham akan pentingnya RHL. Kalau tidak paham, kegiatan ini bisa gagal dan tidak bermanfaat,” ungkap Abriman.

Koordinator Program Yayasan Hutanriau, Melki Rumania (2021) mengatakan, mulanya cukup sulit untuk meyakinkan masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak tahu dan tidak paham mengenai kawasan hutan. Masyarakat menganggap, hutan di sekitar mereka adalah hutan yang dapat digunakan secara bebas. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kegiatan pembalakan liar di masa lampau.

“Masyarakat khawatir, setelah kegiatan penanaman selesai, mereka tidak akan dilibatkan lagi untuk pengelolaan dan pemanfaatannya. Kegiatan penanaman juga dikhawatirkan berdampak pada kebun mereka yang berada di dalam kawasan hutan lindung,” papar Melki.

Pendamping bersama pemangku kawasan berupaya terus-menerus meyakinkan masyarakat, bahwa masyarakat akan terus dilibatkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

“Melalui kegiatan RHL, pemerintah bertujuan mengembalikan fungsi kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan,” timpal Kepala Seksi RHL BP DASHL Indragiri Rokan, Desmantoro.

Di Desa Pantai, kegiatan RHL akhirnya mendapat ruang di tengah-tengah masyarakatnya. Desa ini berbatasan langsung dengan Desa Air Buluh, Lubuk Ramo dan Muaro Tobek. Sepanjang kegiatan RHL yang didampingi Yayasan Hutanriau, di desa ini sudah tertanam sebanyak 5 kali 50.000 batang tanaman. 5 kali berarti dilaksanakan oleh 5 Pokja berbeda dimana masing-masing Pokja menanam pada lahan seluas 100 hektare.

Laporan Yayasan Hutanriau (2021), menyebut ada 5 Pokja yang masing-masing beranggotakan 30 orang, yakni: Pokja Tunas Karya, Pokja Tani Saiyo, Pokja Tani Mekarya, Pokja Dangku Lestari dan Pokja Suka Maju. Sementara jenis tanaman yang dipilih adalah 125.000 batang karet, 25.000 batang gaharu, 25.000 batang

jengkol, 25.000 batang petai, berikut dengan 25.000 batang kopi dan 25.000 batang kakao. Dua jenis terakhir merupakan tanaman sela.

Menurut laporan Yayasan Hutanriau (2021), masyarakat yang terlibat di dalam kegiatan RHL Desa Pantai cukup unik. Pokja menyelesaikan pembuatan gubuk kerja di lokasi penanaman bersamaan dengan pengerjaan pembuatan bibit. Sehingga pembuatan gubuk kerja selesai 100% di bulan Mei. Dan pembuatan bibit selesai 100% di bulan Juni. Ini mengakibatkan konsentrasi pendanaan menjadi minim untuk persiapan penanaman. Kelompok kemudian melakukan musyawarah untuk melakukan persiapan lapangan dengan dana yang tersisa semampunya.

Masyarakat di 10 desa yang difasilitasi Yayasan Hutanriau di sepanjang Hutan Lindung Bukit Batabuh merupakan masyarakat agraris. Mereka hidup terutama dari hasil tani. Latar belakang masyarakat yang seperti ini cukup menolong dalam upaya percepatan kegiatan RHL.

“Kebiasaan masyarakat masuk ke dalam hutan juga mendukung. Dengan kebiasaan itu, penanaman di dalam hutan lindung tidak mengalami kendala berarti. Walaupun kondisi alamnya berbukit-bukit,” ucap Melki.

Duski senada dengan Melki. Baginya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan RHL sangatlah penting. Walaupun banyak kendala di sana-sini. Itu lumrah.

“Yang penting adalah, masyarakat mendapatkan peluang pekerjaan. Dan tentunya meningkatkan pendapatan rumah tangga,” tandas Duski.

Di Desa Air Buluh, lebih dari 50% masyarakat ikut serta dalam melakukan pengisian kantong bibit (*polybag*), membuat pembibitan, pemetaan lahan dan lain sebagainya. Demikian pula di 9 desa lainnya (Yayasan Hutanriau, 2021).

Sementara itu, di lanskap Hutan Lindung Sentajo, kegiatan serupa juga bergeliat. RHL dilaksanakan di Desa Koto Sentajo yang berbatasan dengan Desa Muaro Sentajo, Pulau Kopung Sentajo, Kampung Baru Sentajo, Seberang Teratak Air Hitam dan Geringging Baru.

Masyarakat Desa Koto Sentajo adalah masyarakat adat yang masih memegang teguh tatanan adat. Masyarakat menganggap hutan sebagai sumber daya yang sangat bernilai, mereka bahkan masih menjaga *rimbo larangan*. Mereka juga memiliki lembaga adat Kenegarian Sentajo, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan RHL, kelompok dan pendamping harus berkoordinasi dengan pemuka adat.

Di Desa Koto Sentajo, kegiatan RHL dilaksanakan oleh Pokja Rimbo Lestari di lahan seluas 150 hektare. Jumlah anggota Pokja ini sebanyak 30 orang. Tanaman yang dipilih adalah karet, petai, matoa, gaharu dan kakao, dengan total jumlah bibit yang ditanam sebanyak 75.000 batang (Yayasan Hutanriau, 2021).

Kecuali itu, kegiatan RHL juga melibatkan swasta. Ini dikenal dengan tipe kontraktual. Dimana pekerjaan RHL dikontrakkan pengerjaannya oleh BP DASHL Indragiri Rokan kepada pihak ketiga atau lembaga swasta.

Dalam tipe swakelola, ucap Melki, pekerjaan RHL sepenuhnya dilaksanakan oleh Pokja RHL di masing-masing desa. Namun untuk tipe kontraktual, pemenang tender proyek RHL dapat menyediakan sendiri pekerjaannya. Sebagian pekerja adalah para pekerja yang telah terbiasa melakukan kegiatan RHL. Tapi sebagian lagi merupakan orang-orang desa yang mau bekerja untuk pemenang tender.

“Sementara cara kerjanya, sama saja. Yang membedakan hanya aliran dana. Kalau RHL tipe swakelola, dana ditransfer ke rekening kelompok. Sementara kontraktual, dana dikirim ke rekening kontraktor,” imbuh Melki.

Di kampung Duski, Desa Lubuk Ramo, pekerjaan RHL dengan tipe kontraktual ini dilaksanakan pada lahan seluas 1.000 hektare. Tanaman yang dipilih terdiri dari: karet, petai, jengkol, gaharu dan kapecong atau dikenal juga dengan tapak itik atau kembang semangkuk. Total jumlah bibit adalah 1.100 batang per hektare.

“Di Desa Seberang Cengar, luasnya mencapai 400 hektare. Di Air Buluh 550 hektare. Sementara jenis tanaman yang dipilih adalah matoa, jengkol, petai dan karet,” ungkap Direktur CV Barokah Jaya Makmur, Ismail.

Di Lubuk Ambacang, kegiatan RHL tipe kontraktual dengan pola intensif dilaksanakan pada lahan seluas 500 hektare, ditambah

dengan pola pengayaan seluas 300 hektare.

Ismail menyebut, pola intensif dan pengayaan berbeda. Perbedaannya adalah pada jumlah bibit yang ditanam di setiap hektare lahan. Pada pola intensif, jumlah bibit per hektare adalah 1.100 batang. Sementara pada pola pengayaan, jumlah bibit per hektare adalah 625 batang.

“Di Desa Kasang, pola intensif ditanam pada lahan seluas 700 hektare, dan pengayaan seluas 300 hektare. Tanaman yang dipilih terdiri dari karet, cempedak hutan dan tampui,” tutup Ismail.

Bagian 8

NIKMAT
KHATULISTIWA



Sijfert Hendrik Koorders terlibat perjalanan bersama Ijzerman. Dia menulis sekitar 30 halaman dalam *Dwars Door Sumatra: Tocht van Padang naar Siak*. Kendati perjalanan Ijzerman sendiri merupakan perjalanan untuk menentukan rute kereta api, tapi bagi Koorders, perjalanan ini menambah khazanah pemahaman tentang vegetasi di interior Sumatra.

Dia banyak belajar dari catatan Veth dan van Hasselt sebelumnya. Baginya, perjalanan bersama Ijzerman adalah kesempatan untuk menilik lebih dalam kekayaan flora di wilayah yang dia jelajahi. Kendatipun dia harus berkejaran dengan waktu, mengingat perjalanan panjang ini hanya ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, dibanding dengan perjalanan ekspedisi khusus untuk melakukan survei mendalam terkait vegetasi.

“Karena berbeda keadaan, bagaimanapun, dapat membatasi pengamatan. Pengamatan bisa menjadi dangkal dan materi yang dikumpulkan jauh lebih kecil,” ungkap Koorders.

Fakta penting yang harus dicatat, katanya, terletak pada bagian penting dari pohon yang sangat tinggi, yang batangnya berbentuk kolom halus dan menjulang. Sebelum pohon ini mulai bercabang. Menelitinya membutuhkan waktu berjam-jam. Mungkin pohon-pohon itu terkesan hanya sekilas saja, dan kita luput untuk berkenalan dengannya.

“Tapi saya pikir, saya harus menunjukkannya disini. Mungkin saja akan menginspirasi pembaca untuk berkenalan lebih dalam dengan fitur-fitur utama dalam karakter vegetasi itu,” ungkap Koorders.

Dalam perjalanannya di sekitar Lubuk Ambacang, Koorders mengungkap, dipterokarpa berbentuk batang dengan kolom halus setinggi 40-50 meter, mahkotanya kecil. Berdiri tepat di sampingnya adalah pohon *kaseh* (*Pometia tomentosa* T. et B) yang tinggi, berbonggol rendah dan bercabang banyak. Ada pula raksasa lainnya seperti *ampalo* (*Dillenia Sumatrana* Miq), *rengas* (*Gluta Renghas* L), dan *soengke* atau sungkai (*Peronema canescens* Jack).

Di antara mereka, terjalin dengan mewah rotan dengan duri tajam dan sulur dari segala bentuk. Di bawahnya ada spesies dengan warna kuning keemasan yang indah, kelompok bunga merah dan spesies lainnya dengan warna yang indah. Mereka berayun dari pohon ke pohon, melambung ke puncak tertinggi

dan kemudian menggantung seperti warna-warni karangan bunga dari cabang ke bawah.

Sebagian besar pohon dan liana menghiasi perjalanan dengan bunga dan buah-buahan. Lanskap ini begitu mempesona diterangi oleh sinar matahari, menunjukkan kemegahan warna vegetasi tropis, dalam nuansa hijau yang tak terhitung jumlahnya.

Gelap, hampir hitam, menyinari dedaunan lebat pohon *simaoeng* tinggi atau pohon pengi (*Pangium edule Reinw.*). Sedangkan daun *Melochia Indica Hook* berwarna hijau pucat, atau dari dua spesies *Mallotus* atau Balik Angin (*Mallotus Cochinchinensis Lour* dan *Mallotus floribundus-Muil. Arg*), terlihat lebih rendah di tepi hutan. Dari kejauhan, warna kuning dapat diwakili bunga kuning keemasan *Wormia excelsa Jack* dan *Dillenia Sumatrana miq.* Berikut pula bulu-bulu bunga yang indah berwarna serupa dari pohon pinus *djoewar* atau johar (*Cassia florida Vahl*). Yang lebih menarik perhatian lagi adalah ketika *defoliasi* (pemotongan) tumbuhan berbunga (*sterculia*). Bunga-bunga tumbuh seperti karangan bunga kuning pucat raksasa di pohon-pohon di sekitarnya, sementara juga banyak liana yang tumbuh dihiasi dengan banyak bunga kuning (Koorders, 1895).

Oranye adalah warna bunga pohon kecil dari suku *rubiaceae*, mungkin *pavetta* atau asoka. Bewarna merah tua, karangan bunga liana menggantung di antara pohon tumbang dan diselingi oleh banyak mawar ungu. Warna cokelat tua ditunjukkan oleh puncak-puncak pohon timbalun yang tinggi. Pohon itu tengah berbuah, buahnya itulah yang terlihat cokelat, bukan pada daun atau bunganya. Warna itu juga dapat dilihat pada sayap spesies dipterokarpa yang buahnya seperti kupu-kupu raksasa melayang ke bawah. Warna abu-abu-cokelat diamati pada bagian bawah daun durian (*Durio Zibethinus L*), *Pterospermum diversifolium 81* dan dari *Pterospermum suberifolium Willd.* Ketiga pohon terlihat tinggi.

Koorders terpikat akan keindahan hutan tropis melalui berbagai macam warna dan corak. Berikut pula kekayaan bentuk tanaman yang disusun sendiri oleh alam. Di atas semua itu, perhatiannya ditarik oleh ketinggian pohon, yang pada beberapa individu menjulang sejauh 40-60 meter, sedangkan batangnya halus berdiameter 100-150 senti meter.

Ficus, ungunya, tumbuh kolosal dimana-mana. Kelompok beringin ini tidak menonjol dari sisi ketinggiannya, tapi mereka berukuran lebar. Sebagian besar batangnya terjalin oleh akar

udara. Kadang diameternya lebih dari 10 meter. Sebaliknya, ada pohon yang pendek, tipis, dan berbentuk kolom, yakni pakis. Tapi ada juga jenis-jenis palam, termasuk *Arenga obtusifolia* Mart dengan batangnya yang tipis dan memanjang. *Pandanus furcata* Roxb tampak rumit dengan batang yang bengkok. Mereka tumbuh rendah di tanah. Di tepi Kuantan, mereka sering berupa rumpun rendah yang dibentuk oleh spesimen seperti semak dari genus *aglaia*, dari keluarga *meliceae* dan *myrtacee*.

Panjang lebar cerita Koorders mengenai bentuk dan tutupan vegetasi. Orang awam mungkin tak akan detail membaca setiap kata Latin yang menunjukkan keluarga, suku atau spesies tumbuhan itu. Koorders mungkin telah menyebut ratusan spesies di dalam laporannya.

Pada titik ini, sesungguhnya catatan ini hendak mengajak pembaca membayangkan betapa berharganya hutan alam khatulistiwa. Terutama di Kuantan dengan keberadaan Hutan Lindung Bukit Batabuh dan Hutan Lindung Sentajo. Kedua kawasan hutan lindung ini tentunya memiliki karakter unik. Tapi setidaknya, laporan Koorders telah memberikan sedikit rujukan tentang apa yang terkandung di dalamnya.

Belum lagi diceritakan tentang kekayaan burung-burung, kelas mamalia dan lainnya. Setidaknya, pada bagian terdahulu pernah diungkap tentang harimau Sumatra, beruang madu, kucing emas, dan rusa. Kelompok satwa ini memang diceritakan sangat terbatas karena jurang pengetahuan akan kondisi dan keberadaan mereka di alam liar Kuantan Singingi.

Namun setidaknya, hal itu telah membuka mata banyak pihak. Bahwa Hutan Lindung Bukit Batabuh dan Sentajo penting diselamatkan. Caranya? Menanam pohon, melalui kegiatan RHL.

Masyarakat di sekitar Hutan Lindung Bukit Batabuh mungkin tak banyak paham dengan bahasa Koorders yang banyak menggunakan istilah biologi berbahasa Latin. Biarlah itu urusan Koorders dan para ahli botani lainnya. Yang penting, bagi masyarakat tentu melihat ada bayur, meranti, kulim, sungkai dan lainnya jauh lebih penting. Lebih penting lagi jika tanaman-tanaman itu menghasilkan buah, durian misalnya.

Menurut Duski, pemilihan tanaman untuk ditanam itu memang berdasarkan manfaatnya. Selain itu, tanaman yang dipilih itu juga berguna untuk menahan air.

“Sumber air bersih masyarakat terancam jika Bukit Batabuh terus digunduli. Masyarakat desa sangat bergantung pada aliran sungai yang hulunya berada di hutan lindung” tandas Duski.

Hal serupa juga disampaikan Desmantoro. Menurutnya, BP DASHL Indragiri Rokan berupaya agar sumber-sumber air di hutan lindung dapat terlindungi dengan baik, karena fungsi utama hutan lindung itu sendiri adalah perlindungan sistem tata air, sistem penyangga kehidupan lainnya, serta mencegah bencana hidrologis. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan RHL.

BP DASHL Indragiri Rokan merupakan Satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PDASRH Kementerian LHK yang ditargetkan melaksanakan RHL seluas 15.100 hektare pada tahun 2019. Lokasi RHL tersebut tersebar di beberapa areal kerja UPT KPH dan UPT Ditjen KSDAE, dimana seluas 8.750 hektare berada di areal kerja UPT KPH Singingi.

“Kegiatan RHL 2019 di wilayah UPT KPH Singingi sudah dimulai sejak bulan April, kontrak pendampingan dengan Yayasan Hutanriau dimulai sejak bulan Juni,” ungkap pria yang kerap disapa Toro ini.

Toro menyebut, kegiatan RHL tahun 2019 dilaksanakan di wilayah Hutan Lindung Bukit Batabuh dan Hutan Lindung Sentajo. Kegiatan ini tersebar di 11 desa dalam 4 kecamatan.

“Di Kecamatan Kuantan Mudik, lokasi RHL berada di Desa Sungai Manau, Bukit Kauman, Aur Duri, Kasang, Seberang Cengar, Lubuk Ramo, Pantai dan Air Buluh. Di Kecamatan Hulu Kuantan, berada di Desa Lubuk Ambacang. Di Kecamatan Pucuk Rantau, ada di Desa Sungai Besar. Dan di Kecamatan Sentajo Raya, lokasi RHL berada di Desa Koto Sentajo,” papar Toro.

Toro menyampaikan bahwa pelaksanaan RHL dan pendampingannya pada Tahun 2019 berpedoman pada beberapa aturan. Di antaranya, *pertama*, P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. *Kedua*, P.13/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan. *Dan ketiga*, Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor: SE.2/PDASHL/SET/KUM.1/2/2019 tentang

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2019.

Upaya perlindungan kawasan hutan dan spesies langka (flora dan fauna) mendapat perhatian yang besar karena pemerintah menyadari bahwa Hutan Lindung Bukit Batabuh merupakan hulu dari wilayah Daerah Aliran Sungai Kuantan. Kegiatan ini sedang diupayakan melalui Program RHL dengan menandai spesies langka dimaksud dengan maklumat agar tidak mendapat gangguan dari masyarakat sekitar hutan yang beraktivitas secara legal di dalam kawasan hutan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan beberapa Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diinisiasi oleh masyarakat tempatan melalui program kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (Kurnia, L. dkk, 2020).

Kurnia, L. dkk melanjutkan, untuk menjaga keanekaragaman jenis pohon (peningkatan jumlah, jenis dan kualitas kayu) maka pemerintah dan masyarakat melakukan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dimana jenis tanaman yang ditanam divariasikan berdasarkan keinginan Pemerintah dan masyarakat.

Berbagai jenis tanaman kayu yang potensial dikembangkan, dimasukkan ke dalam jenis tanaman dalam program, disamping menampung keinginan masyarakat terhadap jenis yang diinginkan yang berorientasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti karet, tampui, cempedak hutan, petai dan jernang. Hasil dari kegiatan ini diharapkan akan dapat menjaga keanekaragaman jenis pohon yang pada akhirnya persentasi penutupan vegetasi di Hutan Lindung Bukit Batabuh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apabila keadaan ini tidak dijaga dan dikawal dengan baik akan menimbulkan bencana dan akan mengganggu ekosistem hutan.

Keadaan ekosistem seperti ini mestinya tetap stabil guna menjamin manfaatnya di masa depan. Pemanfaatan di masa depan masih dimungkinkan dengan pemungutan HHBK semisal buah-buahan, minyak, bakalan tanaman hias, rotan dan manau.

Ekosistem Hutan Lindung Bukit Batabuh tentunya juga menjadi bagian penting dari habitat satwa kunci seperti harimau. Sejauh ini, harimau sudah beberapa kali menjadi temuan di lapangan. Bahkan kelompok Duski sudah berada dalam posisi berhadapan dengan satwa ini. masih ingat cerita jaring berisi ikan yang sedang dipanen harimau? Atau kisah Duski yang terhenyak diam di dalam mobilnya?

Kecuali itu, Hutan Lindung Bukit Batabuh juga menyediakan pemandangan alam yang bisa “dijual”. dekat Desa Kasang, terdapat air terjun Guruh Gemurai yang berundak-undak. Itu hanyalah salah satu dari ratusan air terjun yang ada di kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh. Selain itu, mendayung kano atau perahu di sungai Kuantan berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan di bidang pariwisata.

Kurnia, L. dkk menyebutkan, dimensi sosial memiliki atribut yang diperkirakan memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan Hutan Lindung Bukit Batabuh yaitu ; (1) Komitmen stakeholder, (2) Akses masyarakat lokal terhadap sumber daya kawasan, (3) Tingkat pendidikan masyarakat sekitar, (4) Tingkat penyerapan tenaga kerja, (5) Jarak pemukiman dengan kawasan hutan, (6) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung, (7) Pemberdayaan masyarakat sekitar tentang edukasi hutan, (8) Potensi konflik pemanfaatan, (9) Praktek budaya lokal dalam pelestarian kawasan lindung, (10) Ketersediaan organisasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung. Hasil analisis keberlanjutan dimensi ekologi pengelolaan Hutan Lindung Bukit Batabuh memberikan tafsiran bahwa kondisi sosial dalam pengelolaannya mulai membaik.

Hal senada pernah diungkap Ijzerman lebih seabad yang lalu. Kendati Ijzerman tidak menyebut secara langsung nama Bukit Batabuh, namun menurutnya kehidupan sosial di sekitar kawasan yang dilaluinya menunjukkan bahwa keadaan sosial menjadi kunci keberhasilan proyek rel kereta api. Pendekatan sosial yang dilakukan Ijzerman dibuktikan dengan banyaknya anggota timnya yang berasal dari para pemangku adat lokal.

Namun, lagi, batas-batas kawasan mestilah harus jelas. Bila tidak, pengelolaan kedepan tentulah pula akan terus mengalami masalah. Misalnya, batas kawasan antara Provinsi Sumatra Barat dengan Riau. Termasuk pula batas-batas antara kawasan lindung dengan wilayah administratif desa, kebun masyarakat dan lainnya.

Perbedaan persepsi tentang kawasan lindung jelas menjadi tantangan tersendiri. Di lapangan, para pendamping RHL harus berupaya sekuat-kuatnya untuk memfasilitasi jurang pengetahuan antara masyarakat dengan pemangku kawasan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapat beberapa kebijakan yang harus dilakukan, yaitu: 1) Peningkatan pendapatan masyarakat

di sekitar Hutan Lindung Bukit Batabuh melalui Hasil Hutan Bukan Kayu. Untuk meningkatkan penghasilan masyarakat di sekitar hutan lindung, perlu dibuat kebijakan: a) Memberikan hak kelola pada blok-blok pemanfaatan kepada Kelompok Tani Hutan yang telah dilegalisasi dalam bentuk kemitraan sekaligus menjaga kawasan dari berbagai gangguan yang akan menimbulkan kerusakan hutan, b) Membuka informasi pasar dan harga. 2) Meningkatkan aktivitas ekowisata. Untuk meningkatkan ekowisata perlu dilakukan kebijakan: a) Meningkatkan volume perbaikan kondisi hutan melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dinilai oleh pemerintah pusat dan daerah, b) Ekowisata Alam. 3) Pengawasan dan penegakan hukum. Untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, perlu: a) Melakukan patroli rutin bersifat kolaboratif dengan melibatkan instansi terkait dan masyarakat sekitar hutan, b) Penyuluhan hukum dan advokasi, c) Pembentukan forum komunikasi antar stakeholder (Kurnia, L., dkk, 2020).

Pada titik ini, para pemangku kawasan tentu masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat. Upaya-upaya perubahan regulasi yang dibutuhkan di lapangan dalam pengelolaan Hutan Lindung Bukit Batabuh, tentunya tidak bisa dilakukan semudah membalik telapak tangan. Kawasan ini hanyalah bagian kecil dari kawasan hutan lindung lainnya yang jamak di seluruh nusantara.

Tapi biarlah, urusan kebijakan menjadi urusan para pembuat kebijakan yang memang dimandatkan untuk itu. Di lapangan, tugas berat justru menunggu. Belum cukup sumber-sumber informasi yang langsung dapat dicerna masyarakat. Belum cukup pula pemahaman kehidupan yang lestari menjadi kudapan sehari-hari masyarakat. Justru masyarakat masih berkutat pada urusan peningkatan pendapatan, layanan pendidikan, layanan kesehatan berikut layanan lain yang mestinya disediakan pemerintah. Masyarakat masih bicara soal harga sawit dan kebutuhan hari-hari, mereka masih berkutat pada mahalnnya biaya kesehatan dan lainnya. Ini menjadi tugas berat semua pihak. Tapi janganlah lupa satu hal, bahwa:

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikanNya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS Al-Anfal:53).

Bagian 9

HIKMAH MERUAH



Setelah Koorders keluar dari Lubuk Ambacang, dia masuk pada medan bergelombang yang lembut. Kawasan itu terdiri dari pasir kuarsa lempung yang dihiasi hutan sekunder muda. Dia mengamati kantong semar di sana-sini. Rombongan Ijzerman ini sedang menuju ke arah Logei.

"Di atas sana, puncak sejumlah pohon kecil atau semak naik, yang pertama mencapai ketinggian tertinggi 10-20 meter. Di bawahnya tercatat ada *Eurya acuminata* DC, *Adinandra dumosa* Jack, *Vitex pubescens* Vahl, *Rhodamnia trinervia* 81, *Quercus* sp, *Adenantha pavonina* L, *Commersonia platyphylla* Andr, dan *Lagerstroemia speciosa* Pers," ungkap Koorders.

Secara bertahap, lanjut dia, hutan menjadi lebih ringan dan terdapat beberapa *alpinia* atau tanaman berbunga dalam keluarga jahe, dan *lycopodium* yang berkelok-kelok. Akhirnya, vegetasi hutan sepenuhnya dan memberi jalan ke alang-alang, glagah, *alpinia* dan *gleichenia*, di antaranya ada beberapa anakan muda.

Kisah Koorders terus mengalir, seiring aliran Sungai Kuantan yang tenang. Cuaca adalah jerat alam yang harus dihadapi sepanjang bumi terus berputar. Baik Koorders, Ijzerman, Duski, Toro, Ismail, dan perempuan-perempuan anggota *tobo* di Desa Kasang, semuanya bicara tentang cuaca.

Cuaca tropis khatulistiwa dihangatkan oleh sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Pun hujan, turun sepanjang tahun. Namun ada saat-saat tertentu, dimana hujan turun lebih lambat dari biasanya. Atau bahkan tak turun sama sekali. Kondisi ini menjadi nikmat Koorders dan rombongan Ijzerman. Dengan hujan yang tertahan di langit, mereka terus bisa melanjutkan perjalanan menuju Siak.

Tapi bagi petani, itu adalah bencana. Kekeringan akan membuat musim tanam menjadi terundur. Sawah menganga menanti hujan, terjebak pada situasi tak berair. Kering.

Pada Mei 2019, sebagian besar Pokja RHL sudah mulai menanam. Tapi hujan tak turun sampai penghujung Juni. Bagi Pokja yang lokasi penanamannya dekat dengan sumber air, tentu tak terlalu masalah. Tapi bagi mereka yang menanam jauh dari sumber air, itu petaka. Kendati mereka masih beruntung karena menanam di bawah kanopi hutan yang cukup baik. Suasana teduh memberikan sedikit kesempatan bagi air untuk menguap.

Evapotranspirasi berjalan lambat.

Cuaca kemarau mengakibatkan beberapa bibit mati dan harus disisip ulang. Sebagian Pokja kemudian memutuskan untuk menanam tanaman yang tahan terhadap cuaca kemarau. Sisanya akan ditanam saat hujan sudah turun.

Kondisi alam seperti ini pada dasarnya sudah diprediksi oleh proyek RHL yang ditaja BP DASHL Indragiri Rokan ini. Namun sistem penganggaran tentunya tidak seturut dengan itu. Pada titik ini, para pihak mesti berdiri berhadap-hadapan untuk menemukan solusi. Tak satupun kemudian yang rela menjadi korban keganasan alam. Karenanya, duduk bersama menemukan jalan keluar adalah satu-satunya upaya yang dapat dilakukan.

Kendati demikian, kadang jalan ke luar tak kunjung ditemui. Masing-masing pihak kukuh dengan pendapatnya. Hal ini kerap terjadi dan menjadi sebuah kewajaran. Itu biasa dalam sebuah program, apa lagi program yang melibatkan banyak orang, banyak pihak.

Kecuali itu, keadaan alam di dalam hutan sulit diprediksi. Hal itu terbukti dengan kecelakaan yang melibatkan *panyongek* (lebah hutan). Ada pula kayu tumbang yang menghentikan Sueb. Semuanya tanpa prediksi sama sekali. Mungkin saja ada keadaan alam lain yang tidak tercatat sepanjang buku ini dituliskan. Tapi, kisah alam liar Bukit Batabuh memang telah menjadi misteri yang kadang kerap mengancam.

“Semua itu berada di luar kendali manusia,” kata Melki.

Secara teknis, ungkap Toro, kegiatan RHL ini dibagi menjadi 3 tahapan, tahap pertama pada adalah P-0 pada tahun 2019. Tahapan ini meliputi kegiatan penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan. Kemudian pada tahun 2020, dilanjutkan dengan tahapan P-1, yaitu perawatan pada tahun pertama. Pada tahun 2021 dilanjutkan dengan tahapan P-2 atau pemeliharaan tahun kedua. Komponen pekerjaan pemeliharaan meliputi penyiangan, pendangiran, pemupukan serta penggantian tanaman yang rusak atau mati yang diistilahkan dengan penyulaman.

Sepanjang kegiatan, tentu banyak persoalan dan kendala di lapangan. Keadaan alam, seperti yang diungkap sebelumnya, menjadi satu-satunya faktor yang berada di luar kontrol pelaksana proyek. Tapi, Penguasa Alam tentu telah memilih jalan sendiri.

Tak ada sesuatupun di alam semesta ini yang terjadi tanpa sepengetahuan dan izin Dia, Sang Maha Perencana.

Jurang pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya RHL menjalin kisah lain dalam petualangan ini. Masyarakat, disinyalir menjadi pihak yang jurangnya paling dalam.

Kendati banyak pengakuan tentang baiknya kearifan lokal semacam *tobo*, tapi *tobo* saja tidak cukup. Contoh lain, tidak semua masyarakat mengerti tentang siklus air yang melibatkan peran serta Hutan Lindung Bukit Batabuh dan Sentajo. Tidak semua masyarakat pula yang paham tentang pentingnya bertanam tanaman berakar tunjang, sebaliknya banyak yang menanam sawit. Tidak semua masyarakat paham bahaya longsor, justru ada yang menebang pohon di tebing-tebing curam.

Dalam catatan Yayasan Hutanriau, masyarakat banyak yang merasa khawatir. Mereka tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan RHL selanjutnya. Mereka masih berasumsi, bahwa suatu saat pemerintah akan berbalik arah untuk tidak lagi melibatkan mereka dalam kegiatan RHL.

Ini menjadi ceruk lain dalam kesenjangan pengetahuan dan pemahaman. Masyarakat mencoba berandai-andai, tapi mereka lupa mempertimbangkan komunikasi. Mestinya, asumsi yang mereka bangun harus dikomunikasikan dengan pengampu kegiatan RHL.

"Sebagian sudah mencoba menanyakan hal tersebut. Tapi di lapangan, tidak semua hasil komunikasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas," kata Duski.

Ini menjadi ceruk tersendiri pula, dimana sesama anggota masyarakat sulit berbagi informasi. Kendatipun para Ketua Pokja ataupun Perangkat Pemerintahan Desa telah menyampaikan beragam informasi yang di dapatnya dari luar desa, tapi masyarakat desa sendiri kerap kurang paham informasi yang sudah disampaikan itu. Tak jarang, terjadi kesalahan penafsiran dari informasi yang dibawa oleh ketua-ketua Pokja RHL maupun Perangkat Pemerintahan Desa tersebut.

Persoalan lain yang muncul di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait fungsi kawasan hutan dan peraturan perundangan mengenai pengelolaan kawasan hutan. Beberapa kasus perbedaan pendapat ini telah diselesaikan

dengan cara melibatkan pihak tersebut ke dalam pelaksanaan kegiatan RHL. Sisanya diselesaikan melalui diskusi-diskusi informal dengan mempertemukan para pihak (Yayasan Hutanriau, 2021).

Pada titik ini, tentulah jurang komunikasi internal di masyarakat harus diperbaiki. Tak cukup hanya Pokja RHL yang sibuk melakukan sosialisasi, Pemerintahan Desa juga dituntut berkomunikasi aktif menyampaikan pesan-pesan yang tersembunyi itu. Tapi seruan saja tidak cukup. Mesti ada upaya yang cukup baik agar pesan-pesan tersebut tersampaikan kepada khalayak luas. Nah, siapa mau ambil peran?

Kedatangan para Pendamping ke desa-desa tentunya telah menjadi peluang tersendiri. Melalui Pendamping, masyarakat desa diharapkan mendapat informasi yang tepat lagi valid.

Di Air Buluh saja misalnya, masyarakat cukup antusias menyambut Pendamping. Dari sisi proyek, Pokja RHL sangat terbantu menyelesaikan urusan-urusan administrasi. Pencatatan proyek yang selama ini menjadi momok, kini sudah mulai teratasi. Pun di desa-desa lain.

Tapi tugas Pendamping tentu bukan hanya mencatat. Lagian, urusan pencatatan mestinya menjadi tanggung jawab Pokja RHL. Nah, dalam keadaan seperti ini, dituntut kepercayaan diri tiap Pokja untuk menghasilkan laporan yang lebih informatif. Tidak cukup hanya mengandalkan para Pendamping untuk melakukan pencatatan. Tugas Pendamping mestinya membantu, bukan menjadi aktor utama.

Di luar tanggung jawab sebagai tenaga kontrak, Pendamping mestinya juga dapat memainkan peran sebagai dinamisator di level desa. Artinya, Pendamping dapat bergerak leluasa menjadi katalis bagi perbaikan lingkungan desa. Tak terbatas hanya pada kegiatan RHL. Misalnya, mendorong adanya sinergi penggunaan dana desa untuk kegiatan rehabilitasi lahan. Hal lain yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan mendorong proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Menengah Desa agar dapat bersinergi dengan rencana proyek-proyek pada dinas atau instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Mungkin pula Pendamping mendorong sinergi program dengan pihak swasta, atau mendorong kerjasama dengan UPT Pendistribusian Pasokan Air (PAM) Kuansing.

Urusan lain yang juga memungkinkan dilakukan Pendamping

adalah dengan mendorong anak-anak muda desa melekat teknologi. Media sosial yang menjamur, berikutan dengan dampak ikutannya tentu menjadi tantangan berat. Bijak bersama media sosial mungkin dapat menjadi moto bersama. Dalam konteks ini, Pendamping memainkan peran menggerakkan anak-anak muda mempromosikan desanya lewat media sosial. Atau memungkinkan pula melakukan promosi lain untuk produk-produk lokal yang dikembangkan generasi muda.

Tak terbatas hanya itu, Pendamping dapat pula menjadi penggerak untuk sinergi pembangunan antar desa. Misalnya di ranah jasa lingkungan. Desa-desanya yang terhubung oleh sungai menjadi lokasi strategis dan paling mudah dalam mengembangkan kerangka jasa lingkungan. Pendamping dapat menjadi penyambung lidah yang positif antar desa. Pekerjaan ini tentu pula dapat dilakukan dengan melibatkan para aktor kunci di level desa.

Lepas dari semua itu, Pendamping dapat mengembangkan hasil pemetaan sosial yang pernah dilakukan. Data-data tersebut merupakan data penting yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Misalnya, meningkatkan data-data itu menjadi data yang lebih “bersuara”, baik dari sisi kualitas, maupun tampilannya. Sembari itu, Pendamping dapat pula melengkapi data-data lainnya, semisal peta tematik yang berisi: sumber-sumber energi, lokasi wisata, sebaran komoditas pertanian, dan lainnya.

Pekerjaan RHL menuntut agar Pendamping dapat dihubungi oleh Pokja saban waktu. Atau bahkan panggilan tiba-tiba dari pimpinan lembaga, atau bahkan kegiatan tak terduga yang dilaksanakan BP DASHL Indragiri Rokan maupun KPH. Pada level ini, Pendamping tentu harus merelakan waktu ekstra untuk mengurus kegiatan diluar uraian tugas pokok dan fungsinya. Tapi hal ini tentu pula tergantung pada keluwesan Pendamping dan dukungan kelembagaan seperti Yayasan Hutanriau. Pintu masuk sudah dibuka lebar oleh masing-masing Pokja. Jadi, tunggu apa lagi?

Program RHL, seperti yang diungkap Toro, memang menuntut ketepatan waktu, kesesuaian fisik dan administrasi, termasuk pelaporan. Bila tidak, tentu akan berdampak pada tahapan selanjutnya. Kinerja akan terganggu, membuat penganggaran di tahun berikutnya harus dievaluasi kembali.

Perjalanan Ijzerman sejatinya didampingi oleh orang-orang lokal.

Dia tak tahu banyak tentang medan yang akan dia tempuh. Justru, orang-orang lokal dan rombongan pembesar adat dari dataran Bukittinggi yang memberikan ruang padanya untuk mencapai misi perjalanan.

Berbeda dengan masyarakat sekitar Hutan Lindung Bukit Batabuh dan Sentajo, mereka justru memerlukan pendamping. Yakni Pendamping yang senang bekerja bersama, Pendamping yang merefleksikan sikap kepemimpinan, mendukung satu sama lain, dan juga berkembang dengan inisiatif-inisiatif baru. Secara teknis, hal tersebut dapat dipelajari. Namun pekerjaan Pendampingan tentunya juga membutuhkan semangat dan sikap antusias.

Menurut Yayasan Hutanriau (2021), faktor non teknis yang juga turut berpengaruh dalam pekerjaan RHL adalah perbedaan jangka waktu kontrak antara Pendamping – dalam hal ini juga Yayasan Hutanriau – dengan Pokja di level masyarakat. Pertikaian waktu kontrak ini tentu juga memicu persoalan-demi persoalan.

Perbedaan ini menyebabkan Pendamping harus menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas kelompok. Di lapangan, Pokja telah melaksanakan kegiatan selama dua bulan sebelum Pendamping tiba. Akibatnya, laporan Pokja sedikit berantakan dan belum sesuai dengan standar yang diharapkan oleh BP DASHL Indragiri Rokan. Sehingga ketika Pendamping datang, hal utama yang harus dibereskan adalah urusan administrasi.

Kecuali itu, lanjut laporan Yayasan Hutanriau, teridentifikasi lokasi penanaman RHL yang bertumpang tindih dengan lahan perkebunan masyarakat. Lahan tersebut sudah digarap oleh pribadi-pribadi yang tidak terlalu paham batas-batas hutan lindung. Sehingga beberapa Pokja berinisiatif untuk melakukan pemetaan ulang di lokasi yang teridentifikasi tumpang tindih tersebut.

Pokja RHL, secara swadaya melakukan pemetaan ulang untuk menghindari permasalahan dengan penggarap lahan. Keadaan ini kerap menimbulkan kesalah-pahaman. Beruntung karena kesalah-pahaman itu tidak berujung ado jotos.

Duski bahkan mengakui, penggarap lahan tetap tidak merelakan lahan garapannya untuk ditanami oleh Pokja RHL. Akibatnya, tim pengaman yang terdiri dari KPH dan TNI harus turun tangan. Pendekatan persuasif dilakukan, ini terbukti ampuh, karena selama ini para penggarap lahan tidak paham jika lahan garapan

mereka masuk ke dalam wilayah hutan lindung.

“Bahkan, ada kasus patok yang hilang. Hari ini kami memasang patok untuk jalur tanam, besoknya patok sudah tidak ada. Dicabut oleh penggarap lahan. Tapi ada beberapa penggarap yang tidak mau mengaku,” ungkap Duski tersenyum.

Berbeda lagi dengan kasus oknum masyarakat yang melakukan pembalakan liar. Oknum ini bahkan menghentikan kegiatan pemetaan ulang yang dilakukan Pokja RHL. Lagi, tim pengamanan turun tangan, berikut dengan pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

“Semuanya dapat dibicarakan. Tidak perlu ada kekerasan,” ungkap Duski.

Ya, persoalan-persoalan di lapangan sesungguhnya dapat diselesaikan dengan peran-peran fasilitasi, maupun mediasi. Pelaksana RHL mesti jeli melihat situasi ini, berikut dengan kemungkinan pihak mana saja yang dapat didorong melaksanakan tugas-tugas fasilitasi ataupun mediasi.

Ijzerman punya persoalan yang sama di masa lalu. Dia menggunakan peran para pemangku adat, tokoh dan pihak-pihak kunci dalam rombongannya untuk menyelesaikan persoalan. Karena tidak semua masalah harus segera dibawa ke ranah hukum positif.

Tantangan non teknis lain adalah ketersediaan tenaga kerja. Bagi kelompok *tobo* Asnawati dan Jasripa, ketersediaan tenaga kerja untuk melakukan proses RHL menjadi isu yang cukup mencuat. Mereka harus memasukkan orang lain ke dalam kelompok RHL supaya target penanaman berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Ya, memang harus begitu. Kami tak sanggup melakukannya sendiri,” ucap Jasripa.

Hal senada juga disampaikan Duski. Menurutnya, banyak kelompok yang kemudian harus mempekerjakan orang-orang di luar kelompok. Dia mengakui, hal tersebut dilakukan agar proses RHL juga memberi ruang kepada anggota masyarakat lainnya – yang bukan anggota Pokja RHL – untuk terlibat dan menikmati upah dari pekerjaan tersebut.

Di lapangan, Duski menceritakan jika Pokja-Pokja RHL tidak

terlalu mengalami kesulitan dalam menyediakan tenaga kerja. Para pekerja, selain dari desa sendiri, juga dapat berasal dari desa tetangga.

Walaupun tidak semua lahan berkanopi lebat. Tapi setidaknya di banyak tempat, penanaman harus dilakukan di bawah tegakan yang cukup baik di dalam hutan. Menyedihkan, ungkap Jasripa, kelompoknya harus membuat jalur tanam pada lahan hutan yang berkanopi lebat. Hal yang sama juga diungkap para pemuda anggota Pokja di Sentajo. Duski tak menampik ungkapan itu.

“Kami harus membuat jalur tanam di dalam hutan yang lebat,” ungkap Jasripa.

Di sisi lain, Toro mengamini kondisi tersebut, dimana Pokja RHL kadang harus membuat jalur tanam pada wilayah yang hutannya masih cukup baik. Harus diakui, kegiatan RHL tak hanya melakukan rehabilitasi lahan yang telah rusak, tapi juga melakukan penanaman jenis pohon untuk memperkaya jenis-jenis tanaman yang ada di dalam hutan.

Lebih lanjut dijelaskan Toro, pertimbangan politis yang disampaikan oleh pemangku Kawasan, masyarakat, dan stakeholder lainnya pun turut mewarnai dalam penentuan lokasi RHL. Kehadiran program RHL di lapangan diharapkan menjadi sebuah sinyal kehadiran pemerintah dan juga pertanda bahwa hutan yang direhabilitasi tersebut dalam penguasaan negara. Sehingga oknum-oknum perusak hutan akan berfikir ulang untuk mengokupasi tegakan hutan yang ada di lokasi RHL. Namun, apabila kita tidak memahami persoalan yang ada dengan baik, maka terkesan seolah-olah si perencana dalam menyusun dokumen dan peta areal kerja RHL, agak mengabaikan kondisi vegetasi dalam penentuan lokasi. Walaupun dilema, keputusan harus diambil dengan harapan dapat meredam atau menahan okupasi dan ancaman bagi kerusakan hutan, setidaknya selama program RHL berlangsung.

Keadaan tersebut memaksa anggota Pokja RHL melakukan penanaman pada jalur tanam yang telah ditetapkan. Tak banyak pilihan, karena areal penanaman sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya, demikian juga terhadap luasan maupun jumlah tanaman yang harus ditanam.

Akibatnya, bibit pohon kadang harus ditanam bersisian langsung

dengan pohon-pohon besar yang telah lama hidup di wilayah penanaman. Menggali tanah sebagai lubang tanam akhirnya harus dilakukan pada lahan yang menjadi daerah perakaran. Banyak akar tanaman yang terganggu, bahkan harus putus dihantam cangkul para pekerja.

Akibat lainnya, ungkap Duski, proses pemupukan tidak berjalan secara afektif. Pupuk yang ditujukan untuk bibit yang baru tumbuh tentu dimakan oleh tanaman yang telah terlebih dahulu tumbuh di sana.

Namun kondisi-kondisi tersebut sudah kerap dibicarakan. Pokja dan Pendamping – dalam hal ini Yayasan Hutanriau – kerap membahas hal-hal teknis seperti itu di meja-meja kedai kopi. Bahkan cerita yang sama telah pula disampaikan kepada para pimpinan dan personil terkait di kantor BP DASHL Indragiri Rokan di Pekanbaru.

Semua pihak menyadari, banyak hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan proyek RHL di masa depan. Catatan ini mungkin hanya menyuguhkan sebagian kecil dari apa yang telah berlangsung di lapangan.

Sama halnya dengan catatan Ijzerman. Kendati jalur kereta api dari Ombilin ke Siak gagal dibangun, tapi catatannya tentu menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang hidup di masa kini dan masa depan.

Pada akhirnya, catatan akhir ini ingin mengutip salah satu ayat penting dalam Al Qur'an. Ayat ini merupakan salah satu dari ratusan ayat yang menceritakan tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam seluruh hal, terutama dalam proses RHL. Ayat ini juga mengajak semua orang untuk belajar dari tanda-tanda kebesaran Allah yang tak mungkin dihitung manusia.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatNya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran (QS Al-A'raf:57).

PARA PENULIS

SYAFRIZALDI AAL JPANG, lebih dari 20 tahun berkiprah dalam urusan gerakan masyarakat sipil, sosial dan lingkungan. Jpang pernah bekerja pada lembaga internasional seperti Developemnt Alternative Inc. dan Fauna Flora International. Dia juga terlibat sebagai konsultan jangka pendek pada proyek-proyek USAID, Uni Eropa, GIZ, Kemitraan, Yayasan Kehati, Samdhana Institute, Tropical Forest Alliance dan lainnya. Di level nasional, dia pernah bekerja untuk Pundi Sumatra, Walhi, KKI Warsi, FIELD Foundation dan beberapa yang lain. Dia juga bekerja sebagai konsultan untuk Kantor Hukum AsM Law Office.

Jpang berpengalaman dalam berbagai isu di sektor kehutanan, termasuk pengelolaan kawasan hutan dan konservasi, pengelolaan daerah aliran sungai, perubahan iklim, pemberdayaan petani dan konflik tenurial. Dalam 15 tahun terakhir, dia menulis dengan pendekatan teks *strorytelling*. Buku-bukunya diterbitkan oleh berbagai organisasi non pemerintah dan Gramedia Pustaka Utama. Sebagai penulis, dia juga banyak menghasilkan artikel yang dimuat di media arus utama seperti Majalah National Geographic Indonesia Traveler, Majalah Kartini, Majalah Intisari, Majalah Mutiara Biru, Harian The Jakarta Post, jurnalstravel.com, travelnatic.com, kompas.com, tribunnews.com, Harian Koran Tempo dan lainnya.

Di 2020, dia mempublikasikan 2 buku sekaligus. Buku **Talang Mamak di Tepi Zaman**, dia tulis sepanjang awal tahun dan diterbitkan secara digital pada Maret 2020 oleh AsM Law Office. Selanjutnya bukunya berjudul **Khazanah Sembilang Dangku** (KSD) juga terbit di Maret 2020 melalui dukungan Hutan Kita Institut di Palembang. KSD sendiri merupakan pembelajaran penanganan konflik tenurial di lanskap Sembilang – Dangku, Sumatra Selatan. Buku tersebut diluncurkan secara online pada 15 September 2020.

Pada Oktober 2019, Aal Jpang bersama Diah Suradiredja meluncurkan buku berjudul **Perempuan di Singgasana Lelaki**. Buku ini diterbitkan Gramedia Pustaka Utama (GPU) pada September 2019. Melalui dukungan The Ford Foundation, dia menggarap kisah-kisah inspiratif para pemimpin politik perempuan, termasuk di antaranya Bupati Luwu Utara (Indah Putri

Indriani), Walikota Surabaya (kini Menteri Sosial, Tri Rismaharini), Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawangsa) dan sederet nama lainnya.

Selain itu, buku-buku lain yang pernah ditulis: 1) **Kepak Punai**, tentang perjuangan tanah ulayat oleh masyarakat adat Melayu, diterbitkan GPU tahun 2018. 2) **Langkas Jenggala**, berkisah tentang Perhutanan Sosial, diterbitkan oleh GPU tahun 2018. 3) **4 Sisi**, mengisahkan kondisi peri kehidupan dan konservasi di sekitar TNKS, diterbitkan oleh GPU pada 2017. 4) **Namaku Dahlia**, tentang para perempuan di Lubuk Beringin yang berdaya secara ekonomi, diterbitkan GPU pada, 2015. 5) **Namaku Dahlia**, tentang para perempuan di Lubuk Beringin yang berdaya secara ekonomi, diterbitkan Pundi Sumatra dan Partnership pada 2014. 6) **Riak Mendesau**, buku yang mengulas testimoni para pihak di Sumatra dalam Pengelolaan Hutan Lestari dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, diterbitkan Pundi Sumatra dan Multi Stakeholder Forest Program (MfP), Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatra (APIKS) dan Yayasan Kehati pada 2012. 7) **Mimpi Hutan Desa**, buku pembelajaran pengembangan hutan desa, diterbitkan Pundi Sumatra dan Partnership pada 2010. 8) **Lentera Kampung Hutan**, buku pembelajaran pengembangan energi listrik di desa-desa sekitar kawasan TNKS, diterbitkan Pundi Sumatra, MfP Phase 2 dan The Partnership for Governance Reform-Indonesia pada 2010. 9) **Parak: Sosial Forestry Ala Masyarakat Kotomalintang**, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat di Bogor 2004.

Sebagai editor dan kontributor tulisan, Syafrizaldi terlibat dalam buku-buku: 1) **Langgam Salindia**, kisah tentang perjuangan konservasi di Sumatra bagian tengah dan selatan, diterbitkan Pundi Sumatra dan Tropical Forest Conservation Action (TFCA) Sumatra pada 2018. 2) **Bait Satria Andalas**, kisah-kisah perjuangan konservasi di Sumatra bagian Utara, diterbitkan TFCA dan Leuser Conservation Partnership pada 2018. 3) **Seharum Tanah Wana**, buku tentang inisiatif masyarakat Wana Posangke dalam mengelola sumber daya alam, diterbitkan Yayasan Merah Putih di Palu pada 2018. 4) **Detak Konservasi Sumatra**, buku berkisah tentang berbagai inisiatif konservasi di hutan Sumatra, diterbitkan oleh GPU pada 2017. 5) **Tumbuh di Era Digital**, buku yang bercerita tentang perkembangan anak di era digital, diterbitkan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan UNICEF Indonesia di Jakarta pada 2016. 6) **Plan C**, buku tentang Metodologi Pengorganisasian Masyarakat berbasis Lanskap,

diterbitkan Pundi Sumatra dan TFCA Sumatra pada 2016.7) **Buku Saku Pendamping Lembaga Keuangan Mikro**, diterbitkan Pundi Sumatra dan TFCA Sumatra pada 2015. 8) **Menyemai Siaga di Lereng Malalak**, sebuah buku foto tentang kesiap-siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam oleh Yayasan FIELD Indonesia dan Muslim Aid di Padang pada 2010 (tidak dipublikasikan). 9) **Watershed Management Toolkits**, sebuah buku tentang pengelolaan daerah aliran sungai, diterbitkan oleh USAID's ESP, kementerian Kehutanan dan BAPPENAS di Jakarta pada 2009. 10) **Potret Hutan Jambi**, sebuah buku tentang kondisi hutan di Provinsi Jambi, dipublikasikan KKI Warsi, Jambi 2005. 11) **Obrolan Lapau-Obrolan Rakyat**, buku tentang potret pergulatan kembali ke nagari di Sumatra Barat, diterbitkan Studio Kendil, Institut Hukum Sumber Daya Alam dan KKI Warsi, Bogor 2004. 12) **Parak: Mutiara Di Tepi Danau**, booklet tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dipublikasikan KKI Warsi pada 2002.

Sementara, **DEDE KUNAIFI** adalah alumnus Jurusan Kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Dede berminat pada isu-isu sosial dan lingkungan, hal ini yang membuat dia bergabung dengan Kelompok Pecinta Alam Einstein Mapalindup Ceria Club (KPA EMC²) di fakultasnya. Dede mengawali kiprahnya di gerakan masyarakat sipil dan lingkungan sejak masih di bangku kuliah, dia bergabung dengan Yayasan Khasanah Alam dan Budaya Tropis Riau (Kabut Riau). Dede Juga pernah bekerja untuk Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, lembaga yang fokus pada isu-isu yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Dia juga pernah bergabung dengan LSM anti korupsi, Transparency International Indonesia (TII) sebagai asisten manajer riset kantor Riau untuk isu korupsi di sektor kehutanan.

Selama lebih dari 7 tahun, Dede menjalankan organisasi bernama Perkumpulan Rumah Pohon di provinsi Riau. Organisasi ini berafiliasi dengan Das BaumHaus yang berkedudukan di Munich, Jerman. Perkumpulan Rumah Pohon fokus untuk memantau dinamika pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya Riau. Pada 2015 hingga 2018, Dede mengelola program peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan kesadaran akan risiko kebakaran hutan dan lahan di 78 desa di Riau.

Sejak 2007, Dede banyak terlibat dalam menginisiasi Jaringan Kertas Indonesia (Indonesia Paper Network). Dia terlibat dalam serial diskusi terkait isu kertas di Santa Cruz (Spangyol) tahun

2006 dan Switzerland tahun 2009. Dede juga menjadi bagian dari delegasi Indonesia untuk pertemuan tentang Sertifikasi Minyak Sawit dengan Uni Eropa di Berlin, dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Commonwealth Bank di Frankfurt, Jerman tahun 2009. Pada 2014, Dede ikut mendukung penulisan draf mekanisme pengaduan untuk Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (*Sustainable Forest Management Policy*) untuk grup APRIL. Tahun berikutnya, 2015, Dede berpartisipasi dalam pertemuan Para Pihak (*Conference of the Parties/COP*) 21 di Paris, Perancis, untuk mempresentasikan hasil kerjanya terkait penurunan angka kebakaran hutan dan lahan.

Sepanjang karirnya, Dede juga banyak terlibat melakukan riset sosial dan ekologi, misalnya, riset ekologi Semenanjung Kampar (2004). Pada 2020, Dede terlibat melakukan riset Konflik Perkebunan Kelapa Sawit dan Akses terhadap Keadilan di Riau.

Tahun 2021, Dede dan Jpang terlibat mendukung penyusunan *Business Case* (Kasus Bisnis) untuk Tropical Forest Alliance yang berkaitan dengan 3 perusahaan besar yang beroperasi di 3 tiga lokasi yang berbeda, Riau, Jambi dan Kalimantan Tengah.

Dede dan Jpang, kini sama-sama beraktivitas bersama The Global Mata Angin (GMA). GMA sendiri didirikan untuk menyumbang pada penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan komunikasi cerdas di berbagai sektor, termasuk: swasta, pemerintah, profesional dan komunitas masyarakat. GMA berkembang untuk menjawab berbagai kebutuhan asistensi, resolusi konflik dan komunikasi di bidang konservasi sumber daya alam, keragaman hayati, serta bisnis di sektor kehutanan dan pertanian dalam arti luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriman. (2021, June). (S. Jpang, & D. Kunaifi, Interviewers)
- Adjisman. (2021). (S. Jpang, & D. Kunaifi, Interviewers)
- Desmantoro. (2021, Juni). (S. Jpang, & D. Kunaifi, Interviewers)
- Erpino; Evi Sribudiani; Defri Yoza. (2021, July). Retrieved from UNRI: <https://faperta.unri.ac.id/wp-content/uploads/2021/04/18-jiik-koto-sentajo.pdf>
- Ijzerman, J. W. (1895). *Dwars Door Sumatra: Tocht van Padang naar Siak*. Batavia: G Kolff and Co.
- Indrawati. (2017). Cultural Value System Change of Batobotribe in Kuantan Mudik Subdistrict of Kuantan Singingi Regency. *Proceeding 1st International Conference on Culture, Arts and Humanities (ICCAH)* (p. 168). Padang: Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi Universitas Andalas.
- Ismail. (2021). (S. Jpang, & D. Kunaifi, Interviewers)
- Iswahyudi. (2017). Pengelolaan Lahan Kritis Hutan Lindung Bukit Betabuh Berkelanjutan. *Agrosamudra*.
- Jasripa, Asnawati, & Asrizal. (2021, Juni). Interview/FGD. (S. Jpang, & D. Kunaifi, Interviewers)
- Jpang, S. (2015, February 20). *Merekat Puing-Puing Kerajaan Siguntur*. Retrieved from <https://nationalgeographic.grid.id/read/13297244/merekat-puing-puing-kerajaan-siguntur>
- Jpang, S. (2018, September). Rimbang Baling Si Perawan Yang Tersisa. *Majalah Intisari*.
- Koorders, S. H. (1895). Losse schetsen der vegetatie van Equatoriaal Sumatra. In J. W. Ijzerman, *Dwars Door Sumatra: Tocht van Padang naar Siak* (p. 505). Batavia: G Kolff and Co.
- KPHL Kuansing Selatan. (2015). *RPHJP KPHL Kuansing Selatan Provinsi Riau tahun 2016 - 2025*. Pekanbaru: BPKH Wil XIX Pekanbaru.

- Kurnia, L., R.M. Putra, Suwondo. (2020). Pengelolaan Hutan Lindung Bukit Betabuh Berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Marbun, F. (2020). Belajar Gotong Royong dari Tradisi Batobo. *Bendang-Kumpulan Tulisan Sejarah dan Budaya*, p. 78.
- Marsden, W. (1784). *The History of Sumatra*. London: Thomas Pyne and Son.
- Pemprov Sumbar. (2012). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Rencana Tata Ruang Daerah Sumatera Barat. *PERDA 13 tahun 2012*. Padang: Pemprov Sumbar.
- QS Al Baqarah:257. (n.d.). *Al Qur'an*.
- QS Al-Anfal:53. (n.d.). *Al Qur'an*.
- QS Al-A'raf:57. (n.d.). *Al Qur'an*.
- QS Ali Imran:130. (n.d.). *Al Qur'an*.
- Rumania, M. (2021, Juni). (S. Jpang, & D. Kunaifi, Interviewers)
- Saam, Z. (2016). *Kearifan Lokal Masyarakat Mengelola Lingkungan*. Pekanbaru: UR Press .
- Samad, D. (2021, Juni). (S. Jpang, & D. Kunaifi, Interviewers)
- Veth, P. J. (1884). *Midden Sumatra; Reizen En Onderzoekingen Der Sumatra Expeditie 1877 - 1879*. Leiden: E.J Brill.
- Yayasan Hutanriau. (2021). *Pekerjaan Pendampingan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun 2019-2021*. Pekanbaru: Yayasan Hutanriau.



PUGAR BELANTARA KUANSING

Pugar Belantara Kuansing adalah cuplikan kisah-kisah terselip dari perjalanan ekspedisi jalur kereta api dari Ombilin menuju Siak. Jalur ini rencananya menyambungkan Sumatra Barat dengan Riau melalui lokomotif bertenaga uap. Kisah ekspedisi ini bertalian dengan dinamika sosial di Distrik Kuantan.

Di antara cuplikan itu, inisiatif Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) bergelut dengan gairah pengelolaan Hutan Lindung Bukit Batabuh, dan Hutan Lindung Sentajo. Helat RHL menyeruak sebagai penyambung hidup masyarakat di desa-desa.

Keduanya, ekspedisi jalur kereta api dan RHL, berkelindan dalam pekatnya aroma semangat mencapai obsesi. Lantas menjelma menjadi hidangan lezat, pemberi rasa nikmat.

Selamat mencerna!

Yayasan Hutanriau
Komplek Bromelia
Jl. Kayu Manis, Arengka
Pekanbaru, RIAU
<https://hutanriau.or.id/>
© 2021



BPDAHL Indragiri Rokan



Yayasan Hutanriau

ISBN 978-623-98337-0-1



9 786239 833701